

**KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH KOTA
MALANG DI ERA OTONOMI DAERAH
(Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**SENOVANI FIRMAN DETTA
NIM. 0410310114**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KOSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2008**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh fihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Februari 2008

Nama : Senovani Firman Detta
NIM : 0410310114

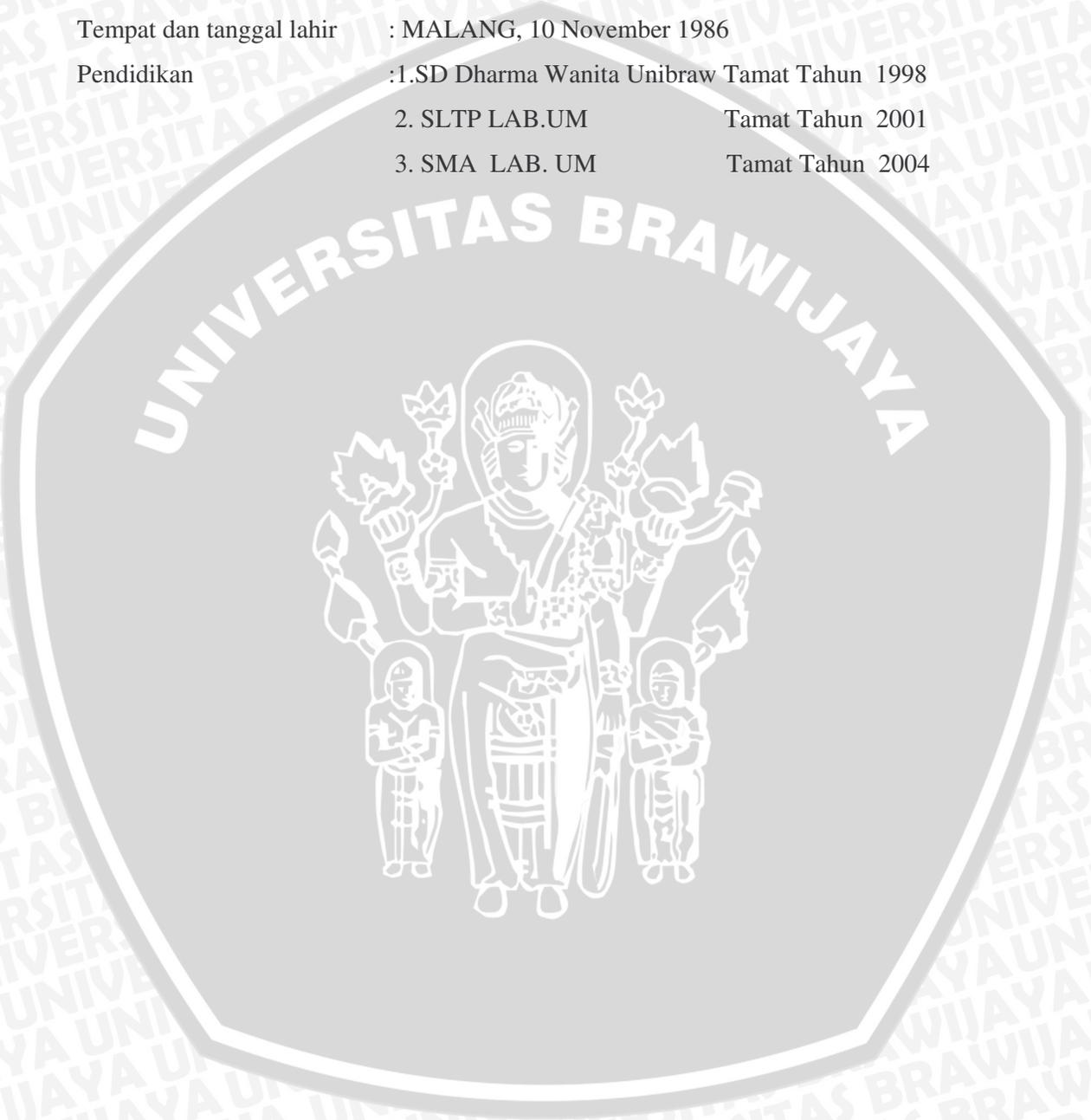




LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Nama : SENOVANI FIRMAN DETTA
NIM : 0410310114
Tempat dan tanggal lahir : MALANG, 10 November 1986
Pendidikan : 1. SD Dharma Wanita Unibraw Tamat Tahun 1998
2. SLTP LAB.UM Tamat Tahun 2001
3. SMA LAB. UM Tamat Tahun 2004



RINGKASAN

Senovani Firman Detta, 2007, **Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang Di Era Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)**, Komisi Pembimbing Utama Drs. Suwondo, M.S dan Komisi Pembimbing Kedua Drs. Trilaksono Nugroho M.S, 149 Hal + xiv

Kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri daerah otonom terletak pada kemampuan *self supportingnya* dalam bidang keuangan, termasuk didalamnya kemampuan daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai *publik service* dan perencanaan pembangunan daerah dengan menerapkan *good governance*. Kemampuan daerah dapat dilihat dari keuangan yang berada di kota Malang ini dimana pendapatan asli daerah kota Malang dapat menentukan Kemandirian yang berada pada kota Malang ini.

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah tentang Tingkat Kemandirian fiskal Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah. Dimana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Kemandirian fiskal Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah yang dapat diketahui berdasarkan jumlah pendapatan yang berada pada kota Malang ini dengan membandingkan dengan data bantuan dari pusat. Sedangkan manfaat kemandirian fiskal pemerintah kota Malang ini untuk mengetahui seberapa besar Kemampuan dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang Sehingga mengetahui derajat fiskal daerah dan sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kota Malang untuk mengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, dan Dana Perimbangan.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala dan juga untuk menjawab pertanyaan sehubungan dengan status objek penelitian saat ini. Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tempat atau lokasi penelitian bertempat pada Jl. Kertanegara 7 Malang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan. Jenis dan Sumber Data terdiri dari dua yaitu data primer berarti data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau responden dan dicatat untuk pertama kalinya. Dan data sekunder berarti data yang diambil oleh peneliti dari APBD Kota Malang tahun anggaran 2004-2006 yang mengenai mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu wawancara langsung kepada kepala bagian dinas pendapatan kota Malang, Observasi, dan Dokumentasi. Instrumen penelitian ini yaitu saya sendiri sebagai peneliti, daftar pertanyaan dan alat tulis yang dibutuhkan. Metode Analisis adalah suatu teknik pengolahan data dengan menganalisa terhadap pokok masalah yang diteliti dimana analisa tersebut memerlukan pemecahan yang tepat. Dalam metode analisi ini terdiri dari tiga hal yaitu : Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang penting,

Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk table dan teks yang bersifat naratif yang merupakan penjelasan agar mempunyai makna yang bisa dipahami oleh orang lain dan Akhir dalam proses analisis adalah membuat kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mulai dari tahun 2004-2006 selalu meningkat, tetapi disini masih terdapat dana bantuan dari pusat atau Dana Perimbangan yang masih mendominasi kota Malang ini. Pada Tahun 2006 diketahui bahwa persentase PAD terhadap TPD sebesar 11.41% sedangkan untuk persentase Dana Perimbangan terhadap TPD sebesar 88.60%, hal ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat dana bantuan dari pusat yang mendominasi kebutuhan- kebutuhan daerah kota Malang ini. Oleh karena itu walaupun terdapat otonomi daerah tetapi kota Malang ini masih mendapat bantuan dari pusat dan Kota Malang masih belum mandiri khususnya dalam segi pendapatan daerah. Disini diharapkan agar kota Malang dapat mengelolah potensi yang ada dengan baik, yang mana pendapatan daerah harus mendukung kemandirian fiskal pemerintah kota Malang dan tidak selalu menggantungkan bantuan dari pusat atau Dana Perimbangan.



SUMMARY

Senovani Firman Detta, 2007, **Fiscal Self-Sufficient of Malang Town Government in Local Autonomy Era (Study at Income Office of Malang Town)**, Supervisor: Suwondo and Co-Supervisor: Trilaksono, 149 Pages + xiv

Ability to manage local financial is determinant factor for success of local autonomy. In other word, one of characteristic of local autonomy is based on self-supporting in financial, including the local ability in running their function as public service and local development planning by application of good governance. The local ability can be seen from financial in this Malang town, which local original income of Malang town can determine self-sufficient in this Malang town.

This subject research is about Fiscal Self-Sufficient level of Malang Town Government in Local Autonomy Era. The objective of the research is to know fiscal self-sufficient of Malang Town Government in Local Autonomy Era, which can be seen based on amount of income in this Malang town by comparing with grant from central government. The useful of fiscal self-sufficient of Malang Town Government in Local Autonomy Era is to know how much Ability and Self-Sufficient Fiscal of Malang Town. Thus, the research is to know local fiscal degree and as entry and information for Malang Town Government to take policies in increasing Original Income of Malang Town and Balances Fund.

The method research used is descriptive method by qualitative analysis. This descriptive research is the research related with collecting data for giving description or assertion to the concept or symptoms and also to answer question related with research object status currently. However, qualitative approach is as procedure resulting descriptive data such as the written word or oral from respondent observed. The data was obtained by observation, interview, and theories related with the research done. Research location is at Jl. Kertanegara 7 Malang as an element of Local Government in Income division. The data resource consists of primary data and secondary data. Primary data is from respondent that was recorded directly for the first time. Secondary data was taken by the researcher from APBD of Malang Town for 2004-2006 budgeting about Local Original Income (LOI). For collecting data technique of the research uses three ways, such as direct interview with head of sub section for Income Service of Malang town, observation, and documentation. The instrument research is me as a researcher, questionnaire list, and writing equipment needed. Analysis method is data processing technique with analyzing for main subject researched, where the analysis needs proper solving. In this analysis method is consisting of three: to reducing data is summarize, to select of important things, and to present data of this research in table and text forms by narrative as explanation in order to have the meaning understandable by reader. The final analysis process is making conclusion/verification.

This result research showed that Local Original Income from 2004 – 2006 is always increasing, but here is still receiving grant from central government or Balances Fund that is still dominating this Malang Town. During 2006 was known that percentage of Local Original Income toward TPD as much 11.41%, this can be concluded that there is still grant from central government that

dominating local needs of Malang town. Therefore, although the Malang town is existing local autonomy, it is still obtaining grant from central government and Malang Town is not self-sufficient yet, especially in local income facet. Thus it would be hoped that Malang town can manage the existing potential well, which the local income must support fiscal self-sufficient of Malang town and it is not always depending on grant from central or Balances Fund.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang Di Era Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Malang).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Adminstrasi Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA.PhD selaku Ketua Jurusan Adminstrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Imam Hanafi,S.sos,Msi,MS selaku Sekretaris Jurusan Adminstrasi Publik Universitas Brawijaya
4. Bapak Drs. Suwondo,M.S Selaku Ketua komisi pembimbing yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Drs. Trilaksono Nugroho M.S Selaku Anggota komisi pembimbing yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak/ Ibu dosen yang telah memberikan segala ilmunya selama saya saya dibangku kuliah, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Karyawan-karyawati Dinas Pendapatan Kota Malang yang telah dengan rela meluangkan waktunya untuk membantu kelancaran ijin penelitian.
8. Kedua orangtuaku dan Adik- adikku yang telah mendukung dan memberikan doa serta bantuan yang tulus hingga skripsi ini selesai.
9. Seseorang yang selalu membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua teman-temanku FIA Publik 2004 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sekali lagi terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya.
11. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi fihak yang membutuhkan.

Malang, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR/ BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemerintahan Daerah	8
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	8
2. Desentralisasi	8
3. Dekonsentrasi	12
4. Tugas Pembantuan	12
B. Otonomi Daerah	13
C. Keuangan Daerah	16
1. Konsep Keuangan Daerah	16
2. Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	22
3. Potensi Daerah	24
D. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	24
1. Pendapatan Asli Daerah	25
2. Dana Perimbangan	28
E. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia	29
F. Kemandirian Fiskal Daerah	32
G. Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi dan Situs Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Instrumen Penelitian	43
G. Metode Analisis	44

BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
a. Kondisi Geografis Kota Malang	46
b. Kondisi Sosial Budaya	48
c. Potensi Daerah Kota Malang	52
2. Gambaran Umum Situs Penelitian	54
a. Gambaran Dinas Pendapatan Kota Malang	54
b. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Malang	55
c. Susunan Organisasi di Dinas Pendapatan Kota Malang	57
d. Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bagian di Dinas Pendapatan Kota Malang	57
e. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Malang ..	69
f. Sumber Daya Manusia Yang berada pada Dinas Pendapatan Kota Malang	70
B. Penyajian Data	72
1. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2004-2006	72
2. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang	74
3. Perkembangan Retribusi Daerah Kota Malang	80
4. Perkembangan Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang	89
5. Perkembangan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang syah Kota Malang	93
6. Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak Kota Malang	99
7. Perkembangan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang..	102
8. Perkembangan Dana Alokasi Umum Kota Malang.....	105
9. Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kota Malang	107
10. Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Kota Malang	110
11. Bantuan Keuangan dari Propinsi (Lain- lain pendapatan yang syah) Perkembangan Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Propinsi	114
12. Tingkat Kemandirian fiskal Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah.....	116
13. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah	120
C. Analisis dan Intrepetasi Data	123
1. Analisis Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang di Era Otonomi Daerah dilihat dari Tahun 2004- 2006	123
2. Analisis Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Malang dilihat dari Tahun 2004- 2006	129
3. Analisis Tingkat Kemandirian Pemerintah kota Malang Di Era Otonomi Daerah Tahun 2004- 2006	134
4. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan	

Dana Perimbangan dan Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ... 141

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	144
B. Saran	149

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1.	Letak Geografis Kota Malang	46
2.	Batas Wilayah Kota Malang	47
3.	Iklm Kota Malang	47
4.	Tata Guna Tanah Kota Malang	48
5.	Pembagian administratif Kota Malang	49
6.	Pencari Kerja Menurut Status di Dinas Tenaga Kerja	49
7.	Komoditi kota Malang	52
8.	Jumlah Karyawan dan Karyawati Dinas Pendapatan dan PTT	71
9.	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2004-2006	72
10.	Perkembangan Target dan Realisasi Pos Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2004	76
11.	Perkembangan Target dan Realisasi Pos Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2005	77
12.	Perkembangan Target dan Realisasi Pos Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2006	78
13.	Perkembangan Kontribusi Pos Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006	79
14.	Perkembangan Target dan Realisasi Pos Penerimaan Retribusi Daerah Kota Malang Tahun 2004	82
15.	Perkembangan Target dan Realisasi Pos Penerimaan Retribusi Daerah Kota Malang Tahun 2005	84
16.	Perkembangan Target dan Realisasi Pos Penerimaan Retribusi Daerah Kota Malang Tahun 2006	86
17.	Perkembangan Kontribusi Pos Penerimaan Retribusi Daerah Kota Malang Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006	87
18.	Perkembangan Target dan Realisasi Pos Bagian Laba BUMD Kota Malang Tahun 2004	90
19.	Perkembangan Target dan Realisasi Pos Bagian Laba BUMD Kota Malang Tahun 2005	91
20.	Perkembangan Target dan Realisasi Pos Bagian Laba BUMD Kota Malang Tahun 2006	92
21.	Perkembangan Kontribusi Pos Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006	93
22.	Perkembangan Target dan Realisasi Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah Kota Malang Tahun 2004	95
23.	Perkembangan Target dan Realisasi Pos Lain- Lain Pendapatan Asli	96

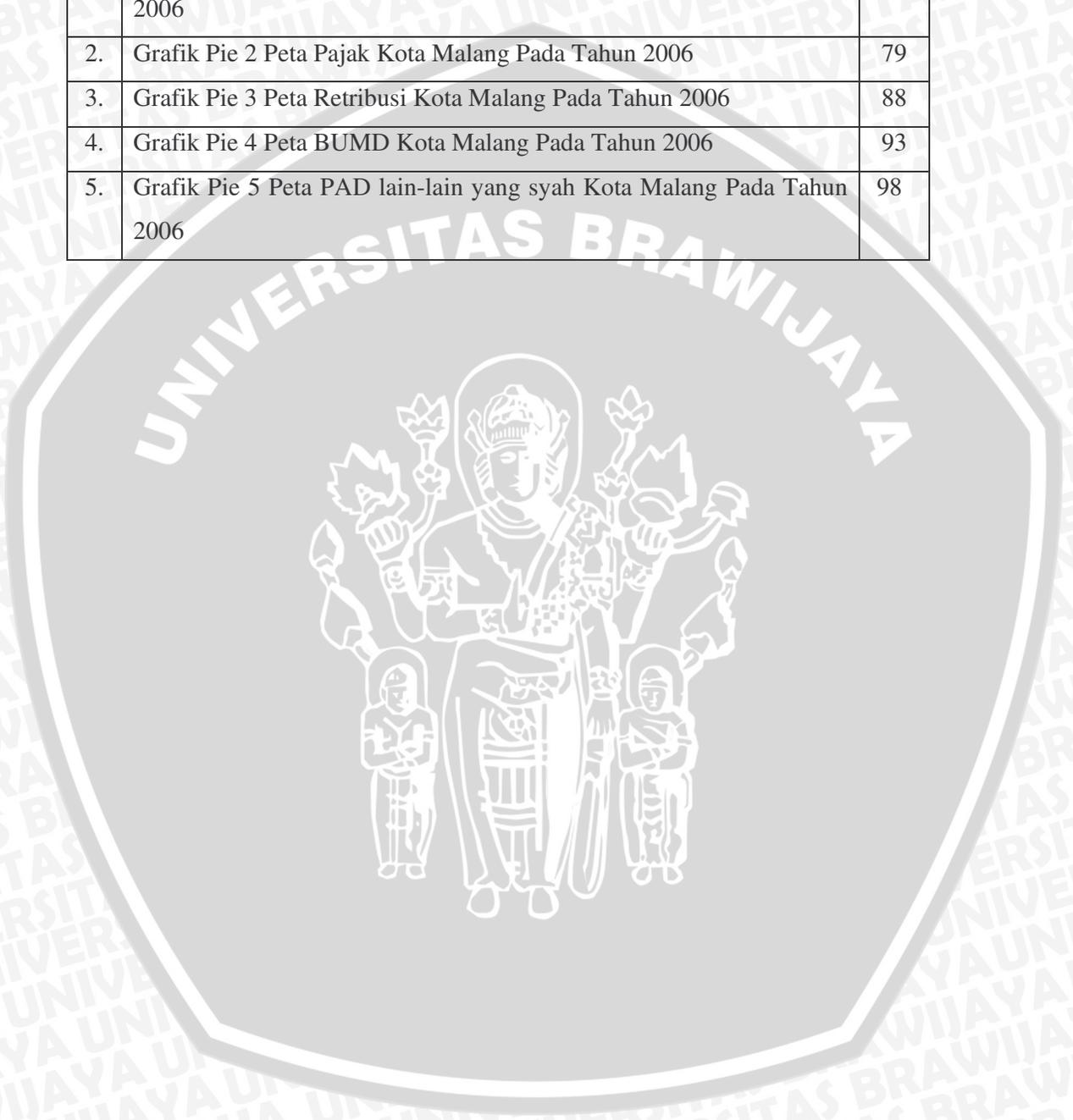
	Daerah Yang Syah Kota Malang Tahun 2005	
24.	Perkembangan Target dan Realisasi Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah Kota Malang Tahun 2006	97
25.	Perkembangan Kontribusi Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah Kota Malang Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006	98
26.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kota Malang Tahun 2004	99
27.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kota Malang Tahun 2005	100
28.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kota Malang Tahun 2006	101
29.	Perkembangan Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Kota Malang Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006	101
30.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang Tahun 2004	102
31.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang Tahun 2005	103
32.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang Tahun 2006	104
33.	Perkembangan Kontribusi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006	105
34.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Malang Tahun 2004	105
35.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Malang Tahun 2005	106
36.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Malang Tahun 2006	106
37.	Perkembangan Kontribusi Dana Alokasi Umum Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006	107
38.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Malang Tahun 2004	107
39.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Malang Tahun 2005	108
40.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Malang Tahun 2006	109
41.	Perkembangan Kontribusi Dana Alokasi Khusus Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006	110
42.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Kota Malang Tahun 2004	111
43.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Kota Malang Tahun 2005	112
44.	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Kota Malang Tahun 2006	113

	Kota Malang Tahun 2006	
45.	Perkembangan Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006	114
46.	Perkembangan Target dan Realisasi Lain- lain pendapatan yang syah (Bantuan Keuangan dari Propinsi) Kota Malang Tahun 2004	115
47.	Perkembangan Target dan Realisasi Lain- lain pendapatan yang syah (Bantuan Keuangan dari Propinsi) Kota Malang Tahun 2005	115
48.	Perkembangan Kontribusi Lain- lain pendapatan yang syah (Bantuan Keuangan dari Propinsi) Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006	116
49.	Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006	117
50.	Perkembangan Kontribusi Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Total pendapatan Daerah Tahun 2004-2006	118
51.	Perkembangan Kontribusi Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Total Dana Perimbangan Tahun 2004-2006	119
52.	Perkembangan Kontribusi Realisasi Total Dana Perimbangan terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun 2004-2006	120



DAFTAR GRAFIK

No	Judul	Hal.
1.	Grafik Pie 1 Peta Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Pada Tahun 2006	74
2.	Grafik Pie 2 Peta Pajak Kota Malang Pada Tahun 2006	79
3.	Grafik Pie 3 Peta Retribusi Kota Malang Pada Tahun 2006	88
4.	Grafik Pie 4 Peta BUMD Kota Malang Pada Tahun 2006	93
5.	Grafik Pie 5 Peta PAD lain-lain yang syah Kota Malang Pada Tahun 2006	98



DAFTAR GAMBAR/ BAGAN

No	Judul	Hal.
1.	Hubungan Pusat dan Daerah	31
2.	Proses Analisis Data Model Interaktif	45



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1.	Peta Kota Malang
2.	Stuktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Malang
4.	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2004
5.	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2005
6.	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006
7.	Daftar Pedoman wawancara
8.	Rekomendasi Penelitian
9.	Surat Keterangan Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur secara merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, dengan harapan agar tujuan pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara utuh, menyeluruh dan berkesinambungan di segala bidang, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan yang menganut azas desentralisasi dan dekonsentrasi Undang- Undang No. 32 tahun 2004. Azas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri hal ini menurut UU No. 32 tahun 2004. Urusan yang telah diserahkan pada daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa diserahkan sepenuhnya pada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan dalam segi pembiayaan. Azas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah hal ini menurut UU No. 32 tahun 2004. Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah menurut azas desentralisasi, sehingga oleh perangkat pemerintah di daerah berdasar azas dekonsentrasi. Urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat di daerah tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Adapun arah dari pembangunan daerah ini adalah untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Kewajiban dalam mewujudkan ini tidak hanya merupakan tanggungjawab dari pemerintah tetapi peran serta dan dukungan masyarakat sangat menentukan dalam hal ini.

Pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan sebagian besar daerah kota Malang tidak mempunyai sumberdaya alam yang bisa mendukung pelaksanaan pembiayaan pembangunan tersebut. Untuk daerah yang memiliki potensi daerah sangat minim, maka upaya peningkatan pembangunan daerahnya harus senantiasa dilakukan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat serta pendayagunaan potensi yang ada secara optimal dan terpadu yang didasarkan pada daerah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, tetapi tetap mengacu pada arah pembangunan nasional serta dengan mempertimbangkan bagaimana kemampuan pembangunan daerahnya.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Desentralisasi fiskal disini berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan daerah khususnya tentang Pendapatan Asli Daerah diwujudkan dalam bentuk transfer dana pusat ke daerah yang berupa perimbangan dana pusat kepada daerah dalam kerangka pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah yang sudah diserahkan kepada daerah, pada hakekatnya memberikan hak pada daerah untuk melakukan otonomi daerah dari aspek perluasan fiskal dengan adanya Perimbangan sumber pendapatan daerah, Berupa Pendapatan Asli Daerah Yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain- lain PAD yang sah yang terdiri dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan lain- lain pendapatan daerah yang syah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilalokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dengan demikian pada dasarnya Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang Luas, Nyata dan

Bertanggungjawab kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Prinsip otonomi “Luas” memiliki makna bahwa daerah memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang mencakup semua bidang pemerintah daerah, di mana daerah diberikan kewenangan yang utuh dan bulat dalam menyelenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. ”Nyata” merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah. Sedangkan prinsip ”Bertanggungjawab” merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah.

Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas serta urusan rumah tangganya sendiri, maka daerah harus mempunyai keuangan yang kuat pula, semakin besar keuangan daerah semakin besar pula kemampuan daerah dalam menyelenggarakan usaha-usaha demi pembangunan daerah dalam peningkatan kesejahteraan wilayah dan penduduknya. Sumber-sumber keuangan tersebut tergantung dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keadaan keuangan daerah akan menentukan corak, bentuk serta kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan di semua sektor, maka masalah utama yang dihadapi adalah masalah keterbatasan dana di daerah. Berkaitan dengan dana, keuangan yang ada di daerah harus diusahakan dan dikelola oleh daerah adalah upaya pembinaan rumah tangga daerah. Menurut (Riwukaho, 1995, h.44) tentang pokok-pokok pemerintah daerah ditegaskan bahwa :

“Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepada pemerintah daerah perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangannya sendiri berdasarkan perundang-undangan.”

Suatu daerah apabila telah melaksanakan azas desentralisasi dengan prinsip ekonomi yang nyata dan bertanggungjawab, maka dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, daerah tersebut tidak terlalu menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat. Sejalan dengan itu perlu terus ditingkatkan

kemampuan daerah untuk membangun antara lain dengan menghimpun dana secara wajar dan tertib termasuk penggalan sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Daerah harus mempunyai inisiatif dan kemampuan dalam berusaha menggali sumber-sumber keuangan untuk keperluan pembiayaan kebutuhan rutin maupun pembangunan. Bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, kepala daerah diberi kebebasan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang mendukung kegiatan pemerintah di daerah masing-masing. Untuk itu daerah dituntut agar bersikap proaktif dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali potensi yang ada di daerah, baik yang berasal dari potensi alam maupun yang lainnya agar otonomi daerah ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan.

Menurut (Kuncoro, 2004, h. 45) yang mengamati masalah rendahnya Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan di Indonesia adalah rendahnya pendapatan asli daerah terhadap Total Penerimaan Daerah selama tahun 1997 sampai tahun 2000, sehingga menimbulkan ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini diperkuat dengan fakta hanya 3.88% penerimaan daerah di Indonesia berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, sehingga ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pusat sangat tinggi.

Hal ini serupa dengan kondisi Kota Malang yaitu tingkat subsidi pemerintah pusat masih tinggi dibandingkan dengan kontribusi pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2006 untuk dana perimbangan rata-rata mencapai 88.60% dan Pendapatan Asli Daerah 11.41% pendapatan daerah meningkat tapi subsidi pemerintah lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan ketergantungan total Pendapatan Asli Daerah terhadap subsidi pemerintah.

Oleh karena itu maka pemerintah daerah untuk tidak menggantungkan diri pada penerimaan dari pemerintah pusat yang biasanya dapat berbentuk bagi hasil pungutan pusat daerah, atau berupa bantuan atau ganjaran, subsidi langsung kepada daerah untuk keperluan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta untuk bisa menggali sumber-sumber dana yang ada di daerahnya secara

efektif dan efisien untuk meningkatkan pendapatan daerah, agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung dan berjalan dengan lancar.

Sehingga dari paparan diatas dapat dipahami bahwa kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri daerah otonom terletak pada kemampuan *self supportingnya* dalam bidang keuangan, termasuk didalamnya kemampuan daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai *publik service* dan perencanaan pembangunan daerah dengan menerapkan *good governance*.

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai Kemampuan Keuangan dan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Malang dalam melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dimana disini diperlukan upaya dari pemerintah kota Malang dalam mengelola sumber-sumber daya yang ada akan dapat bermanfaat dan dapat menambah pendapatan asli daerah Kota Malang. Sehingga dalam penelitian ini akan mengambil judul **”Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang Di Era Otonomi Daerah” (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas mengenai:

1. Bagaimana Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah dilihat dari tahun 2004-2006 ?
2. Bagaimana Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Malang dilihat dari tahun 2004-2006 ?
3. Bagaimana Tingkat Kemandirian fiskal Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah ?
4. Faktor pendukung dan Penghambat apa yang dihadapi dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah dilihat dari tahun 2004-2006
2. Untuk mengetahui Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Malang dilihat dari tahun 2004-2006.
3. Untuk mengetahui Tingkat Kemandirian fiskal Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah
4. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang

D. Kontribusi Penelitian

Dari Kontribusi Penelitian ini diharapkan dapat :

1. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat menambah referensi, pengetahuan dan wawasan mengenai otonomi daerah khususnya tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Tingkat Kemandirian Fiskal Kota Malang.
2. Bagi pemerintah Kota Malang dapat mengetahui seberapa besar Kemampuan dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang Sehingga mengetahui derajat fiskal daerah dan sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kota Malang untuk mengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, dan Dana Perimbangan.
3. Disamping itu juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang keseluruhannya merupakan rangkaian kesatuan yang berurutan yang merupakan satu kebulatan yang terperinci dalam :

Bab I, Merupakan pendahuluan yang terdiri atas sub Bab Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kontribusi Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II, Membahas mengenai Tinjauan Pustaka mengemukakan teori- teori yang berkaitan dengan masalah atau permasalahan yaitu mengenai Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan , Pengelolaan keuangan daerah: konsep keuangan daerah, Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Potensi Daerah, sumber- sumber pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, Hubungan Keuangan Pusat dan daerah di Indonesia, Kemampuan keuangan daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Bab III, Membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, Fokus penelitian, Lokasi dan situs penelitian, Jenis sumber data, Teknik Pengumpulan data, Instrumen penelitian dan Analisis data.

Bab IV, Membahas mengenai Gambaran umum kota Malang, Gambaran umum Dinas Pendapatan kota Malang, dan data-data penerimaan PAD dan Dana perimbangan yang ada di kota Malang ini yang tercantum pada fokus penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis dan ditinterpretasi data.

Bab V, Membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan serta saran- saran yang diajukan guna perbaikan dimasa mendatang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah sendiri berarti penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaiman dimaksud dalam UUD 1945.

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah itu sendiri berarti Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (Undang-undang RI yang sudah diamandemen) menerangkan bahwa Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang dimana harus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Sehingga disini dapat diketahui bahwa pengertian pemerintahan daerah dapat diartikan dalam UU No. 32 tahun 2004 dan UUD 1945, yang keduanya hampir sama pengertiannya. Dimana dengan adanya Otonomi dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang ada pada daerahnya.

2. Desentralisasi

Desentralisasi dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi berarti penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kepustakaan Amerika Serikat, (HaroldF. Alderfer, 1964,h.176 dalam Muluk, 2005,h.5) mengungkapkan bahwa terdapat dua prinsip umum

dalam membedakan bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan kekuasaannya dibawah yaitu :

- a. Dalam bentuk deconcentration yang semata-mata menyusun unit administrasi atau field stations, baik itu tunggal ataupun ada dalam hirarki, baik itu terpisah maupun tergabung dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kejakan atau bagaimana mengerjakannya. Tidak ada kebijakan ditingkat lokal serta tidak ada keputusan fundamental yang diambil. Badan-badan pusat memiliki semua kekuasaan dalam dirinya, sementara pejabat lokal merupakan bawahan sepenuhnya dan mereka hanya menjalankan perintah.
- b. Dalam bentuk decentralization unit-unit lokal ditetapkan dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu. Mereka dapat menjalankan penilaian, inisiatif, dan pemerintahannya sendiri.

Dimana dalam desentralisasi disini menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkan oleh pemerintah. Desentralisasi disini dibagi menjadi lima yaitu :

- a. Desentralisasi politik berarti kewenangan politik
- b. Desentralisasi Delegasi berarti desentralisasi fungsional
- c. Desentralisasi Dekonsentrasi berarti desentralisasi administrasi
- d. Desentralisasi Privatisasi berarti desentralisasi pasar
- e. Desentralisasi Deregulasi berarti desentralisasi hukum

Sehingga dalam hal ini desentralisasi diberikan kepada daerah otonom dimana daerah otonom yaitu Profinsi, Kota, Kabupaten yang mana dalam setiap daerah otonom bertujuan untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri khususnya dalam menghasilkan pendapatan daerah terutama dengan jalan menggali potensi- potensi yang ada dalam wilayahnya yang membutuhkan suatu sumber daya manusia yang profesional. Dalam hal ini Desentralisasi dibagi menjadi dua yaitu pembentukan daerah otonom dan pelimpahan daerah otonom. Desentralisasi disini digunakan untuk menentukan suatu negara berdasar atas jenis yang tampaknya didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni atas aktivitas fungsional dari kewenangan yang di transfer, jenis kewenangan atau kekuasaan yang di transfer pada setiap aktivitas fungsional atau area kewenangan yang di transfer, kewenangan atas individu, organisasi atau badan yang di transfer pada setiap tingkatan, dan kewenangan yang di transfer dengan cara legal ataukah administratif.

Otonomi daerah tidak akan pernah ada dalam konteks organisasi negara bila teori desentralisasi tidak dijadikan dasar pemikiran. Dengan Desentralisasi, maka dimungkinkan adanya otonomi daerah. Desentralisasi merupakan sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber daya (dana, personil) adalah desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat, karena merekalah yang akan merasakan langsung pengaruh program pelayanan yang dirancang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah.

Konsep Desentralisasi didefinisikan dalam berbagai pengertian, Menurut Liang Gie seperti yang dikutip oleh (Kaho, 1995,h.12), menyatakan :

Bahwa Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari skelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah. Satuan organisasi pemerintahan tersebut berikut lingkungan wilayahnya disebut daerah otonom, sedangkan wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan daerah yang diterima oleh satuan organisasi pemerintahn itu dinamakan otonomi.

Selama beberapa dekade terakhir terjadi pergerakan global menuju desentralisasi pembangunan sebagai alat untuk mempromosikan prinsip-prinsip kunci seperti otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, efisiensi dan efektifitas ekonomi. Di Indonesia, usaha usaha untuk mempromosikan desentralisasi mendapat titik terang dikeluarkannya :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan desentralisasi yang dikemukakan oleh (Kansil, 2001, h.37) secara umum dikatakan sebagai berikut :

- a. Mengurangi beban Pemerintah Pusat, dan juga campur tangan dalam masalah-masalah kecil pada tingkat lokal. Demikian pula memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat lokal.
- b. Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan dari kontribusi kegiatan mereka itu.
- c. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis.

- d. Melatih rakyat untuk bisa mengatur dirinya sendiri.
- e. Pembinaan kesatuan nasional.

Senada dengan tujuan desentralisasi (The Liang Gie dalam Kaho, 1995,

h.7) memberikan ulasan mengapa menganut desentralisasi, antara lain:

- a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukkan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani,
- b. Dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak pendemokrasian,
- c. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan Pemerintahan Daerah atau Desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih tepat untuk diurus pemerintah daerah, pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangani pusat diurus oleh Pemerintah Pusat,
- d. Dari segi kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya dapat ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak, kebudayaan atau latar belakang sejarahnya,
- e. Dari sudut kepentingan pemabangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan oleh Pemerintah Daerah supaya dapat lebih banyak dan secara langsung menangani pelaksanaan pembangunan tersebut.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen utama dalam implementasi otonomi daerah, sejumlah kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya pengeluaran-pengeluaran daerah dalam membiayai fungsi dan urusan yang dijalankan oleh daerah. Pemerintah pusat dan daerah semaksimal mungkin mengupayakan tercapainya keseimbangan penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*). Desentralisasi fiskal bertujuan mengatasi kesenjangan fiskal horizontal dan vertikal (*Horizontal and vertical imbalance*).

Desentralisasi fiskal di Indonesia diterapkan melalui undang-undang perimbangan hubungan pusat dan daerah. Desain perimbangan keuangan pusat dan daerah masih menitik beratkan sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah pada sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk perimbangan, yang terdiri dari bagian daerah dari PBB, BPHTB, SDA; Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Implikasi dari pengaturan ini adalah pendaerahan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan jasa pelayanan publik yang sebelumnya diatur oleh pusat. Selain dana perimbangan, sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

3. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berarti pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Dekonsentrasi disini lebih merujuk pada kewenangan administratif yang diberikan pada perwakilan badan- badan pemerintah pusat. Dekonsentrasi menunjuk pada kewenangan administratif yang diberikan pada perwakilan badan- badan pemerintah pusat. Selain itu dekonsentrasi juga memiliki makna sebagai penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah.

Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah (Kansil, 2001, h.4).

Disini tanggung jawab yang tetap ada pada Pemerintah Pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala daerah dalam kedudukannya selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Latar belakang diadakannya sistem dekosentrasi ialah bahwa tidak semua urusan Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut asas Desentralisasi.

4. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berarti Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Asas tugas perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan berkewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas (Kansil, 2001, h.4).

Misalnya disini Kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Sehingga jelas bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah otonom dan wilayah administratif.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Daerah dibentuk berdasarkan asas Desentralisasi (Kansil, 2001, h.4).

Wilayah administrasi adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Menurut (Kansil, 2001, h.5) Wilayah dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi, yang memiliki syarat-syaratnya dibentuknya daerah antara lain :

- a) Mampu membiayai kehidupannya (kemampuan ekonomi)
- b) Jumlah penduduk yang ditentukan
- c) Luas Daerah
- d) Memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional
- e) Pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa
- f) Dapat melaksanakan pembangunan untuk daerahnya

B. OTONOMI DAERAH

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Otonomi daerah disini berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Otonomi Daerah :

- a) Mefektifitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- b) Menjamin tercapainya keseimbangan keuangan dari tanggung jawab antara pusat dan daerah.
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- d) Mempererat hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Prinsip- Prinsip Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Prinsip- Prinsip Pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus disesuaikan dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karena dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula kawasan- kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain seperti badan otonta, kawasan pelabuhan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan perkotaan, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah.

- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislative, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Pelaksanaan asas desentralisasi diletakkan pada daerah daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintahan.
- h. Pelaksanaan asas tugas perbantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintahan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Menurut (Kuncoro, 2003,h.520) Prinsip Otonomi Daerah yang dianut adalah :

1. Otonomi yang nyata, artinya otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah.
2. Otonomi yang bertanggung jawab, artinya pemberian otonomi dijadikan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan seluruh pelosok tanah air.
3. Dinamis yaitu pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih maju dan baik.

Suatu daerah disebut otonomi apabila memiliki ciri- ciri yang menurut (Kaho, 1995, h.80) sebagai berikut :

- a) Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah.
- b) Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijakan daerah itu sendiri.
- c) Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga tersebut harus maka daerah memerlukan aparatur sendiri.
- d) Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri.

Tujuan diberikannya otonomi daerah, menurut (Mardiasmo, 2002,h.59) adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Sedangkan (Kuncoro, 2003,h.25) mengemukakan salah satu alasan dikemukakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintahan lebih dekat dengan rakyat, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka dibanding pemerintah pusat.

C. Keuangan Daerah

1. Konsep Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut kajian ini adalah alat fiskal pemerintah pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan dalam mengalokasikan sumber- sumber ekonomi, meratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas politik. Peranan keuangan daerah makin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan, tetapi juga karena makin komplis persoalan yang dihadapi daerah. Selain itu peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendukung Otonomi Daerah.

Keuangan daerah adalah kekayaan negara atau daerah yang meliputi semua hak dari negara atau daerah yang merupakan harga uang serta dari barang-barang yang dimiliki oleh negara atau daerah karena hak-hak itu.

Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya daerah membutuhkan dana. Tanpa dana yang cukup maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Untuk itu daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup.

Mengenai pentingnya pengelolaan keuangan daerah, (Halim, 2002,h. 58) mengatakan :

- a) Bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar pada kemudian hari penduduk sederaah, sehingga kebijaksanaan yang ditempuh pada melakukan kegiatan itu dapat

menyebabkan kemakmuran atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu.

- b) Bahwa kepandaian mengendalikan daerah tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan abadi, tanpa cara pengendalian yang baik terlebih lagi tanpa kemampuan kemuka dengan penuh kebijaksanaan yang harus diarahkan pada melindungi dan memperbesar harta daerah, dengan mana semua kepentingan masyarakat sedarah sangat erat hubungannya.
- c) Bahwa anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang dihadapkan pada DPRD haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian kemuka yang bijaksana.

Sehingga disini perlunya keuangan daerah merupakan hal yang memiliki arti penting yang dimaksud bagi daerah dinyatakan oleh (M. Manullang dalam Josep Riwo Kaho,1995, h.61):

” bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting, makin baik keuangan suatu negara maka makin stabil pula kedudukan tata negara itu. Sebaliknya kalau negara itu kacau maka pemerintahan akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan, demikian juga bagi suatu pemerintahan daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengurus dan mengatur rumah tangga daerah”.

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah melaksanakan Otonomi Daerah. Sehingga disini telah diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi Kemampuan daerah dalam melakukan tingkat kemandirian fiskal pemerintah Kota Malang yang salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak, Retribusi, Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan lain-lain yang syah. Dengan demikian upaya dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan adanya Desentralisasi pada daerah.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan Desentralisasi adalah adanya penyerahan sumberdana, sumberdaya manusia dan perangkat fisiknya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan urusan yang diserahkan kepada daerah. Masalah desentralisasi bukan hanya jumlah dana yang memadai,

akan tetapi seberapa jauh kewenangan Daerah dapat menentukan penggunaan sumber dana dan menggali sumber dana di daerah (Subrata, 1999, h.46)

Desentralisasi dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi dan budaya seperti yang diungkapkan oleh Rondinelli, Nelis dan Cheema (dalam Subrata, 1999, h. 48) sebagai berikut :

- a. Sampai seberapa jauh birokrasi politik lokal mendukung Desentralisasi melalui pelimpahan organisasi dan tanggungjawabnya.
- b. Seberapa jauh perilaku, sikap dan budaya yang mendukung terciptanya iklim Desentralisasi pengambilan keputusan dan Pemerintah.
- c. Kebijakan dan program yang dirancang yang memadai untuk mendorong Desentralisasi pengambilan keputusan dan manajemen pembangunan.
- d. Sampai seberapa jauh tersedianya sumber dana atau keuangan yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggungjawab.

Faktor yang terakhir ini merupakan isu kebijakan keuangan daerah yang menarik dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan behasil guna.

Dengan adanya isu kebijakan keuangan daerah dimaksud, maka tuntutan dari daerah-daerah dan didukung oleh kemauan baik (good will) pemerintah pusat untuk segera menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, maka faktor keuangan daerah sebagai salah satu motor penggerak bagi kegiatan pemerintah dan gerak pembangunan daerah menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan ditata kembali.

Pengertian keuangan daerah menurut (Halim, 2002, h 59) adalah “kekayaan negara atau daerah yang meliputi semua hak dari negara atau daerah yang mempunyai harga uang serta barang-barang yang dimiliki negara atau daerah karena hak-hak itu”. Pengertian di atas cukup memberi gambaran kepada kita tentang keuangan daerah, hanya saja bila dicermati lebih jauh keuangan daerah tidak cukup hanya dengan tersediaya kekayaan, namun perlu adanya kewenangan dan kemampuan untuk mengelolanya. Karena pada kenyataannya dengan tersedianya kekayaan (sumber dana) yang memadai tidak menjamin dapat menjadi penunjang bagi pembangunan daerah, jika pelaksanaan otonomi daerah

tidak diikuti dengan kewenangan dan kemampuan untuk mengelola secara maksimal.

Untuk itu (Subrata, 1999,h.34) memberikan pengertian keuangan daerah sebagai “Kemampuan Pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan dalam rangka melaksanakan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembangunan di Daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBD.”

Dari pengertian keuangan daerah tersebut dapat dikemukakan bahwa keuangan daerah mengandung arti setiap hak yang dimiliki oleh Pemerintah daerah yang berhubungan dengan uang atau barang-barang yang dimiliki seperti seberapa besar pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Dengan tersedianya sumber dana keuangan yang cukup dan didukung oleh pengelolaan yang profesional akan melahirkan sistem administrasi keuangan yang baik yang pada akhirnya dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah

Sehubungan dengan pentingnya posisi daerah (Josef Riwo Kaho 1995,h.125) menegaskan :
” Pemerintah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Konsep Keuangan Daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi UU No.32 Tentang Pemerintah Daerah.Pada era UU No. 22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi UU No.32 Tahun 2004tentang Pemerintah Daerah, terdapat aturan dan ketentuan-ketentuan manajemen keuangan daerah yang telah ada antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
- b. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- c. Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan
- e. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah

- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD
- h. Keputusan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dibuat oleh masing-masing daerah sesuai dengan kondisi daerah)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas secara umum APBD dapat dilihat dari 4 sisi yaitu siklus, mekanisme, fungsi dan struktur. APBD dilihat dari siklus, mekanisme, fungsi dan struktur setelah otonomi daerah banyak mengalami perubahan. Namun sesuai dengan kondisi sekarang masih ada beberapa hal yang masih sama dengan ketentuan lama (UU No.5 tahun 1974). Perubahan yang telah didukung dengan ketentuan perundang-undangan adalah menyangkut dengan :

1. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Secara garis besar siklus APBD tidak mengalami perubahan, namun dilihat dari masing-masing siklus tersebut mengalami perubahan yang sangat banyak, yaitu pada proses penyusunan, perubahan, pelaksanaan dan perhitungan APBD :

1. Pengesahan oleh pejabat yang berwenang tidak diperlukan lagi
2. Elemen-elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan :
 - ❖ Akuntabilitas
 - ❖ Value for Money
 - ❖ Kejujuran dalam mengelola keuangan publik
 - ❖ Transparansi
 - ❖ Pengendalian
3. APBD disusun dengan pendekatan kinerja dan berorientasi pada kepentingan publik, tidak lagi dengan pendekatan incremental dan line item. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.
4. Unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan anggaran daerah adalah masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah.
5. Penata usahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standart akuntansi keuangan pemerintah daerah.

6. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terdiri dari :
 - ❖ Laporan perhitungan APBD
 - ❖ Nota perhitungan APBD
 - ❖ Laporan aliran kas
 - ❖ Neraca daerah
7. Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD
8. Prinsip anggaran yang harus dilakukan adalah :
 - ❖ Transparansi dan akuntabilitas
 - ❖ Disiplin Anggaran
 - ❖ Keadilan anggaran
 - ❖ Format anggaran

2. Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dilihat dari mekanisme anggaran pengelolaan keuangan daerah tidak mengalami perubahan yang berarti, dimana setiap pendapatan juga harus dikelola melalui pemegang kas daerah dan dari sisi pengeluaran masih tetap menggunakan SPP, SKO dan SPMU.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilihat dari Fungsi

Dari kekuatan yang sudah ada/dikeluarkan, dari sisi fungsi pengelolaan keuangan daerah juga tidak mengalami perubahan, di mana kewenangan otorisasi, ordinasi dan kebendaharawan masih tetap berada pada kepala daerah tentunya akan dilimpahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilihat dari Struktur

Dilihat dari struktur, maka sesuai dengan ketentuan UU No.32 2004 dan aturan pelaksanaannya, struktur APBD dibagi menjadi Pendapatan, kelompok pendapatan dibagi menjadi jenis, dan jenis dibagi menjadi ayat. Pengeluaran dibagi menjadi pengeluaran belanja, pengeluaran transfer dan pengeluaran tak terduga. Pengeluaran belanja dibagi belanja rutin dan belanja investasi. Belanja rutin dibagi menjadi administrasi umum, operasi dan pemeliharaan, sedangkan belanja investasi dibagi menjadi investasi publik dan investasi aparatur. Belanja transfer terdiri dari anggaran pinjaman dan bunga, bantuan dan dana cadangan. Sumber pendapatan daerah menurut UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004 beserta aturan pelaksanaannya.

2. Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Timbulnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalannya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat (Kuncoro, 2003, h. 64).

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah, di mana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing (Sidik, 2000,h. 56). Hal ini berarti subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Menurut (Kuncoro, 2004, h. 16) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki wewenang dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah tampaknya PAD masih belum diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Ada 4 hal yang mempengaruhi yaitu :

- a. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah
- b. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
- c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah
- d. Kemampuan administrasi perencanaan dan pengawasan masih rendah

Oleh karena itu daerah otonom cenderung lebih mengandalkan kepada sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan pinjaman daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah

daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat semakin baik (PP No. 104 tahun 2000). Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari :

- a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam seperti kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas bumi.
- b. Dana Alokasi Umum, dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.
- c. Dana Alokasi Khusus, dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah.

Dana perimbangan tersebut merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan serta dengan lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Namun demikian berbeda dengan DAU, bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan sumber daya alam merupakan alokasi yang pada dasarnya menjadi salah satu sumber yang mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah. Dengan kata lain daerah yang memiliki potensi PBB, BPHTB dan SDA yang besar maka akan memperoleh penerimaan yang besar, daerah yang potensinya kecil tentunya akan mendapatkan pendapatan yang kecil juga. Karenanya DAU diformulasikan sedemikian rupa sehingga mampu mengatasi kesenjangan yang mencolok antar daerah yang berbeda potensinya.

Berdasarkan ketentuan UU no. 33 tahun 2004 alokasi DAU ditentukan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN, yang selanjutnya dibagikan untuk daerah Kabupaten/Kota sebesar 22,5% dan untuk daerah propinsi sebesar 2,5%. Selanjutnya perhitungan besarnya DAU yang diterima daerah masih menurut UU tersebut didasarkan atas perhitungan sisi kebutuhan fiskal yang paling sedikit dapat dicerminkan oleh variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan

geografis dan tingkat pendapatan masyarakat (kelompok masyarakat miskin) dengan sisi kemampuan fiskal (fiscal capacity) dengan melihat pada potensi ekonomi daerah, antara lain dapat tercermin pada variabel potensi industri, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan PDRB.

3. Potensi Daerah

Potensi daerah terdiri atas potensi sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia, potensi sumberdaya buatan dan potensi sumberdaya kelembagaan.

a. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumberdaya alam adalah kekayaan alam yang memiliki atau ditemukan di daerah yang pengelolaannya dikuasai oleh daerah potensi sumberdaya alam terdiri atas sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, sumberdayaalam yang dapat diperbaharui dan sumberdaya alam pulih.

b. Potensi Sumber Daya manusia

Potensi sumberdaya manusia dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Kualitas sumberdaya manusia tercermin dari jumlah penduduk secara kuantitas cukup besar, namun dilihat dari kualitasnya relatif masih rendah. Kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah ini diukur dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatannya serta daya beli masyarakat.

c. Potensi Sumber Daya Buatan

Potensi sumberdaya buatan adalah seluruh hasil karya manusia dalam wujud fisik, seperti prasarana dan sarana produksi, perhubungan (transportasi dan komunikasi) bangunan atau gedung dan lain-lain.

d. Potensi sumberdaya kelembagaan

Yang dimaksud sumberdaya kelembagaan adalah hasil karya manusia non fisik berupa organisasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam berperilaku.

D. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang sudah dimulai sejak tahun 2001 membawa reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapi

dengan hati-hati dan rasa khawatir (Mardiasmo, 2002,h.139). Hal tersebut membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari system pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah (Mardiasmo, 2002,h. 145).

Kebijakan otonomi daerah yang dipilih pasca reformasi dalam menata hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, membawa implikasi terhadap kemampuan daerah untuk dapat membiayai daerahnya dalam upaya memberikan pelayanan publik, dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya pergeseran Kebijakan tersebut akan berdampak pada penatan ulang dan pembagian sumber-sumber keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk pembiayaan kebutuhan Pemerintah Daerah, akibat adanya pelimpahan kewenangan, penyerahan urusan atau pekerjaan, oprerasionalisasi pembentukan kelembagaan daerah dan personalia yang sebelumnya dikelola Pemerintah Pusat.

Upaya dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna menyelenggarakan pemerintah dan usaha pembangunan di semua sektor maka masalah utama yang dihadapi adalah adalah keterbatasan dana daerah. Berkaitan dengan masalah tersebut , dana keuangan yang diusahakan dan dikelola oleh daerah dalam upaya pembiayaan rumah tangga daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber keuangan Pemerintah Daerah didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1974, Setelah adanya otonomi keuangan daerah diatur dalam Perundang-undangan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sesuai dengan UU No. 17 Tentang Keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004 sumber keuangan yang diberikan kepada daerah meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yrag syah

A). Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tiga kategori yang masuk dalam pendapatan ini menurut (Muluk, 2003,h.57) adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah oleh banyak pihak dipandang sebagai jenis penghasilan utama yang diperoleh daerah. Umumnya Pemerintah Pusat menentukan pajak mana yang dipungut oleh daerah. Pada banyak negara, legislasi juga menentukan batasan bagi pungutan tersebut serta memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Pusat untuk memeriksa dan mengesahkannya.
2. PAD berupa pungutan biaya (*fee*), denda (*finer*), dan lisensi (*license*). Sumber pendapatan ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk membayar pelayanan tertentu yang dinikmatinya. Pemerintah Daerah memungut biaya atas beragam pelayanan dan lisensi yang disediakan, contoh hak menjual minuman, makanan, hiburan, untuk menjalankan sepeda, kendaraan bermotor, untuk menggunakan fasilitas atau taman kota, memancing, menjajakan dan lain sebagainya.
3. PAD berupa penghasilan dari utilitas dan perusahaan daerah (*earning from utilities and public enterprise*). Perusahaan daerah memperoleh penghasilan melalui pembebanan biaya (*user charge*) atas pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan pengertian dan pasal 6 UU No. 32 tahun 2004, PAD bersumber dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah, meliputi :
 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 2. Jasa Giro
 3. Pendapatan bunga
 4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis yaitu:

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Bagian Laba Usaha Daerah
- d) Lain-lain (PAD)

1. **Pajak Daerah** merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak.

Penerimaan ini meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Kendaraan di Atas Air
- e. Pajak Air di Bawah Tanah
- f. Pajak Air Permukaan

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota menurut UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah tersusun dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

2. **Retribusi daerah** merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Penerimaan ini meliputi:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- c. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
- d. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- e. Retribusi izin trayek kendaraan penumpang
- f. Retribusi air
- g. Retribusi jembatan timbang
- h. Retribusi kelebihan muatan
- i. Retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian

3. **Bagian Laba Usaha Daerah** merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil Perusahaan milik daerah dari hasil daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari BPD, Perusahaan Daerah, Dividen BPR-BPK, dan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.

4. **Lain-lain PAD** merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari:

- (a) Hasil penjualan barang milik daerah, contohnya penjualan drum bekas aspal, penjualan pohon ayoman.
- (b) Penerimaan jasa giro.

B). Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai daerah. Dana Perimbangan dipisahkan menjadi lima jenis, yaitu:

- a) Dalam pasal 1 UU No. 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bagi Hasil Pajak, yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan pasal 21.
- b) Bagi Hasil Bukan Pajak, terdiri atas Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, dan penerimaan dari uang eksplorasi. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berasal dari :
 1. Kehutanan
 2. Pertambangan Umum
 3. Perikanan
 4. Pertambangan minyak bumi
 5. Pertambangan gas bumi
 6. Pertambangan panas bumi

c) Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut pasal 1 UU No. 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain itu DAU bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah (Khusaini, 2007, h.36). Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, kondisi geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Distribusi DAU untuk Kabupaten dan Kota berdasarkan konsep *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU ditentukan oleh kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan mendapat DAU yang relatif kecil begitu sebaliknya (Khusaini, 2007,h.37).

Untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam membiayai beban pengeluaran yang sudah menjadi tanggung jawabnya, maka perhitungan DAU disamping menggunakan formula *fiscal gap* juga menggunakan faktor penyeimbang.

d) Dana Alokasi Khusus

DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 PP No. 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan, disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

e) Dana Darurat, terdiri atas Dana Kontingensi.

E. Hubungan keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia

Hubungan keuangan pusat daerah menyangkut pembagian. Hubungan ini menyangkut pembagian tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan pembangunan. Tujuan utama dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah adalah untuk mencapai

perimbangan antara berbagai pembagian ini. Bagaimana agar antara potensi dan sumberdaya masing-masing daerah dapat sesuai.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi inti permasalahannya adalah bagaimana merumuskan peranan itu, tetapi setidaknya-tidaknya ada dua peranan yang dapat dimainkan oleh pemerintah daerah dalam rangka hubungan keuangan pusat daerah.

- a. Pandangan pertama yaitu menekankan peranan pemerintah daerah sebagai ungkapan dari kemauan dan identitas masyarakat setempat. Tujuan pemerintah daerah pada dasarnya bersifat politik, dalam arti pemerintah daerah merupakan wadah bagi penduduk setempat untuk mengemukakan keinginan mereka dan untuk menyelenggarakan urusan setempat sesuai dengan keinginan dan prioritas mereka.
- b. Pandangan kedua yaitu pemerintah daerah pada dasarnya adalah lembaga untuk menyelenggarakan layanan-layanan tertentu untuk daerah, dan sebagai alat yang tepat untuk menebus biaya memberikan layanan yang semata-mata bermanfaat untuk daerah. Pada pandangan kedua ini tujuan pemerintah daerah bersifat tata usaha dan ekonom. Dari segi tata usaha lebih mudah atau berhasil guna, menggunakan jaringan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas yang tersebar dan menuntut pengetahuan medan setempat agar dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan dari sudut ekonomi, daya guna yang lebih besar dapat diraih bila kebijaksanaan dan penggunaan sumberdaya dapat disesuaikan pada keadaan dan kebutuhan setempat.

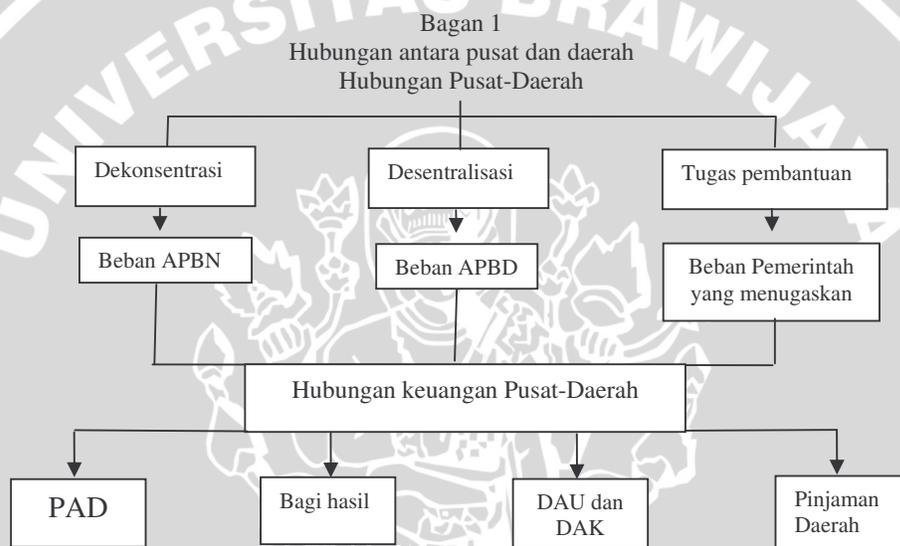
Kemandirian suatu daerah tidak berarti setiap daerah harus mampu membiayai seluruh pengeluarannya dari PAD, namun kemandirian dalam membiayai setidaknya adalah pengeluaran rutin dengan pendapatan asli daerah tetap merupakan usaha yang harus ditingkatkan, karena ditinjau dari derajat kebijakan penggunaan dana, PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling memberikan otonomi kepada daerah.

Kemampuan daerah dalam memobilisasi pendapatan asli daerah diukur melalui peranan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin masing-masing daerah.

Berkaitan dengan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat kecenderungan yang mengemukakan bahwa ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat merupakan hal yang buruk dan kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang baik tanpa mempertimbangkan dari sudut pandang dari kebijakan pembangunan yang lebih panjang. Adanya ketergantungan keuangan ini di Indonesia menurut (Kuncoro, 1997,h.142)

disebabkan oleh adanya kelemahan dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan salah satu kelemahan dalam sistem transfer keuangan tersebut adalah tidak terdapatnya upaya untuk meningkatkan bantuan dari atas dengan indikator upaya-upaya peningkatan pajak. Oleh karena itu dalam mentransfer dana kepada daerah tidak hanya didasarkan atas kebutuhan pembangunan tetapi juga pada usaha perpajakan dan kemampuan perpajakan daerah.

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Kuncoro 2004

Hubungan keuangan pusat dan daerah yang bervariasi dapat ditinjau dari beberapa pendekatan yang berbeda (Machfud Sidik, 2000, h.97), yaitu :

- a. Kapitalisasi
Pemerintah daerah diberi sejumlah modal, yang diharapkan untuk diinvestasikan, sehingga dapat menghasilkan pendapatan untuk menutup pengeluaran rutin dan mungkin membayar kembali modal tersebut. Modal tersebut mungkin disediakan melalui bantuan (grant) atau melalui penyerahan (equity). Sumber modal bisa berasal dari pemerintah, sumber internasional atau sektor swasta.
- b. Pemberian sumber-sumber pendapatan
Pemerintah daerah diberi sumber-sumber pendapatan tertentu untuk dimanfaatkan bagi pengeluaran-pengeluarannya sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pendekatan pengeluaran
Pendekatan ini berarti bahwa pembagian dana dari pusat kepada pemerintah daerah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya, berupa

pinjaman, bantuan atau bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sistem ini bertujuan untuk membiayai tingkat pengeluaran tertentu/pembiayaan pelayanan atau program pembangunan tertentu.

d. Perpaduan menyeluruh atas pendapatan dan pengeluaran

Menurut pendekatan ini, sumber-sumber pendapatan dan tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah dengan berdasarkan kepada tingkat kemampuan dan biayanya. Bantuan pusat atau pinjaman diberikan untuk menutup perbedaan antara hasil dari pendapatan yang telah diberikan dengan kebijaksanaan pengeluaran.

F. Kemandirian fiskal daerah

Kemampuan keuangan daerah mengandung arti kemampuan daerah kabupaten dan kota untuk membiayai urusan – urusan rumah tangganya dalam melaksanakan pemeritahan yang berasal dari PAD nya. Asumsi bahwa jika PAD dibawah 30 % dari APBD. Maka keputusan – keputusan di tingkat lokal di dominasi oleh pemerintah pusat. Ini akan mengurangi kredibilitas, kemandirian, dan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin menunjukkan bobot kemandirian dan kemampuan daerah dalam membiayai urusan – urusan rumah tangganya. Kemampuan keuangan daerah ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena pemerintah daerah tidak akan dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara efektif dan efisien tanpa dukungan sumber keuangan sendiri atau tanpa didukung keuangan yang cukup. Sebagaimana ditemukan oleh (Pamudji ,1985,h.61-62) sebagai berikut :

” pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya dengan sendiri”.

Hal ini berarti dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Tersedianya dana yang cukup akan semakin banyak kegiatan atau aktivitas yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain faktor keuangan daerah merupakan faktor esensial yang juga dapat dijadikan sebagai salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dengan demikian dukungan keuangan

daerah dalam hal ini pendapatan Asli Daerah adalah sangat penting sebab ketergantungannya dengan pemerintah pusat dapat dikurangi. Berkaitan dengan itu (Subrata, 1999,h.2) mengemukakan pentingnya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagai komplemem vital pelaksanaan otonomi daerah dengan menyatakan bahwa :

” membahas otonomi daerah tanpa membahas perimbangan keuangan antara pusat dan daerah seperti membahas kulit tanpa membahas isinya. Guna menyelenggarakan kegiatan yang intinya melayani kepentingan masyarakat diperlukan dana yang besar dan cenderung terus meningkat sesuai meningkatnya tuntutan masyarakat”.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, akan mendorong setiap daerah memajukan dirinya sendiri. Maju mundurnya suatu daerah sangat tergantung pada daerah itu sendiri dalam mangelola potensi kekayaan alam yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga daerah lebih leluasa dalam menggali dan memanfaatkan serta menikmati hasil kekayaan alam yang dimilikinya guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pembinaan kehidupan masyarakat di daerah.

Menurut Reksodiprojo dalam (Munir Dasril, 2004,h.105) tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya desentralisasi fiskal kepada suatu daerah dan pengukurannya dapat dilakukan menggunakan derajat otonomi fiskal. Masih menurut Reksodiprojo dalam (Munir Dasril , 2004,h.106) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah. Adapun rumus dari derajat otonomi fiskal ini adalah:

$$\text{Derajat Otonomi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Otonomi fiskal, khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah, menurut hasil temuan Tim KKP FE UGM dalam (Munir Dasril, 2004,h.169) menentukan tolak ukur kemandirian fiskal daerah dilihat dari rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan APBD sebagai berikut :

a. Rasio PAD terhadap APBD	0,00-10,00% (Sangat Kurang)
b. Rasio PAD terhadap APBD	10,01- 20,00% (Kurang)
c. Rasio PAD terhadap APBD	20,01- 30,00% (Sedang)
d. Rasio PAD terhadap APBD	30,01- 40,00% (Cukup)
e. Rasio PAD terhadap APBD	40,01- 50,00% (Baik)
f. Rasio PAD terhadap APBD	diatas 50,00% (Sangat Baik)

Penggunaan Analisis Rasio pada sektor Publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisa rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakutansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan dalam APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat)
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah Pusat atau propinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal),

Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan

retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat atau propinsi dan pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana extern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan extern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) (semakin rendah, dan demikian sebaliknya). Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah bahkan mempunyai kecenderungan turun. Berdasarkan hal itu perlu adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern baik melalui pengoptimalan sumber dana pendapatan yang telah ada maupun dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pusat ataupun propinsi, misal pajak kendaraan bermotor.

G. Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat

Realitas hubungan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan Total Pendapatan Daerah. Data yang diambil selama 1984/1985-1990/1991 menunjukkan rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah yaitu kurang dari 50% di semua propinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta (Kuncoro, 2003,h.552)

Menurut (Kuncoro, 2003,h.524) DKI Jakarta bisa mempunyai PAD yang relatif tinggi dari total pendapatan daerahnya disebabkan karena pertama, sektor perdagangan, manufaktur, dan jasa telah berkembang secara substansial. Kedua, pajak-pajak daerah, retribusi, dan penerimaan lain untuk Dati II ternyata dimasukkan dalam PAD Dati II. Ketiga, sumber-sumber PAD beralokasi di sektor modern yang umumnya terdaftar sehingga memudahkan pengumpulan pajak. Keempat, administrasi pajak daerah relatif menguntungkan.

Dari data sumber- sumber pengeluaran daerah seluruh Indonesia selama tahun anggaran 1986/1987 hingga 1992/1993, penerimaan terbesar Dati I dan Dati II berasal dari bantuan pemerintah pusat, diikuti oleh PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Ironisnya meskipun titik berat Otonomi Daerah adalah pemerintahan Dati II, namun kenyataannya justru Dati II-lah yang paling tergantung pada sumbangan pemerintah pusat (Kuncoro,2003,h.524).

Penyebab ketergantungan fiskal Daerah kepada pusat, (Kuncoro, 2003,h.528) mengatakan ada lima penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan Daerah kepada subsidi dari pusat :

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama, yang paling produktif dan buoyant baik pajak langsung dan tak langsung ditarik oleh pusat. Alasan sentralisasi pajak adalah untuk mengurangi disparitas antar daerah, efisiensi administrasi, dan keseragaman perpajakan.
3. Kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan pajak.
4. Adanya kekhawatiran yang berlebihan apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme.
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, selama ini bantuan dari pusat dibagi menjadi dua kategori bentuk blok dan spesifik. Subsidi spesifik penggunaannya sudah ditentukan oleh Pusat dan Daerah tidak punya keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut. Dalam realitas subsidi jenis ini yang paling banyak jumlahnya.

Untuk itu alternatif solusi yang bisa ditawarkan (Kuncoro, 2003,h.419) adalah :

- a. Meningkatkan peran BUMD
- b. Meningkatkan penerimaan daerah
- c. Mengubah pola pemberian subsidi
- d. Meningkatkan Pinjaman daerah

Sehingga disini dapat diketahui bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan berbagai upaya-upaya khususnya dalam rangka meningkatkan potensi- potensi yang ada pada daerah masing- masing, dengan demikian akan menghasilkan suatu kemampuan dan kemandirian di daerah dimana tidak bergantung lagi dengan bantuan dari pusat. Dengan adanya Kemandirian Fiskal di daerah ini dapat diketahui bahwa seberapa besar kemampuan daerah untuk dapat menghasilkan suatu pendapatan di daerahnya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian agar penelitiannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana maka harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Dengan metode penelitian peneliti dapat menentukan arah kegiatan penelitian yang dilakukan sehingga dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan.

Yang dimaksud dengan metode adalah suatu cara/prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian menurut (Singarimbun dan Effendi, 1989,h.8) diartikan sebagai berikut :

” Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Penelitian berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya. Hasil akhirnya, pada gilirannya melahirkan gagasan dan teori baru pula, juga merupakan proses yang tiada hentinya.”

Dengan demikian metode penelitian adalah cara untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengembangkan dan menguji masalah yang diteliti, agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Jenis Penelitian

(Person dalam Nazir, 1999,h.13) mengemukakan bahwa penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inguiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah yang dapat dipecahkan.

Dari definisi yang diungkapkan diatas maka penelitian merupakan suatu usaha atau sarana untuk memahami proses dengan langkah-langkah yang terencana secara sistematis dan alamiah sehingga didapatkan pemecahan masalah dari suatu permasalahan yang ada dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan suatu metode untuk dipakai dasar agar maksud dan tujuan peneliti dapat tercapai sesuai dengan pokok masalah yang diteliti, serta berguna untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung penelitian tersebut.

Suatu metode dipilih dengan memperhatikan kesesuaian dengan objek study, atau dengan kata lain dalam suatu penelitian sangat diperlukan metode yang sesuai dengan pokok permasalahannya dengan tujuan penelitian dengan maksud agar diperoleh data yang relevan dengan permasalahan peneliti.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut Bagdan dan Taylor dalam (Moleong, 2000,h.9) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala dan juga untuk menjawab pertanyaan sehubungan dengan status objek penelitian saat ini.

Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Adapun karakteristik penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2000,h.4-8) adalah :

- a. Latar alamiah
- b. Manusia sebagai instrumen
- c. Metode kualitatif
- d. Analisa data secara induktif
- e. Teori dasar atau *grand theory*
- f. Diskriptif
- g. Proses lebih panjang dari pada hasil
- h. Batas-batas yang ditentukan oleh fokus
- i. Ada kriteria khusus dan keabsahan data
- j. Desain yang bersifat sementara
- k. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Pertimbangan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah:

- a. Karena untuk keperluan analisis suatu masalah dalam mencari suatu solusi
- b. Untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui
- c. Dapat menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden
- d. Peneliti akan lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyaknya penajaman pengaruh yang ada dan terhadap pola nilai-nilai yang dihadapi
- e. Peneliti dapat menggambarkan tentang fenomena sosial yang ada dalam tabel menjadi jelas dan semakin hidup, dan nuansa-nuansa fenomena sosial dapat ditampilkan (Singarimbun dalam Kurniantara dan Pratikno, 2005,h.15).

B. Fokus Penelitian

Yang dimaksud dengan fokus penelitian adalah sebagai pusat perhatian yang dimaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan dalam mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti, seperti yang diungkapkan oleh (Moleong, 2000,h.7).

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan batasan dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, pertama batasan menentukan kenyataan guna mempertajam fokus, kedua penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

Fokus penelitian sangat penting untuk menentukan batasan penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan menentukan fokus penelitian menurut (Moleong , 2000,h.237) adalah :

1. Penetapan fokus yang membatasi study berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi layak.
2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi, eksklusi untuk menjangkau info yang mengalir masuk, mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan, data tidak dihiraukan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian tentang Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang Di Era Otonomi Daerah. Studi pada Pemerintah Kota Malang terhadap Realisasi APBD kota Malang mulai tahun Anggaran 2004-2006. Data ini dapat digunakan untuk mengukur derajat fiskal kota Malang, dan untuk mengetahui Tingkat Kemandirian Fiskal Kota Malang yang terdiri dari :

- 1) Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah dilihat dari tahun 2004-2006 yaitu :
 - a. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah,
 - b. Perkembangan Retribusi Daerah,
 - c. Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah dan,
 - d. Perkembangan lain-lain pendapatan yang sah yang berada di kota Malang.

- 2) Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Malang dilihat dari tahun 2004-2006 yaitu :
 - a. Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
 - b. Perkembangan Dana Alokasi Umum
 - c. Perkembangan Dana Alokasi Khusus
 - d. Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi
- 3) Tingkat Kemandirian fiskal Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah dilihat dari :
 - a. Derajat Otonomi Fiskal Yaitu Perbandingan antara Pendapatan Asli daerah dengan Total Penerimaan atau Pendapatan Daerah
 - b. Rasio Kemandirian Yaitu Perbandingan antara Pendapatan Asli daerah dengan Dana Perimbangan
 - c. Perbandingan antara Dana Perimbangan dengan Total Pendapatan Daerah
 - d. Rasio Ketergantungan Yaitu Persentase dari hasil Perbandingan Pendapatan Asli daerah dengan Total Penerimaan atau Pendapatan Daerah dan Perbandingan antara Pendapatan Asli daerah dengan Dana Perimbangan
- 4) Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang dilihat dari :
 - a. Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian dalam studi kasus ini, penulis memilih Kota Malang dikarenakan di Kota Malang terdapat Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Karena adanya Desentralisasi dalam otonomi sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan untuk mengetahui Kemampuan dan Kemandirian Pemerintah Kota Malang, Dimana disini kemampuan dan kemandirian fiskal kota Malang sebesar 11.41% untuk Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 88.60% pendapatan daerah meningkat tapi

subsidi pemerintah lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli daerah. Sehingga disini akan dapat diketahui mengapa dana perimbangan lebih besar dari pada pendapatan asli daerah kota Malang yang mempunyai potensi daerah yang baik. Selain itu Kota Malang merupakan salah satu daerah yang otonom yang jumlah PADnya selalu mengalami peningkatan, namun tingkat kemandiriannya masih rendah yang ditunjukkan oleh sebagian PAD didominasi oleh Dana bantuan dari pusat sehingga hal ini menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian sekaligus menganalisis fenomena tersebut dan kota Malang jaraknya dekat dengan tempat studi peneliti sehingga mudah dijangkau dalam melakukan Survei.

Sedangkan alasan mengambil situs penelitian di Dinas Pendapatan Pemerintah kota Malang karena Dinas tersebut merupakan perangkat daerah yang penting keberadaannya sebagai pusat pertanggungjawaban di bidang pendapatan daerah terutama PAD. Situs penelitian ini berada di Dinas Pendapatan Kota Malang untuk memperoleh data realisasi APBD kota Malang tahun anggaran 2004-2006 yang terdiri dari :

- a. Ruang Kepala Dinas Pendapatan Kota Malang
- b. Ruang Kasubdin Anggaran
- c. Ruang Kepala Seksi BPS
- d. Ruang Kepala Seksi Bappeda

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam setiap penelitian memerlukan data, baik sebagai bahan untuk deskripsi maupun untuk memperkaya informasi dalam mengambil kesimpulan. Data merupakan fakta-fakta dan foto-foto yang dikumpulkan dalam penelitian yang terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Data Primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau responden dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini diperoleh dengan wawancara yang digunakan untuk menambah dan menjelaskan permasalahan. Data tersebut menjadi data sekunder jika dipergunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Dinas

Pendapatan Kota Malang, Kasubdin Anggaran, Kepala Seksi BPS, Ruang Kepala Seksi Bappeda beserta staff-staff lain yang bersangkutan.

2. Data Sekunder: yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, artinya melalui satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri, dalam hal ini data sekunder diperoleh melalui jurnal dan studi pustaka, catatan-catatan dari instansi terkait. Data sekunder yang akan diambil oleh peneliti adalah data yang diambil dari APBD Kota Malang tahun anggaran 2004-2006 untuk mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu data yang diambil adalah total pendapatan daerah kota Malang dan data yang berasal dari internet, surat kabar, atau catatan-catatan dari instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk dianalisis, melalui tiga kegiatan yaitu: proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), berada di lokasi penelitian (*getting along*) dan proses pengumpulan data (*logging the data*).

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara menurut (Sugiyono, 2005) yaitu:

1. Observasi, peneliti melakukan pengamatan terhadap objek dan subyek penelitian sehingga peneliti dapat belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.
2. Wawancara, menurut Stainback (1988) bahwa "dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi". Jadi dapat disimpulkan bahwa wawancara dilakukan dalam penelitian ini dengan maksud untuk menggali informasi lebih tajam yang mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri *self report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.
3. Dokumentasi, dalam penelitian ini berupa gambar-gambar, foto-foto, peraturan, kebijakan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan data pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Manusia sebagai instrumen atau peneliti sendiri

- b. Selain itu instrumen lain yang digunakan adalah tape recorder, *interview guide*, *field note* dan alat tulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal yang penting di lapangan.

G. Metode Analisis

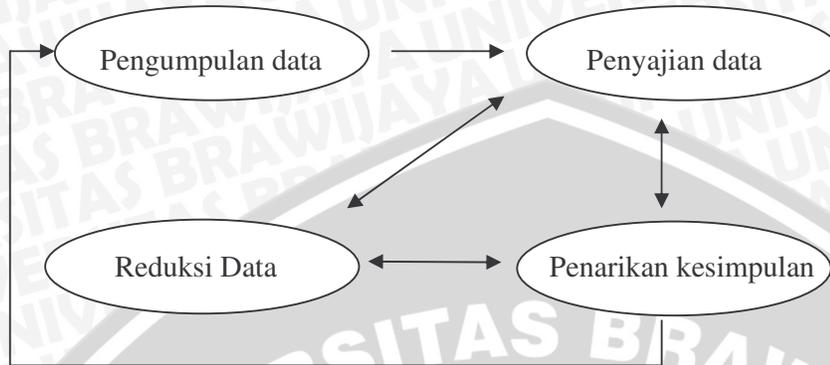
Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nasir, 1999,h.405). Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Nasution dalam Sugiyono (2005) menyatakan bahwa ”analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode analisa data adalah suatu teknik pengolahan data dengan menganalisa terhadap pokok masalah yang diteliti dimana analisa tersebut memerlukan pemecahan yang tepat.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model (Miles dan Huberman, 1992,h.16-19), analisis ini disebut dengan analisis data model interaktif yang terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Reduksi data. Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang penting, untuk mencari tema dan polanya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam melakukan reduksi data peneliti juga dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli untuk menambah wawasan dan pengembangan teori yang signifikan.
2. Data *display* (penyajian data). Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk table dan teks yang bersifat naratif yang merupakan penjelasan agar mempunyai makna yang bisa dipahami oleh orang lain.
3. *verification* (penarikan kesimpulan). Akhir dalam proses analisis adalah membuat kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Bagan 2 :
Proses Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (1992, h. 20).

Dalam analisa kualitatif ini, maka analisa data nantinya akan lebih banyak didominasi kata-kata dan data yang berupa angka-angka. Meskipun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan dikumpulkannya tabel ataupun gambar grafik untuk mendukung kelengkapan data. Dalam tradisi penelitian kualitatif analisis dan penafsiran data tidak dilakukan pada akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri, namun secara simultan juga diberlakukan pada saat pengumpulan data dilapangan, demikian terus berputar hingga ditemukan puncak data, lebih jauh analisis data dilakukan melalui proses penentuan kategori, sub kategori, dan properties atas data yang terkumpul.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis

1) Letak geografis kota Malang

Terletak pada ketinggian antara 440 - 667 dpl, serta 112,06 Bujur Timur dan 7,06 - 8,02 Lintang Selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Tengger di sebelah Timur
3. Gunung Kawi di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Letak Geografis Kota Malang dapat dijelaskan pula dengan tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Letak Geografis Kota Malang

Informasi Umum									
Luas Wilayah	110.06			km2					
Letak Geografis Provinsi									
Bujur	112.00°	6.00'	- "	- s.d	112.00°	7.00'	- "	- "	- "
Lintang	7.00°	6.00'	- "	- s.d	8.00°	2.00'	- "	- "	- "
Ketinggian									
Max	667.00			m					
Min	440.00			m					
Jarak Ke Jakarta	1,000.00			km					
Jarak ke Ibukota Provinsi Lain yang Terdekat									
Ibukota Provinsi	Surabaya								
Jarak	90.00			km					

Sumber : Laporan Data BPS kota Malang

Tabel 4.2
Batas Wilayah Kota Malang

No.	Arah	Perbatasan
1.	Arah Timur	Kab. Malang(18km)
2.	Arah Barat	Kota Batu(20 km)
3.	Arah Utara	Kab. Malang(18 km)
4.	Arah Selatan	Kab. Malang(18 km)
5.	Arah Timur	Kab. Malang(18 km)
6.	Arah Barat	Kota Batu(20 km)
7.	Arah Utara	Kab. Malang(18 km)
8.	Arah Selatan	Kab. Malang(18 km)

Sumber :Laporan Data BPS kota Malang

2) Kadar Udara

Berhawa sejuk dan kering, curah hujan rata-rata tiap tahun 1.833 mm dan kelembaban udara rata-rata 72 % < bulan pada C 32,2 tertinggi dan Agustus Juli sekitar terendah Suhu C. 24,13 rata-rata>

Tabel 4.3
Iklim Kota Malang

Curah Hujan	1,883.00	mm/tahun	
Suhu Udara	23.30 ° C	s.d	24.90° C
Kelembaban (rata-rata)	72.00	%	
Penyinaran Matahari	-	%	

Sumber : Laporan Data BPS kota Malang

3) Keadaan Geologi

Keadaan tanah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang antara lain :

1. Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas,cocok untuk industri < sudah yang daerah merupakan sehingga kota pusat sebagai tinggi, dataran tengah Bagian>
2. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang kurang subur

4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan

4) Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ada 4 macam, antara lain :

1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
2. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
3. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
4. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha

Tabel 4.4

Tata Guna Tanah Kota Malang

No.	Tata Guna Tanah		
1.	Kampung/Permukiman	4,558.44	Ha
2.	Industri	150.52	Ha
3.	Sawah	1,497.96	Ha
4.	Tanah Kering	0	Ha
5.	Kebun Campuran	0	Ha
6.	Perkebunan	0.28	Ha
7.	Hutan	0	Ha
8.	Semak, Padang Rumput	0	Ha
9.	Lahan Kosong, Rusak	0	Ha

Sumber : Laporan Data BPS kota Malang

b. Kondisi Sosial Budaya

1) Jumlah Penduduk Kota Malang

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km. persegi, Kota dengan jumlah penduduk sampai akhir *Juni 2005 sebesar 782.110 jiwa*. Kepadatan penduduk kurang lebih 7106 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 125.824 jiwa, Blimbing = 167.301 jiwa, Kedungkandang = 152.285 jiwa, Sukun = 174.184 jiwa, dan Lowokwaru = 162.516 jiwa), 57 Kelurahan, 10 Desa, 505 RW dan 3.649 RT.

Tabel 4.5
Pembagian administratif Kota Malang

Pembagian administratif	
· <u>Kecamatan</u>	5
· <u>Desa/kelurahan</u>	57

Sumber : Laporan Data BPS kota Malang

Tabel 4.6
Pencari Kerja Menurut Status di Dinas Tenaga Kerja

Tahun Pendidikan / Program Studi	2005			2006		
	Pria (jiwa)	Wanita (jiwa)	Jumlah	Pria (jiwa)	Wanita (jiwa)	Jumlah
SMP	207	504	711	2,272	794	3,066
SMU	6,441	4,707	11,148	9,203	6,483	13,910
PENDIDIKAN KEJURUAN	6,906	5,132	12,038	8,651	5,847	13,783
PENDIDIKAN AKADEMI	2,230	2,163	4,393	2,449	2,391	4,612
PERGURUAN TINGGI	7,924	7,734	15,658	9,416	9,148	17,150
GRAN TOTAL	23,708	20,240	43,948	31,991	24,663	52,231

Sumber : Laporan Data BPS kota Malang

2) Komposisi

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina)

3) Agama

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen)

serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara

4) Seni Budaya

Kekayaan etnis dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Wayang Topeng Malang (Topeng Malang), namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan tiga budaya (Jawa Tengahan, Madura, dan Tengger). Hal tersebut terjadi karena Malang memiliki tiga sub-kultur, yaitu sub-kultur budaya Jawa Tengahan yang hidup di lereng gunung Kawi, sub-kultur Madura di lereng gunung Arjuna, dan sub-kultur Tengger sisa budaya Majapahit di lereng gunung Bromo-Semeru. Etnik masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA).

5) Bahasa

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut 'boso walikan' yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya : seperti Malang menjadi Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa Jawa kasar umumnya. Hal menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi

6) Pendatang

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

7) Gelar Yang Disandang Kota Malang

1. Paris of Java

Karena kondisi alamnya yang indah, iklimnya yang sejuk dan kotanya yang bersih, bagaikan kota “PARIS” nya Jawa Timur.

2. Kota Pesiar

Kondisi alam yang elok menawan, bersih, sejuk, tenang dan fasilitas wisata yang memadai merupakan ciri-ciri sebuah kota tempat berlibur

3. Kota Peristirahatan

Suasana Kota yang damai sangat sesuai untuk beristirahan, terutama bagi orang dari luar kota Malang, baik sebagai turis maupun dalam rangka mengunjungi keluarga/famili.

4. Kota Pendidikan

Situasi kota yang tenang, penduduknya ramah, harga makanan yang relatif murah dan fasilitas pendidikan yang memadai sangat cocok untuk belajar/menempuh pendidikan.

5. Kota Militer

Terpilih sebagai kota Kesatrian. Di Kota Malang ini didirikan tempat pelatihan militer, asrama dan mess perwira disekitar lapangan Rampal., dan pada jaman Jepang dibangun lapangan terbang “Sundeng” di kawasan Perumnas sekarang.

6. Kota Sejarah

Sebagai kota yang menyimpan misteri embrio tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar, seperti Singosari, Kediri, Mojopahit, Demak dan Mataram. Di Kota Malang juga terukir awal kemerdekaan Republik bahkan Kota Malang tercatat masuk nominasi akan dijadikan Ibukota Negara Republik Indonesia.

7. Kota Bunga

Cita-cita yang merebak dihati setiap warga kota senantiasa menyemarakkan sudut kota dan tiap jengkal tanah warga dengan warna warni bunga.

c. Potensi Daerah Kota Malang

Kota Malang merupakan kota yang sedang berkembang dan mempunyai beragam potensi.

Potensi-potensi tersebut meliputi :

Dimana Kota Malang memiliki tiga Potensi daerah yaitu :

1. Potensi Sumber Daya Alam
2. Potensi Sumber Daya Manusia
3. Potensi Ekonomi

Bidang-bidang usaha yang ada mampu memberikan pemasukan daerah dan peningkatan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan daerah Malang dan sekitarnya.

Kondisi Kota Malang ini sangat memungkinkan untuk perkembangan usaha-usaha yang menghasilkan, karena potensi yang mendukung. Seperti Wisata, Pendidikan, Hotel dan lain-lain, saling berkitan erat antar satu dengan yang lainnya.

Tabel 4.7
Komoditi kota Malang

No	Sektor / Komoditi	Unggulan / Tidak	Deskripsi
1	Primer-Perkebunan:Nangka	Unggulan	banyak dikembangkan di Kecamatan Kedungkandang terutama di Kelurahan Cemoro Kandang.Peluang investasi sangat potensial di sektor pengolahan nangka menjadi makanan jadi dan buah segar yang berkualitas. Produksi Tahun Terakhir(2005) : 754.32 ton/Th
2	Primer-Perkebunan:Salak	Unggulan	Banyak dikembangkan di Kecamatan Kedungkandang terutama di Kelurahan Tlogowaru Salak ini memiliki prospek bagus bermacam-macam produk olahan dibuat dari salak,diantaranyaAsinan,dan manisan dan saat ini salak sudah dikalengkan.Produksi Tahun Terakhir (2005) : 3,084.67ton/Th
3	Sekunder-Industri:Keramik Dinoyo	Unggulan	Sentra Industri Keramik ini terletak diJl. MT. Haryono Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru, Produk kerajinan ini adalah aneka souvenir pernikahan ,tempat air,dll.

4	-:Industri Mebel Tunjungsekar	Unggulan	Sentra Industri Mebel Tunjungsekar terletak di Kelurahan Tunjungsekar, produk industri mebel ini adalah kursi tamu,meja makan, almari,tempat tidur dll. Tehnologi yang digunakan semi modern yaitu memadukan tradisional dan menggunakan mesin.
5	-:Industri Gerabah Merah Penanggungan	Unggulan	Sentra Industri Gerabah ini terletak di Jl. Mayjen Panjaitan Kelurahan Penanggungan tepatnya di RW.06, produk yang dihasilkan adalah guci, pot bunga, souvenir pernikahan dan peralatan dapur.
6	-:Industri Keripik Tempe Sanan	Unggulan	Sentra industri terletak di Jl. Sanan Kel. Purwantoro, dan terdapat kurang lebih 100 Pengusaha tempe.snta industri ini mempunyai peluang yang sangat bagus, karena sudah menjadi makanan khas sebagai oleh-oleh setiap wisatawan yang berkunjung,
7	-:Industri Kerajinan Rotan Balarjosari	Unggulan	Terletak di Kel. Balarjosari, mempunyai peluang yang sangat bagus, dipasarkan dalam kota maupun ke luar negeri. Ke Australia, Prancis, Libanon dan Jepang. Produk yang dihasilkan al tempat tidur, kursi: tamu, goyang, kursi letter, kursi parabola dll.
8	-:Industri Sanitair Karangbesuki.	Unggulan	Sentra industri terletak di Klaseman Kel. Karangbesuki tepatnya di RW. 2.Produk yg dihasilkan adalah sangkar burung, lampu taman,air mancur,pot bunga,kursi taman dan kijing makam.
9	Tersier- Jasa:Koperasi	Unggulan	Di Kota Malang terdapat 500 unit lebih koperasi yg masih aktf,dengan total anggota 76.000.shg hampir seperdelapan dari total penduduk kota malang ikut bertumpu pada koperasi.
10	-:Sektor Periklanan	Unggulan	Kota Malang merupakan area yg sangat prospektif sbg jaringan pemasaran produk perusahaan. Peluang yg terdapat pd sektor ini antara lain,bentuk kerjasama

			pemanfaatan, pemanfaatan lokasi strategis untuk pemasangan iklan.
--	--	--	---

Sumber : Laporan Data BPS kota Malang

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a. Gambaran Dinas Pendapatan Kota Malang

Dinas Pendapatan berada pada Jl. Kertanegara 7 Malang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan. Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Malang melalui sekretatis daerah. Visi, Misi, Profil, dan Dasar Hukum Dinas Pendapatan Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya pemulihan Perekonomian Kota dalam rangka mendukung kemandirian Kota Malang

2. Misi

- a. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
- b. Pengembangan informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung administrasi Pendapatan Asli Daerah
- c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat (publik) khususnya Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah
- d. Pengembangan landasan yuridis dalam rangka pemungutan Daerah, Retribusi Daerah dan sumber-sumber penerimaan lain yang sah
- e. Pembudayaan taat Pajak melalui kegiatan sosialisasi terpadu kepada masyarakat Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
- f. Pengembangan informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung administrasi Pendapatan Asli Daerah
- g. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat (publik)
- h. khususnya Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah
- i. Pengembangan landasan yuridis dalam rangka pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan sumber-sumber penerimaan lain yang sah

- j. Pembudayaan taat Pajak melalui kegiatan sosialisasi terpadu kepada masyarakat

3. Profil

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENDAPATAN

1. Cepat dan ramah dalam pelayanan
2. Tanggap terhadap keluhan
3. Terbuka terhadap kritik dan saran
4. Semangat dan percaya
5. Tanggung jawab terhadap penyelesaian

4. Dasar Hukum Dinas Pendapatan

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang
- b. Keputusan Walikota Malang Nomor 346 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang

b. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Malang

- a) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang penerimaan dan pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pendapatan Daerah
 - 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang penerimaan dan pendapatan Daerah
 - 3) Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan, dan pemungutan pajak Daerah

- 4) Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan lain-lain
- 5) Pelaksanaan pengembangan potensi dan pengendalian operasional penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- 6) Penyusunan rencana penerimaan dan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah
- 7) Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah
- 8) Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah
- 9) Pembinaan dan pengendalian benda-benda,berharga serta pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya
- 10) Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 11) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penerimaan dan pendapatan Daerah
- 12) Pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 13) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan., ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan
- 14) Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP)
- 15) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- 16) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Susunan Organisasi di Dinas Pendapatan Kota Malang

1. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 1. Sub bagian keuangan dan penyusunan program
 2. Sub bagian umum
 - c. Unsur Pelaksana Yaitu :
 - 1) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - b) Seksi Penetapan,
 - 2) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembukuan
 - b) Seksi Pelaporan
 - 3) Bidang Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-lain, terdiri dari :
 - a) Seksi Penagihan
 - b) Seksi Pengelolaan Penerimaan Lain-Lain,
 - 4) Bidang Pengembangan Potensi dan Pengendalian Operasional terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan Potensi
 - b) Seksi Pengendalian Operasional
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

d. Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bagian di Dinas Pendapatan

- a). Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yaitu : mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas-tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- b). Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan; kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan Dinas.

Bagian tata Usaha membawahi :

1. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
2. Sub Bagian Umum

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan
2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)
3. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan Dinas
4. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
5. Pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan
6. Pengelolaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan
7. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan Dinas
8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
10. Pemeriksaan nota penghitungan Pajak Daerah
11. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan pengenaan Pajak dengan Jabatan (Official Assesment)
12. Pemeriksaan ketetapan SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB

13. Pengendalian dan pendistribusian SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB
 14. Pemeriksaan permohonan pembayaran Pajak Daerah dengan sistem angsuran dan penundaan
 15. Penandatanganan SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB
 16. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 17. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- c). Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dibidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan membawahi :

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
- b. Seksi Penetapan

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a) perumusan teknis pendaftaran dan pendataan objek, subjek dan wajib pajak Daerah dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian
- b) pemeriksaan akurasi pendaftaran, dan pendataan objek, subjek dan wajib Pajak
- c) penelitian kelengkapan data potensi Pajak Daerah
- d) pengendalian pemrosesan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- e) perumusan teknis penghitungan dan penetapan Pajak Daerah

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan.

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan pendataan dan pendaftaran obyek dan wajib pajak

Tugas Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan formulir pendataan (SPTPD)
- b. Penyerahan formulir pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak setelah dilakukan pencatatan dalam buku dan daftar SPTPD
- c. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau kuasanya
- d. Pelaksanaan pemeriksaan obyek Pajak dalam rangka penentuan besarnya pajak
- e. Penyiapan formulir pendaftaran Wajib Pajak
- f. Penyampaian formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam buku dan daftar formulir pendaftaran
- g. Pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- h. Pengolahan data obyek, subyek dan Wajib Pajak Daerah
- i. Penyampaian Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada Wajib pajak
- j. Penyimpanan dan pendokumentasian arsip dan data Pajak Daerah
- k. Pelaporan hasil pengolahan data Pajak Daerah secara berkala
- l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - b. Seksi Penetapan mempunyai tugas melakukan penghitungan, penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk melakukan tugas, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penghitungan Pajak dan Retribusi Daerah dalam nota perhitungan atas dasar kartu data serta sesuai dengan tarif Peraturan Daerah yang berlaku
- b. Penerbitan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB, SKRD, SKRDT, SKRDKB dan SKRDLB berdasarkan nota perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah

- c. Pembuatan daftar rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah yang diterbitkan
 - d. Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Pajak kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
 - e. Penyusunan laporan penggunaan benda-benda berharga yang telah diterbitkan
 - f. Pembuatan perjanjian angsuran sesuai dengan Surat Permohonan Angsuran yang telah disetujui Kepala Dinas
 - g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaan, Pendaftaran dan Penetapan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d). Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi penyusunan program, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan
- Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai fungsi :
- a) Pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan
 - b) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)
 - c) Pengelolaan anggaran dan penyusunan administrasi keuangan
 - d) Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan
 - e) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - f) Pelaksann tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya,
- e). Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah

tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan Dinas.

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan Dinas
 - b) pelaksanaan administrasi kepegawaian
 - c) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
 - d) pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan Dinas
 - e) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - f) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- f). Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak, Penerimaan Lain-lain dan pengendalian benda-benda berharga

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a) penelitian terhadap pembukuan dan, pencatatan ketetapan pajak Daerah dan realisasi penerimaan pajak Daerah
- b) penelitian terhadap pembukuan dan pencatatan terget dan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c) pengendalian terhadap pengajuan, penyimpanan dan pendistribusian benda-benda berharga
- d) penelitian terhadap akurasi pelaporan realisasi, penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Lain-Lain secara berkala
- e) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- f) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan membawahi :

- a. Seksi Pembukuan;
- b. Seksi Pelaporan;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan, tugasnya berada di bawah dan Bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

a. Seksi Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan penerimaan-Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan , Retribusi Daerah, Pajak Bagi Hasil dan Penerimaan lain-lain

Seksi Pembukuan mempunyai fungsi :

- a) pembuatan perencanaan kebutuhan benda-benda berharga untuk setiap tahunnya
- b) pencatatan penerimaan, pengeluaran dan pengendalian benda-benda berharga
- c) pengajuan pencetakan benda-benda berharga sesuai, dengan kebutuhan
- d) pengevaluasian terhadap penyimpanan dari peredaran benda-benda berharga yang ada pada unit-unit kerja penghasil atau pemakai benda-benda berharga.
- e) pembuatan laporan secara berkala jumlah persediaan benda-benda berharga dan jumlah benda-benda berharga yang beredar di unit-unit penghasil/pemakai benda berharga sesuai jenisnya.
- f) pencatatan ke dalam buku jenis Pajak Daerah terhadap penerimaan pajak daerah berdasarkan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB, SPPT, Pajak Bumi dan Bangunan dan denda administrasi Pajak Daerah.
- g) pencatatan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan denda administrasi Pajak Daerah.
- h) pencatatan pembayaran Pajak Daerah yang dibayar dengan cara mengangsur atau ditunda dengan realisasi pembayarannya.
- i) pencatatan target penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain sesuai dengan yang tertera dalam APBD dan realisasi pemerintahannya.
- j) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi

k) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pelaporan secara berkala target dan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bagi Hasil dan penerimaan lain-lain

Seksi Pelaporan mempunyai fungsi :

a) pembuatan laporan secara berkala (bulanan dan tahunan) realisasi penerimaan per jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Lain-Lain

b) pembuatan laporan secara berkala perbandingan antara target dan realisasi setoran dari unit kerja penghasil (pemungut) Pajak dan Retribusi Daerah

c) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi

d) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

g). Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

a. pengendalian penagihan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku

b. pemeriksaan permohonan keberatan, keringanan dan pembebasan Pajak Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB

c. penerbitan Surat Peringatan terhadap Wajib Pajak Daerah yang menunggak dan sudah dilakukan penagihan

d. penerbitan Surat Teguran terhadap Wajib Pajak Daerah yang menunggak dan sudah diberikan Surat Peringatan dan belum melunasinya

- e. penerbitan Surat Paksa terhadap penunggak Pajak Daerah yang sudah diberikan Surat Teguran dan belum melunasinya
- f. pelaksanaan penyitaan obyek Pajak Daerah atau barang milik Wajib Pajak yang menunggak dan memproses pelelangannya
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan membawahi :

- a. Seksi Penagihan
- b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Lain-Lain

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penagihan.

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan dan, pemrosesan permohonan keberatan pembayaran Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, berdasarkan ketentuan yang berlaku

Seksi Penagihan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah berdasarkan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB dan denda administrasi kepada Wajib Pajak yang belum membayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan
- b. pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan SPPT
- c. pelaksanaan penagihan Pajak lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku
- d. pembuatan laporan tunggakan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ,Pajak Bumi dan Bangunan

- e. penyusunan laporan daftar Wajib Pajak Daerah, *PBB* dan atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku yang telah ditagih tetapi tetap belum membayar
- f. penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat pemberitahuan peledangan kepada Wajib Pajak Daerah dan mau pajak lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku
- g. penyusunan laporan terhadap Wajib Pajak yang membayar sendiri atau yang melalui juru pungut /petugas penagih
- h. pemeriksaan berkas permohonan keberatan Wajib pajak dan melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek Pajak yang bersangkutan
- i. penyusunan telah terhadap permohonan keberatan Wajib Pajak
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Fungsi
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- h). Seksi Penerimaan lain-lain mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan unit kerja penghasil untuk penerimaan lain-lain

Seksi Penerimaan Lain-Lain mempunyai Fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan unit penghasil yang jenis pungutannya masuk. Penerimaan Lain-Lain untuk mengetahui realisasi penerimaan dan permasalahannya.
- b. Pembuatan laporan hasil koordinasi dengan unit penghasil
- c. pegevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

i). Bidang Pengembangan Potensi dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan potensi dan pengendalian operasional.

Bidang Pengembangan Potensi dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian operasional
- b. penyusunan perencanaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan pendapatan Lain-Lain
- c. penyusunan perencanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. pelaksanaan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah
- e. Pengendalian mekanisme Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- f. pelaksanaan evaluasi potensi, target dan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Pengembangan Potensi dan Pengendalian Operasional membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Potensi
- b. Seksi Pengendalian Operasional

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Pengendalian Operasional

- a.) Seksi Pengembangan potensi mempunyai tugas melakukan perencanaan pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seksi Pengembangan Potensi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pengembangan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Lain-lain setiap Tahun Anggaran

- b. pelaksanaan pembinaan teknis pemungutan dan penggunaan media dan sarana pemungutan serta penggunaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis tatakerja dan tata hubungan kerja yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah.
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - e. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi peraturan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b.) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. pengendalian mekanisme proses pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. pengendalian pelaksanaan teknis penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Pelaksanaan analisis potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kondisi riil di lapangan
- e. pelaksanaan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

j). Untuk melakukan tugas dan fungsi teknis tertentu serta atas dasar kebutuhan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan Dinas dapat dibentuk: Kelompok Jabatan Fungsional

k). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior

Jumlah Tenaga Fungsional, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada

Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Tenaga Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Malang

Dalam struktur organisasi kota Malang dapat diketahui bahwa dalam Dinas Pendapatan Kota Malang terdapat bagian- bagian yang mana setiap bagian- bagian memiliki tugas masing- masing dimana dalam melakukan tugas tersebut dapat dikerjakan dengan baik. Disini diharapkan Sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Kota Malang memiliki potensi yang sangat berperan dalam mengangkat pendapatan daerah Kota Malang. Dalam struktur organisasi dinas pendapatan, memiliki keterkaitan antara satu sama lain.

Struktur organisasi yang berada di dinas pendapatan daerah kota malang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tanggal 20 April Tahun 2004. Dalam peraturan daerah tersebut diketahui bahwa terdapat pembagian pada setiap masing-masing kepala yang berada di dinas pendapatan yang terdiri antara lain : Kepala dinas pendapatan daerah, Kepala bagian TU, Kasubag bagian Umum, Kasubag bagian Keuangan, Kelompok jabatan fungsional, dll yang mana dalam satu struktur organisasi terdiri dari setiap bidang- bidangnya yang harus melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab, dimana diharapkan dapat memperoleh sumber daya manusia yang berpotensi dan handal. Selain itu sumber daya manusia yang mengelolah Pendapatan Asli Daerah juga dapat memberikan kontribusi yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya dan mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah.

f. Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendapatan Kota Malang

Dinas pendapatan kota malang memiliki sumber daya manusia yang berpotensi dalam bidangnya. Sumber daya manusia yang berada pada dinas pendapatan memiliki golongan-golongan, dalam golongan-golongan tersebut terdapat beberapa pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap. Dimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini :



Tabel 4.8
Jumlah Karyawan dan Karyawati Dinas Pendapatan dan PTT
Bulan : Mei 2007

No	Bagian/Bidang/UPTD	PNS	PTT	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Tata Usaha	17	15	32
3.	Penagihan dan pengelolaan penerimaan lain-lain	16	7	23
4.	Pengembangan potensi dan pengendalian operasional	10	1	11
5.	Pembukuaan dan Pelaporan	14	5	19
6.	Pendataan, pendaftaran dan penetapan	39	2	41
7.	GOR	13	33	46
	JUMLAH	110	66	176
8.	PTT Dinas kebersihan yang diperbantukan di dinas pendapatan kota Malang	-	1	177

Sumber : Laporan Data Dinas Pendapatan Kota Malang

Dalam Tabel diatas telah dijelaskan bahwa terdapat pegawai dari Dinas pendapatan. Pegawai- pegawai tersebut terdiri dari pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil atau pegawai tetap. Disini diharapkan seluruh karyawan yang bekerja di dinas pendapatan dapat mampu memberikan kontribusi mereka dalam mendukung kemandirian fiskal kota Malang. Sehingga disini kota Malang dengan adanya Otonomi daerah dapat maju dan selalu mandiri, salah satu faktornya yang memengaruhi berasal dari sumber daya manusia harus efisien,dan efektif dalam menyelenggarakan tugasnya dengan baik dan benar.

B. Penyajian Data

1. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah dilihat dari tahun 2004-2006 .

Disini dapat kita ketahui bahwa pada Tahun 2004 pencapaian Pendapatan Asli Daerah telah melebihi target yang diinginkan yaitu sebesar Rp. 91,410,779,615.91 (106.83%). Sedangkan untuk Tahun 2005 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 58,740,205,287.71 (97.79%), pada tahun 2005 tersebut target tidak tercapai hal ini dikarenakan oleh pengaruh penerimaan pendapatan asli daerah Kota Malang dari semua pendapatan baik dari segi pajak, maupun retribusi banyak yang tidak tercapai karena kondisi ekonomi dan potensi masyarakat dan terdapat pengeluaran- pengeluaran yang banyak. Pada tahun 2004 jenis pajak yang dimiliki oleh kota Malang mencapai lima yang mana target yang ditetapkan tinggi, sedangkan untuk tahun 2005 dan 2006 jenis pajaknya naik yang mana bertambah satu pajak yang terdiri dari 6 pajak. Selain itu pada tahun 2006 Target telah tercapai yaitu pendapatan sebesar Rp. 62,311,313,501.19 (103.87%). Dan dapat diketahui bahwa disini pendapatan kota Malang tidak selalu naik atau selalu turun, hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9

**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Tahun 2004-2006**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian %
1.	2004	85,569,063,346.00	91,410,779,615.91	106.83%
2.	2005	60,064,915,500.00	58,740,205,287.71	97.79%
3.	2006	56,990,746,371.50	62,311,313,501.19	103.87%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

Telah diketahui pada tabel diatas bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tidak selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2004 target yang ditetapkan telah melampaui dan target dapat tercapai dengan baik yang mana dalam tahun 2004 pajak terdiri dari lima pajak, mungkin salah satu faktor tersebut yang menjadikan bertambahnya pendapatan yang diperoleh kota Malang,

yang mana dalam pencapaian target tinggi . Tetapi pada Tahun 2005, target yang ditetapkan menurun dari tahun 2004 sehingga disini pencapaian juga mengalami penurunan.

Berdasarkan wawancara Kepala TU dinas pendapatan pada tanggal 10 September 2007 pada pukul 10.00 beliau mengatakan bahwa Salah satu faktor menurut "Bapak Bowo Soeprasetyo" "Pada Tahun 2004 terdapat lima jenis pajak dimana setelah keluarnya Peraturan dari pemerintah pusat yang mana terdapat banyak jenis pajak yang harus dipungut. Tetapi dalam hal ini hanya memiliki enam jenis pajak yang harus dipungut sehingga dari lima pajak tadi dapat bertambah satu jenis pajak saja yaitu pajak Hotel dan Restoran yang dibagi sendiri- sendiri, untuk tahun 2005 dan 2006 menjadi enam pajak saja. Pajak tersebut dalam keputusan pemerintah pusat jumlahnya terdiri dari lima belas jenis pajak yang kemudian diperkecil karena tidak sesuai dengan potensi yang berada pada kota Malang. Sehingga yang sesuai dengan kondisi atau potensi yang ada pada kota Malang hanya terdiri dari enam pajak saja. Sehingga potensi yang tidak sesuai pada kota Malang dihilangkan dalam pemungutan pajaknya".

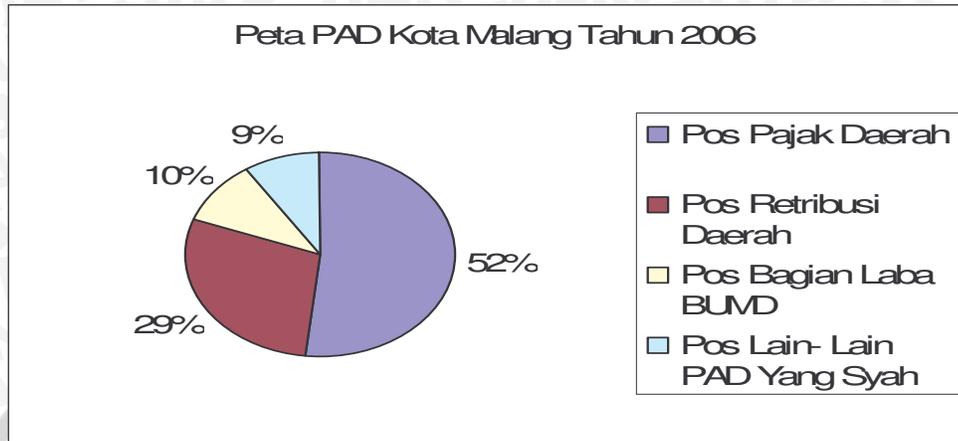
Pada tahun 2005 target tidak tercapai yaitu persentase sebesar 97.79% yang mana menurut "Bapak Bowo Soeprasetyo" bahwa target tidak tercapai karena terdapat pengeluaran atau belanja yang meningkat selain itu penerimaan daerah juga berkurang terutama dari segi pajak.

Pada tahun 2006 target dapat tercapai dengan baik hal ini dikarenakan adanya kondisi ekonomi yang mulai baik, selain itu kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sudah mulai baik. Sehingga dalam hal ini dalam perkembangan pendapatan asli daerah kota Malang pada tahun 2006 terdapat peningkatan yang disebabkan karena potensi- potensi yang ada. Selain itu dari retribusi, BUMD, dan pendapatan lain-lain yang syah juga mempengaruhi perolehan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Malang.

Dapat diketahui Peta Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Pada Tahun 2006 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik Pie 1

Peta Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Pada Tahun 2006



Dapat diketahui disini bahwa pada Tahun 2006 Pendapatan Asli Daerah yang mendominasi adalah pada Pos Pajak Daerah yaitu sebesar 52%, kemudian Retribusi Daerah sebesar 29%, Pos Bagian Laba BUMD sebesar 10% dan Pos Lain-lain yang syah sebesar 9%. Dimana Pajak daerah yang memberikan kontribusi yang tertinggi dalam menambah kas atau pendapatan daerah. Dimana Pemerintah kota Malang harus dapat mengelolah potensi yang ada dengan baik.

2. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Malang salah satu pajak yang memberikan kontribusinya yang terbesar adalah pajak penerangan jalan yang mana pajak penerangan jalan tersebut terhadap post pajak dapat mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 tanggal 4 nopember 2002. Yang mana pada pajak penerangan jalan pada tahun 2006 targetnya yaitu sebesar 17,820,000,000,00 yang kemudian realisasi penerimaannya sebesar 18,589,169,105.36 (104.32%). Hal ini dapat diketahui bahwa pajak yang mendominasi adalah pajak penerangan jalan. Tetapi disini pajak penerangan jalan walaupun sudah mendominasi pajak secara keseluruhan. Namun disini pajak penerangan jalan juga dananya yang sebagai pajak akan digunakan lagi untuk memfasilitasi jalan- jalan yang berada di kota Malang. Salah satunya untuk pemberian penerangan jalan yang berada pada jalan baru yaitu pada pembuatan jalan layang yang berada pada daerah Arjosari. Dimana pajak penerangan jalan

digunakan untuk pemberian penerangan jalan tersebut yang dikelola oleh PLN yang berada dalam kota Malang ini.

Sedangkan untuk target dan realisasi pada tahun 2006 yang paling mendominasi adalah pada pajak Reklame yang persentase mencapai 130.66% disini dapat dilihat bahwa persentase tersebut tinggi yang mana banyak orang yang memasang reklame untuk mempromosikan produk yang ditawarkan.

Pada dasarnya pungutan pajak sesuai dengan Peraturan daerah yang ada di kota Malang ini didalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Dimana dalam setiap pajak daerah ditangani oleh masing-masing dinas penghasil. Misalnya saja Pajak Hotel dan Restoran ditangani oleh Dinas Pendapatan, Pajak Hiburan dan Reklame ditangani oleh Dinas Perijinan kota Malang dan disetorkan kepada Dinas Pendapatan, Pajak Penerangan Jalan ditangani langsung oleh Dinas Pendapatan tetapi langsung dibayarkan kepada PLN yang berada di Kota Malang, yang sumber dananya berasal dari masyarakat. Untuk Pajak Parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan yang kemudian disetorkan kepada Dinas Pendapatan. Oleh karena itu setiap dinas penghasil wajib menyerahkan pajaknya kepada Dinas Pendapatan. Dalam masing-masing dinas penghasil terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang tata cara pembayaran pajak yang berada di kota Malang ini.

a. Target dan Realisasi Pos Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2004

Pos Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2004, disini diketahui bahwa pajak yang paling memberikan kontribusi terbesar tahun 2004 ini adalah pajak penerangan jalan. Jumlah pajak penerangan jalan disini sebesar 16,563,436,679.00 (100,26%). Kemudian disusul oleh pajak hotel dan restoran 6,941,250,122.77 (107.58%), Pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak parkir.

Sedangkan untuk target dan realisasi yang mencapai persentase yang tinggi pada pajak Reklame yang sebesar 112.37%, pajak Reklame ini mencapai persentase yang paling tinggi pada tahun 2004. Dimana dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Target dan Realisasi Pos Penerimaan Pajak Daerah
Kota Malang Tahun 2004

No.	Pos Pajak Daerah	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel dan Restoran	6,451,950,000.00	6,941,250,122.77	107.58%
2.	Pajak Hiburan	1,223,700,000.00	1,236,780,615.25	105.15%
3.	Pajak Reklame	1,157,625,000.00	1,300,850,235.00	112.37%
4.	Pajak Penerangan Jalan Umum	16,520,000,000.00	16,563,436,679.00	100,26%
5.	Pajak Parkir	295,000,000.00	317,216,100.00	107.53%
	Jumlah	25,648,275,000.00	26,409,553,752,02	102.97%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

b. Target dan Realisasi Pos Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2005

Pos penerimaan pajak daerah tahun 2005 kontribusi terbesar juga pada pajak penerangan jalan sebesar 17,207,678,928.00 (100.95%), dimana pajak ini diberikan untuk memberikan subsidi pada PLN yang digunakan untuk pemberian penerangan jalan yang berada di kota malang ini. Dan untuk yang paling rendah dalam pemberian kontribusi pada pajak parkir sebesar 396,787,175.00 (100.45%).

Dalam Tahun 2005 ini terjadi kenaikan pada pajak hotel dan restoran setelah diketahui pada tahun 2004 bahwa pajak hotel dan restoran dijadikan satu, tetapi pada tahun 2005 ini pajak hotel dan restoran disendirikan.

Berdasarkan wawancara "Bapak Bowo Soeprasetyo", pada tanggal 11 September 2007 pada pukul 10.00 " beliau mengatakan bahwa pada tahun 2005 ini pajak hotel dan restoran disendirikan karena di daerah kota Malang ini banyak hotel dan restoran, sehingga disini pajak hotel dan restoran disendirikan disini agar memudahkan perhitungan pendapatannya.

Persentase yang paling tinggi di dominasi oleh Pajak Reklame sebesar 122,12% dimana pajak reklame ini meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini daerah kota Malang dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengelola khususnya pajak reklame karena pada tahun 2005 ini pajak tersebut meningkat. Sedangkan yang paling rendah persentasenya pada pajak restoran sebesar 89.71% yang mana target tidak tercapai 100% pada tahun 2005 ini.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang mana menjelaskan pendapatan yang bersumber pada hasil pajak yang berada pada kota Malang ini :

Tabel 4.11
Target dan Realisasi Pos Penerimaan Pajak Daerah
Kota Malang Tahun 2005

No.	Pos Pajak Daerah	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	2,757,000,000.00	2,784,330,664.77	100.99%
2.	Pajak Restoran	6,599,981,250.00	5,921,163,589.60	89.71%
3.	Pajak Hiburan	1,500,000,000.00	1,501,851,075.00	100.12%
4.	Pajak Reklame	1,215,506,250.00	1,484,379,950.00	122,12%
5.	Pajak Penerangan Jalan	17,045,000,000.00	17,207,678,928.00	100.95%
6.	Pajak Parkir	395,000,000.00	396,787,175.00	100.45%
	Jumlah	29,512,487,500.00	29,296,191,381.60	99.27%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

c. Target dan Realisasi Pos Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2006

Perkembangan pos pajak daerah pada tahun 2006 ini mengalami kenaikan dimana dalam Tahun 2006 ini target dinaikkan dan relisasinya juga melebihi target yang ditetapkan. Setiap tahun mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ini selalu mengalami kenaikan dalam pos penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan pajak yang naik. Tetapi disini masing- masing jenis pajak tidak selalu mengalami kenaikan, ada yang jumlah penerimaan pajak turun hal ini dikarenakan oleh potensi daerah yang tidak memungkinkan untuk naiknya penerimaan jenis pajak tersebut. Pajak yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak Penerangan jalan sebesar 18,589,169,105.36 (104.32%). Sedangkan yang memberikan kontribusi terendah pada pajak Parkir sebesar 517,904,376.50 (100.45%).

Sedangkan yang target dan realisasi yang paling tinggi persentasenya pada pajak Reklame sebesar 130.66%, untuk yang paling rendah pada pajak Hiburan sebesar 87.63%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.12
Target dan Realisasi Pos Penerimaan Pajak Daerah
Kota Malang Tahun 2006

No.	Pos Pajak Daerah	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	3,100,000,000.00	3,315,721,013.27	106.96%
2.	Pajak Restoran	6,599,981,250.00	6,653,121,175.41	100.81%
3.	Pajak Hiburan	1,575,000,000.00	1,380,141,329.00	87.63%
4.	Pajak Reklame	1,276,281,552.50	1,667,616,031.67	130.66%
5.	Pajak Penerangan Jalan	17,820,000,000.00	18,589,169,105.36	104.32%
6.	Pajak Parkir	500,000,000.00	517,904,376.50	100.45%
	Jumlah	30,871,262802.50	32,123,673,031.21	104.06%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

d. Perkembangan Kontribusi Pos Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006

Perkembangan penerimaan pos pajak daerah mulai dari tahun 2004 sampai 2006 selalu mengalami kenaikan dilihat mulai dari tahun 2004 bahwa persentase kontribusi yang dicapai pada penerimaan pajak sebesar 28.90%, sedangkan pada tahun 2005 persentase jumlah penerimaan pajak mencapai setengah dari yang ditetapkan yaitu sebesar 50.00%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pajak daerah telah berhasil dalam mengelola potensi yang berada pada kota Malang ini. Untuk tahun 2006 kenaikan pajak hanya mencapai satu persen saja yaitu 51.55%. Hal ini menunjukkan bahwa kota Malang selalu mengalami kenaikan pada pos penerimaan pajak yang berada pada kota Malang ini. Dimana yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2006 persentase kontribusinya sebesar 51.55%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

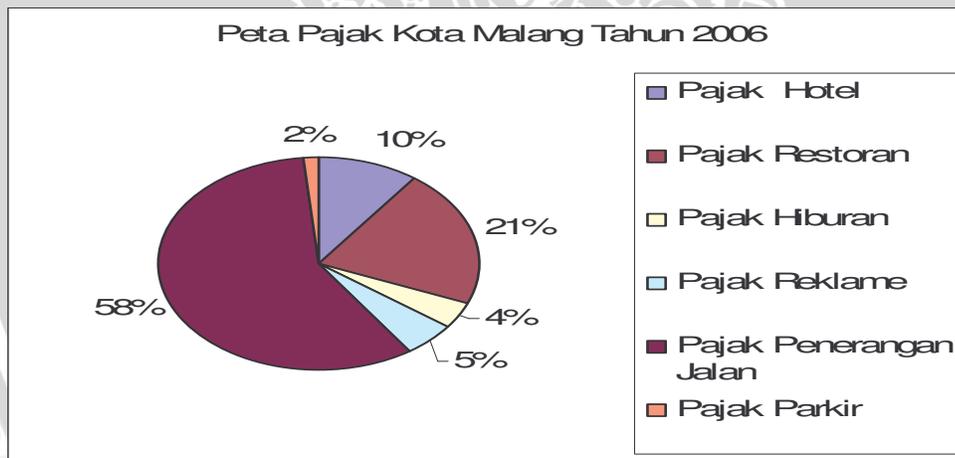
Tabel 4.13
Perkembangan Kontribusi Pos Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang
Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Tahun 2004- 2006

No.	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	% Kontribusi
1.	2004	26,409,533,752.02	91,410,779,615.91	28.90%
2.	2005	29,296,191,381.60	58,740,205,287.71	50.00%
3.	2006	32,123,673,031.21	62,311,313,501.19	51.55%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

Selain dapat dilihat pada tabel diatas, pos pajak daerah juga dapat dilihat pada Peta Pajak Kota Malang Tahun 2006, yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik Pie 2
Peta Pajak Kota Malang Tahun 2006



Dalam grafik diatas dapat dilihat bahwa Pada Tahun 2006 Pajak Daerah kota Malang ditunjukkan dalam Grafik diatas yang mana menunjukkan bahwa pada grafik diatas yang paling tinggi pada pos pajak daerah pada Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 58%, yang mana walaupun pajak penerangan jalan ini tertinggi tetapi pendapatan pajak penerangan jalan tidak masuk pada kas daerah melainkan dipergunakan langsung untuk membiayaia penerangan jalan yang berada pada kota Malang ini. Kemudian pada pajak Restoran sebesar 21%, Pajak Hotel 10%, Pajak Reklame 5%, Pajak Hiburan 4%, dan Pajak Parkir 2%.

3. Perkembangan Retribusi Daerah

Salah satu pendapatan asli daerah juga bersumber pada Retribusi daerah. Dalam Retribusi daerah juga terdiri dari bermacam- macam retribusinya. Yang mana retribusi tersebut dapat mendukung perolehan pendapatan daerah yang mana dapat mendukung kemandirian fiskal yang berada pada kota Malang.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala TU dinas pendapatan pada tanggal 10 September 2007 pada pukul 10.00 "Bapak Bowo Soeprasetyo" mengatakan bahwa salah satu pendapatan daerah juga bersumber pada retribusi dimana dalam retribusi tersebut lebih banyak daripada jumlah pajak. Pajak hanya terdiri dari enam jenis saja, tetapi retribusi disini terdiri dari bermacam- macam jenisnya.

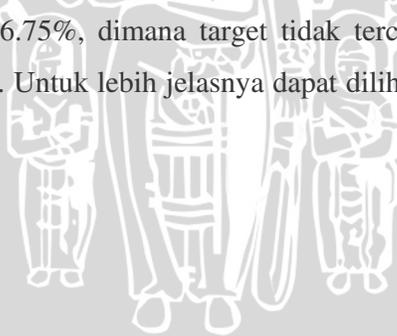
Retribusi yang mendominasi pada tahun 2006 yaitu retribusi pada Retribusi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yaitu sebesar 5,191,789,368.00 (101.72%). Hal ini dalam pendirian bangunan juga terdapat ijinnya yang mana retribusinya akan juga digunakan oleh pemerintah daerah kota malang untuk pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Retribusi ini juga berguna untuk mendukung kemandirian fiskal yang mana dapat mengethui kemampuan daeah sebesar mana dalam mengupayakan daerahnya dapat mandiri setelah adanya Otonomi daerah. Sedangkan Retribusi yang target dan realisasinya yang paling tinggi pada tahun 2006 didominasi oleh retribusi pelayanan pemakaman persentasenya sebesar 197.02%.

Pada dasarnya pungutan Retribusi yang berada pada kota Malang ini sesuai Peraturan daerah yang ada berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, dimana dalam pungutan Retribusi yang berada pada kota Malang ini ditangani oleh masing-masing dinas penghasil yang berada pada kota Malang ini yang kemudian disetorkan kepada Dinas Pendapatan. Misalnya saja pada Retribusi Pelayanan Kesehatan ditangani oleh Dinas Kesehatan yang kemudian retribusinya disetorkan kepada Dinas Pendapatan, Retribusi Penggantian biaya cetak KTP dan Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil ditangani oleh Dinas Perijinan dalam dimana pemungutan Retribusi pada Dinas Perijinan berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk, Retribusi Pelayanan Parkir ditangani oleh Dinas Perhubungan, Retribusi Pelayanan Pasar ditangani oleh Dinas Pasar, Retribusi Perindustrian dan

Pedagangan koperasi ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Retribusi Ketenagakerjaan ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan, Retribusi Pariwisata ditangani oleh Dinas Pariwisata, dll Retribusi yang berada pada kota Malang ditangani oleh masing-masing Dinas Penghasil yang berada di kota Malang ini yang kemudian Retribusinya disetorkan kepada Dinas Pendapatan yang berada di Kota Malang ini dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku di kota Malang ini.

a. Target dan Realisasi Pos Penerimaan Retribusi Daerah Kota Malang Tahun 2004

Pos Retribusi daerah disini yang paling tinggi pendapatannya pada tahun 2004 ini adalah pada Retribusi Uang Sampedan dan ijin bangunan sebesar 3,328,543,525.00 (115.57%). Dan yang memberikan kontribusi yang paling sedikit pada Retribusi Pariwisata sebesar 9,350,000.00 (46.75%) yang jauh dari target yang telah ditetapkan, dan pada tahun 2004 terdapat jenis retribusi yaitu: pada Retribusi penyelenggaraan kebersihan, Retribusi stasiun/ bus terminal, Pasar, Retribusi Ijin gangguan, Penerimaan dari catatan sipil/ biaya cetak KTP dan retribusi lainnya. Untuk pencapaian target dan realisasi yang paling tinggi persentasenya pada retribusi SIUJK sebesar 201.95%, dan yang paling rendah pada retribusi pariwisata 46.75%, dimana target tidak tercapai hampir setengah dari target yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.14
Target dan Realisasi Pos Penerimaan Retribusi Daerah
Kota Malang Tahun 2004

No.	Pos Retribusi Daerah	Target	Realisasi	%
1.	Sewa tanah dan bangunan/ kekayaan daerah	1,552,500,000.00	1,466,680,203.80	94.47%
2.	Uang Sampedan dan ijin bangunan	2,880,000,000.00	3,328,543,525.00	115.57%
3.	Uang penguburan	16,600,000.00	21,109,000.00	127.16%
4.	Retribusi stasiun/ bus terminal	2,675,000,000.00	2,182,195,900.00	81.58%
5.	Rumah sakit dan balai pengobatan	805,000,000.00	577,553,680.00	71.75%
6.	Pasar	1,901,287,300.00	1,973,206,350.00	103.78%
7.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	560,000,000.00	563,117,500.00	100.56%
8.	Penerimaan dari catatan sipil/ biaya cetak KTP	609,501,000.00	523,380,000.00	85.87%
9.	Retribusi penyelenggaraan kebersihan	3,100,000,000.00	2,597,079,200.00	83.78%
10.	Pemeriksaan alat pemadam	9,000,000.00	9,036,000.00	100.40%
11.	Retribusi tempat parkir/ parkir tepi jalan umum	696,000,000.00	700,434,200.00	101.51%
12.	Retribusi tempat olahraga/ Rekreasi	242,000,000.00	269,374,537.50	111.31%
13.	Retribusi Ijin Trayek	66,750,000.00	66,930,000.00	100.27%
14.	Retribusi Ijin gangguan	550,000,000.00	916,616,310.00	166.66%
15.	Retribusi perindustrian dan perdagangan	52,500,000.00	102,195,895.00	194.66%
16.	Retribusi Ketenagaan Kerja	40,000,000.00	18,770,000.00	46.93%
17.	Retribusi Pariwisata	20,000,000.00	9,350,000.00	46.75%
18.	SIUJK	41,000,000.00	82,800,000.00	201.95%
	Jumlah	15,811,138300.00	15,408,372,301.30	97.45%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

b. Target dan Realisasi Pos Penerimaan Retribusi Daerah Kota Malang Tahun 2005

Perkembangan pos penerimaan Retribusi pada tahun 2005 ini jenis retribusi yang memberikan kontribusi terbesar adalah pada Retribusi IMB, sebesar 3,604,154,420.00,(97.41%). Walaupun retribusi IMB ini pada tahun 2005 yang paling tinggi tetapi Retribusi IMB ini tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,700,000,000.00. Karena hanya Retribusi IMB tidak selalu mengalami pencapaian target yang sempurna hal ini disebabkan baik dari faktor internal maupun eksternal yang ada. Sehingga disini dapat diketahui bahwa retribusi tidak selalu mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Retribusi yang meberikan kontribusi yang paling rendah pada kontribusi Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar 10,097,000.00 (100.97%). Walaupun target telah memenuhi tetapi kontribusi dalam penerimaan retribusi masih rendah.

Pencapaian target dan realisasi yang paling tinggi pada Retribusi perindustrian dan perdagangan dan koperasi sebesar 139.30%, pencapaian melebihi target yang telah ditetapkan. Dan yang paling rendah persentasenya pada Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 74.59%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yang mana dapat diketahui berbagai jenis retribusi yang mengalami peningkatan atau penurunan terhadap target yang telah ditetapkan.

Tabel 4.15
Target dan Realisasi Pos Penerimaan Retribusi Daerah
Kota Malang Tahun 2005

No.	Pos Retribusi Daerah	Target	Realisasi	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	805,000,000.00	600,456,060.00	74.59%
2.	Retribusi Pelayanan Pesampahan/Kebersihan	3,300,000,000.00	2,746,454,500.00	83.23%
3.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP	500,000,000.00	502,472,000.00	100.49%
4.	Retribusi Penggantian Biaya cetak akta catatan sipil	175,000,000.00	193,620,000.00	110.64%
5.	Retribusi Pelayanan Pemakaman	20,000,000.00	23,507,500.00	117.54%
6.	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	765,000,000.00	766,723,000.00	100.23%
7.	Retribusi pelayanan pasar	2,275,000,000.00	2,275,659,300.00	100.56%
8.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	610,000,000.00	615,624,000.00	100.92%
9.	Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran	10,000,000.00	10,097,000.00	100.97%
10.	Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	1,351,976,000.00	1,388,060,785.00	100.40%
11.	Retribusi jasa usaha tempat terminal	1,983,000,000.00	1,842,827,250.00	92.93%
12.	Retribusi tempat rekreasi/ olahraga	354,000,000.00	377,872,873.55	106.74%
13.	Retribusi IMB	3,700,000,000.00	3,604,154,420.00	97.41%
14.	Retribusi ijin gangguan	950,000,000.00	836,185,770.00	88.02%
15.	Retribusi ijin trayek	66,750,000.00	66,780,000.00	100.04%
16.	Retribusi perindustrian dan perdagangan dan koperasi	65,000,000.00	90,544,696.00	139.30%
17.	Retribusi ketenagakerjaan	30,000,000.00	31,020,000.00	103.40%
18.	Retribusi Pariwisata	25,000,000.00	25,461,800.00	101.85%
19.	Retribusi SIUJK	75,000,000.00	95,550,000.00	127.40%
	Jumlah	17,060,726,000.00	16,093,070,954.55	94.33%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

c. Target dan Realisasi Pos Penerimaan Retribusi Daerah Kota Malang Tahun 2006

Pos penerimaan Retribusi kota Malang ini pada Tahun 2006 ini yang mendominasi dalam memberikan kontribusinya adalah pada pos Retribusi Retribusi IMB, yang mana pada setiap tahun selalu pada retribusi IMB tersebut. Pada Retribusi IMB tersebut diketahui pada penetapan targetnya sebesar 5,104,019,440.00 dan pencapaiannya sebesar 5,191,789,368.00 (101.72%). Dimana disini dapat diketahui pada tahun 2005 walaupun Retribusi IMB yang paling tinggi tetapi tidak mengalami pencapaian targetnya, pada tahun 2006 ini pencapaian target pada retribusi IMB ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi, walaupun penetapan target ini tinggi pencapaian targetnya dapat juga terlaksana. Sehingga Pada tahun 2006 ini penetapan target naik dan pencapaian targetnya juga sudah memenuhi. Sedangkan yang paling rendah dalam pemberian kontribusinya pada Retribusi ketenagakerjaan sebesar 31,565,000.00 (101.82%) dan target dan realisasi yang mencapai persentase yang paling tinggi pada Retribusi Pelayanan Pemakaman sebesar 197.02%, yang paling rendah persentasenya pada Retribusi jasa usaha tempat terminal sebesar 77.05% yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.16
Target dan Realisasi Pos Penerimaan Retribusi Daerah
Kota Malang Tahun 2006

No.	Pos Retribusi Daerah	Target	Realisasi	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	908,997,340.00	981,824,090.00	108.01%
2.	Retribusi Pelayanan Pesampahan/Kebersihan	3,325,000,000.00	2,629,444,500.00	79.08%
3.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP	762,500,000.00	839,634,000.00	110.12%
4.	Retribusi Penggantian Biaya cetak akta catatan sipil	244,000,000.00	198,495,000.00	81.35%
5.	Retribusi Pelayanan Pemakaman	22,000,000.00	43,344,000.00	197.02%
6.	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	900,000,000.00	901,107,500.00	100.12%
7.	Retribusi pelayanan pasar	2,350,000,000.00	2,350,258,550.00	100.01%
8.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	715,000,000.00	717,282,000.00	100.32%
9.	Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran	10,000,000.00	10,110,000.00	101.10%
10.	Retribusi jasa usahapemakaian kekayaan daerah	1,305,976,000.00	1,356,901,450.00	103.90%
11.	Retribusi jasa usaha tempat terminal	2,012,487,200.00	1,550,561,400.00	77.05%
12.	Retribusi tempat rekreasi/ olahraga	95,105,000.00	97,203,367.50	102.21%
13.	Retribusi IMB	5,104,019,440.00	5,191,789,368.00	101.72%
14.	Retribusi ijin gangguan	800,000,000.00	849,603,350.00	106.20%
15.	Retribusi ijin trayek	66,750,000.00	83,160,000.00	124.58%
16.	Retribusi perindustrian dan perdagangan dan koperasi	72,000,000.00	65,100,000.00	90.42%
17.	Retribusi ketenagakerjaan	31,000,000.00	31,565,000.00	101.82%
18.	Retribusi Pariwisata	32,000,000.00	32,768,700.00	102.40%
19.	Retribusi SIUJK	80,000,000.00	94,850,000.00	118.58%
	Jumlah	18,836,834,980.00	18,025,002,257.50	95.69%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

d. Perkembangan Kontribusi Pos Penerimaan Retribusi Daerah Kota Malang Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006

Setelah mengetahui pada perkembangan retribusi mulai dari tahun 2004-2006 yang paling tinggi yang memberikan kontribusi pada Retribusi IMB, maka dapat diketahui mulai dari tahun 2004 sampai 2006, Pos Retribusi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun pada tahun 2004 persentase kontribusi pos retribusi mencapai 16.85% (15,408,372,301.30), pada tahun 2005 mencapai 29.04% (17,060,726,000.00), dan tahun 2006 mencapai 30.23% (18,836,834,980.00). Setelah diketahui bahwa pada tahun 2004 sampai 2006 selalu mengalami kenaikan maka disini potensi yang berada pada kota Malang sudah membaik dari tahun ketahun, dan realisasi retribusi daerah mulai dari tahun 2004 sampai 2006 selalu meningkat dan hal tersebut dapat membantu penerimaan daerah kota Malang yang dilihat pada pencapaian targetnya lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.17

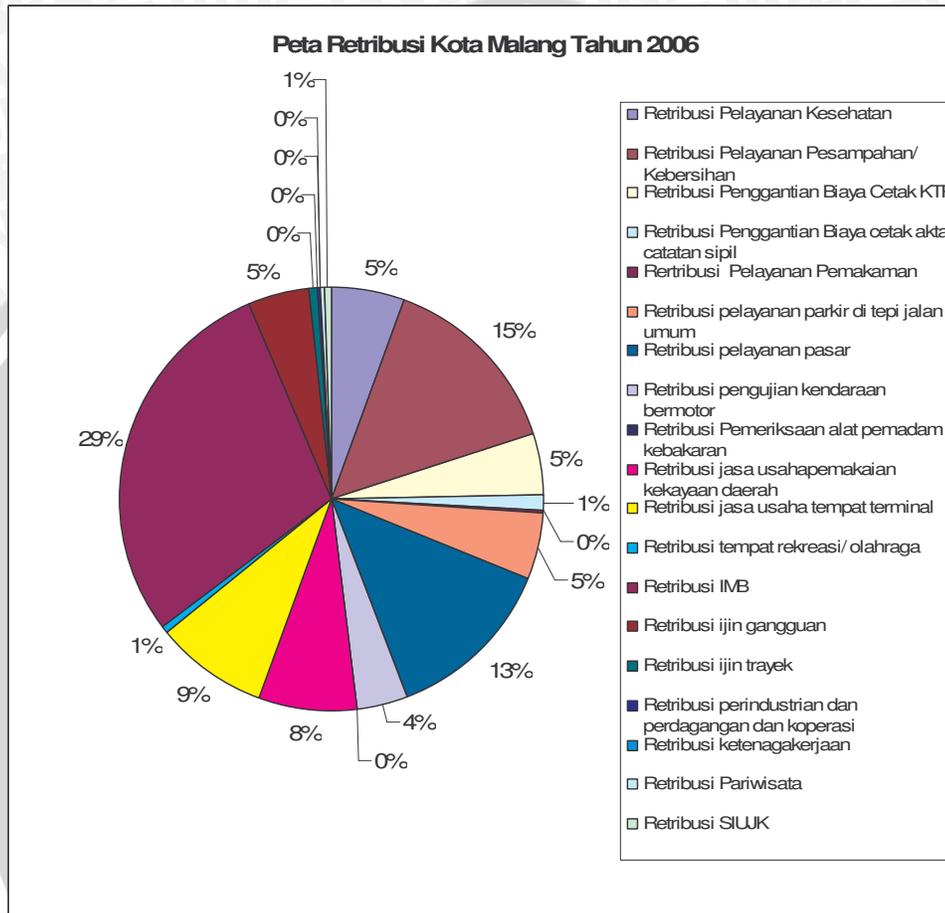
Perkembangan Kontribusi Pos Penerimaan Retribusi Daerah Kota Malang Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006

No.	Tahun	Realisasi Daerah	Retribusi	Realisasi PAD	% Kontribusi
1.	2004	15,408,372,301.30		91,410,779,615.91	16.85%
2.	2005	17,060,726,000.00		58,740,205,287.71	29.04%
3.	2006	18,836,834,980.00		62,311,313,501.19	30.23%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

Pada Retribusi daerah pada Tahun 2006 dapat digambarkan Peta Retribusi Tahun 2006 yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik Pie 3
Peta Retribusi Kota Malang Tahun 2006



Pada Grafik diatas menunjukkan bahwa yang memberikan kontribusi tertinggi pada Retribusi IMB sebesar 29%, Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 15%, Retribusi Pelayanan pasar sebesar 13% dan untuk Retribusi yang lain persentasenya dibawah 10%. Sehingga disini yang memberikan pemasukkan tertinggi pada grafik diatas terlihat bahwa Retribusi IMB yang paling mendominasi untuk tahun 2006. Dimana banyaknya lahan yang berada dikota Malang ini dirubah menjadi area perumahan, yang menambah pemasukkan daerah kota Malang ini.

4. Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah

Bagian Laba Usaha Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil Perusahaan milik daerah dari hasil daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari BPD, Perusahaan Daerah, Dividen BPR-BPK, dan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga. Bagian Laba Usaha Daerah dimiliki oleh setiap masing-masing daerah yang mana BUMD memiliki hasil atau pendapatan yang sebagian hasil dari BUMD wajib diserahkan kepada pemerintahan daerah. Dimana dalam menyerahkan laba daerah ditetapkan peraturan-perturan yang berlaku yang ada pada daerah masing-masing dimana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ada pada kota Malang.

Salah satu yang mendominasi untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Pada Perusahaan Daerah Air Minum. Untuk menyerahkan hasil BUMD kepada daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1984 tanggal 30 Januari 1984 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala TU dinas pendapatan pada tanggal 10 September 2007 pada pukul 10.00 "Bapak Bowo Soeprasetyo" mengatakan bahwa Salah satu Bagian Laba BUMD kota Malang yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang mana memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. BUMD Perusahaan Daerah Air Minum tersebut memiliki potensi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tetapi jika dilihat dari target dan realisasinya dalam persentase maka setiap tahun persentase yang besar selalu didominasi oleh Bank Perkreditan Rakyat. Oleh karena itu pemerintah kota Malang harus dapat menggali potensi yang baik untuk menghasilkan atau menambah penerimaan yang berada di daerah ini.

a. Target dan Realisasi Pos Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang Tahun 2004

Perkembangan Pos Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang Tahun 2004 terdiri dari tiga BUMD yang dimiliki oleh kota Malang ini yang mana terdiri dari : Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Air Minum, Rumah Potong Hewan. Dalam Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang Tahun 2004 yang paling tinggi memberikan kontribusi adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang mana targetnya sebesar 3,815,000,000.00 dan pencapaiannya sama dengan target yang ditetapkan, sehingga disini PDAM mencapai 100.00% dalam

pencapaian targetnya. PDAM disini dapat diketahui bahwa BUMD yang banyak melayani masyarakat kota Malang dalam pemberian pelayanan air minum dimana diketahui bahwa potensi yang disediakan oleh PDAM baik yang mana dapat mencapai target yang ditetapkan. Dan untuk target dan realisasi yang mencapai persentase tertinggi pada Bank Perkreditan Rakyat sebesar 115. 61 % dan untuk persentase terendah pada BUMD Rumah Potong Hewan yakni sebesar 99.50%, Untuk itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.18
Target dan Realisasi Pos Bagian Laba BUMD Kota Malang
Tahun 2004

No.	Pos Bagian Laba BUMD	Target	Realisasi	%
1.	Bank Perkreditan Rakyat	41,000,000.00	47,402,000.00	115.61%
2.	Perusahaan Daerah Air Minum	3,815,000,000.00	3,815,000,000.00	100.00%
3.	Rumah Potong Hewan	75,375,000.00	75,000,000.00	99.50%
	Jumlah	3,931,375,000.00	3,937,402,000.00	100.15%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

b. Target dan Realisasi Pos Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang Tahun 2005

Pada Tahun 2005 ini yang paling mendominasi dalam memberikan kontribusinya juga terdapat pada PDAM yang mencapai target sebesar 5,733,758,467.00 (100.00%), yang mana tahun 2005 ini target yang ditetapkan naik dari tahun 2004. Pada tahun 2004 hanya terdapat tiga BUMD tetapi pada tahun 2005 ini terdapat empat jenis BUMD yang terdiri dari : Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Air Minum, Rumah Potong Hewan dan ditambah lagi dengan Devien Saham Bank Jatim. Sedangkan untuk target dan realisasi pencapaian persentase yang paling tinggi pada Bank Perkreditan Rakyat sebesar

115.73% ,dimana banyak masyarakat yang meminjam uang untuk kebutuhannya. Dimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.19
Target dan Realisasi Pos Bagian Laba BUMD Kota Malang
Tahun 2005

No.	Pos Bagian Laba BUMD	Target	Realisasi	%
1.	Bank Perkreditan Rakyat	47,500,000.00	54,972,850.00	115.73%
2.	Perusahaan Daerah Air Minum	5,733,750,000.00	5,733,758,467.00	100.00%
3.	Rumah Potong Hewan	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00%
4.	Devien Saham Bank Jatim	297,952,000.00	297,951,818,70	100.00%
	Jumlah	6,154,202,000.00	6,161,683,135.70	100,12%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

c. Target dan Realisasi Pos Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang Tahun 2006

Pada tahun 2006 BUMD yang paling tinggi memberikan kontribusinya yaitu pada PDAM juga yaitu sebesar 6,048,196,589.00 (100.00%), yang mana pada setiap tahun selalu terjadi peningkatan target yang ditepkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang ini, untuk target dan realisasi yang memberikan persentase yang tertinggi pada BUMD Bank Perkreditan Rakyat sebesar 103.33% yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.20
Target dan Realisasi Pos Bagian Laba BUMD Kota Malang
Tahun 2006

No.	Pos Bagian Laba BUMD	Target	Realisasi	%
1.	Bank Perkreditan Rakyat	47,500,000.00	49,062,000.00	103.33%
2.	Perusahaan Daerah Air Minum	6,048,196,589.00	6,048,196,589.00	100.00%
3.	Rumah Potong Hewan	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00%
4.	Devien Saham Bank Jatim	297,952,000.00	299,471,563.01	100.51%
	Jumlah	6,468,648,589.00	6,471,750,152.01	100.05%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

d. Perkembangan Kontribusi Pos Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2004-2006.

Perkembangan Pos Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang mulai dari tahun 2004- 2006 mengalami kenaikan terus yang mana pada Perusahaan Daerah Minum yang selalu memberikan kontribusi tertinggi dan persentase yang paling tinggi mulai dari tahun 2004- 2006 adalah Bank Perkreditan Rakyat. Pada tahun 2004 persentase BUMD mencapai 4.03% (3,937,402,000.00) tahun 2005 sebesar 10.05% (6,161,683,135.70) dan pada tahun 2006 sebesar 10.39% (6,471,750,152.01). Sehingga disini dapat diketahui bahwa BUMD kota Malang selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa BUMD kota Malang harus selalu meningkatkan potensi yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.21
Perkembangan Kontribusi Pos Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006

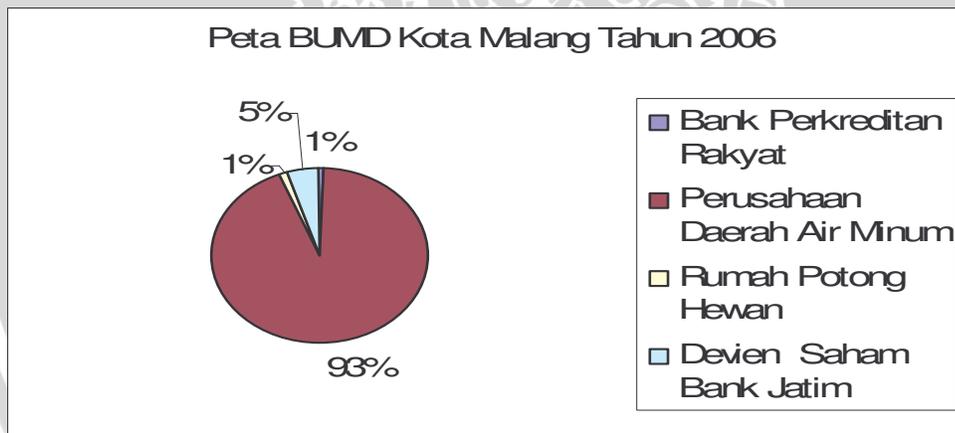
No.	Tahun	Realisasi Bagian Laba BUMD	Realisasi PAD	% Kontribusi
1.	2004	3,937,402,000.00	91,410,779,615.91	4.30%
2.	2005	6,161,683,135.70	58,740,205,287.71	10.05%
3.	2006	6,471,750,152.01	62,311,313,501.19	10.39%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

Perkembangan BUMD kota Malang Pada Tahun 2006 dapat digambarkan pada grafik dibawah ini :

Grafik Pie 4

Peta BUMD Kota Malang Tahun 2006



Pada Grafik diatas diketahui bahwa yang memberikan kontribusi yang terbesar pada Tahun 2006 ini adalah PDAM yang sebesar 93%, kemudian Bank Perkreditan rakyat sebesar 5%, Rumah Potong Hewan dan Deviden Saham Bank Jatim yang masing- masing sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kota Malang banyak menggunakan jasa PDAM.

5. Perkembangan lain-lain pendapatan yang syah yang berada di kota Malang

Berdasarkan wawancara Kepala TU dinas pendapatan pada tanggal 10 September 2007 pada pukul 10.00 "Bapak Bowo Soeprasetyo" mengatakan Lain-

lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari:

- (a) Hasil penjualan barang milik daerah, contohnya penjualan drum bekas aspal, penjualan pohon ayoman.
- (b) Penerimaan jasa giro.

Penerimaan lain-lain yang syah terdiri dari banyak aspek yang mana setiap aspek memiliki potensi- potensi yang berbeda.

Dalam Perkembangan lain-lain pendapatan yang syah yang berada di kota Malang pada tahun 2006 persentase yang tertinggi pada penerimaan lain- lain sebesar 167.69 % dan yang memberikan kontribusi tertinggi pada penerimaan Bunga Deposito sebesar 1,906,952,054.65 (146.69%). Agar pendapatan atau penerimaan kota Malang dapat bertambah maka diperlukan akan kesadaran masyarakat dan pihak pengelola keuangan daerah yang saling mendukung dalam meningkatkan pendapatan daerah kota Malang ini.

a. Target dan Realisasi Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah Kota Malang Tahun 2004

Pada Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah Kota Malang Tahun 2004 terdiri dari tiga macam yaitu : Penerimaan Deviden dari BPD Jatim, Jasa Penggunaan Dana Pemda dari BPD/ Jasa Giro, dan Penerimaan lain-lain, dimana yang paling tinggi dalam memberikan kontribusinya dan target dan realisasinya dalam persentase juga pada penerimaan lain –lain yang pencapaian targetnya sebesar 2,456,370,980.00 (165.13%), untuk yang paling rendah dalam pemberian kontribusi dan target dan realisasi dalam persentasenya juga pada Penerimaan Deviden dari BPD Jatim sebesar 211,513,570.20 (52.88%) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.22
Target dan Realisasi Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah
Kota Malang Tahun 2004

No.	Pos Lain- Lain PAD Yang Syah	Target	Realisasi	%
1.	Penerimaan Deviden dari BPD Jatim	400,000,000.00	211,513,570.20	52.88%
2.	Jasa Penggunaan Dana Pemda dari BPD/ Jasa Giro	2,250,000,000.00	1,534,112,500.39	70.41%
3.	Penerimaan lain-lain	1,487,500,000.00	2,456,370,980.00	165.13%
	Jumlah	4,137,500,000.00	4,251,997,050.59	102.77%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

b. Target dan Realisasi Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah Kota Malang Tahun 2005

Pada perkembangan Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah Kota Malang Tahun 2005 terdiri dari tiga macam yaitu : Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito , dan Penerimaan lain-lain, dimana yang paling tinggi kontribusinya di dominasi oleh penerimaan lain –lain yang pencapaiannya sebesar, 4,649,843,947.00 dalam penerimaan lain- lain ini turun dalam pencapaian targetnya yang mana target yang ditetapkan sebesar 4,987,500,000.00, sehingga target hanya mencapai 93.23% sedangkan dalam target dan realisasi persentase yang besar pada Penerimaan Jasa Giro sebesar 122.46% yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.23
Target dan Realisasi Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah
Kota Malang Tahun 2005

No.	Pos Lain- Lain PAD Yang Syah	Target	Realisasi	%
1.	Penerimaan Jasa Giro	1,100,000,000.00	1,347,018,608.75	122.46%
2.	Penerimaan Bunga Deposito	1,250,000,000.00	1,192,397,260.11	95.39%
3.	Penerimaan Lain-lain	4,987,500,000.00	4,649,843,947.00	93.23%
	Jumlah	7,337,500,000.00	7,189,259,815.86	97.98%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

c. Target dan Realisasi Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah Kota Malang Tahun 2006

Pada perkembangan Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah Kota Malang Tahun 2006 terdiri dari tiga macam yang sama jenisnya dengan tahun 2005, dimana yang paling tinggi kontribusinya di dominasi oleh penerimaan Bunga Deposito yang pencapaian targetnya sebesar 1,906,952,054.65, dalam penerimaan Bunga Deposito ini sangat naik dari targetnya yang mana target yang ditetapkan sebesar, 1,300,000,000.00 sehingga target mencapai 146.69% dan untuk target dan realisasi yang persentasenya yang paling besar dicapai pada Penerimaan Lain-lain 167.69% yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.24
Target dan Realisasi Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah
Kota Malang Tahun 2006

No.	Pos Lain- Lain PAD Yang Syah	Target	Realisasi	%
1.	Penerimaan Jasa Giro	1,389,000,000.00	1,897,373,847.82	136.60%
2.	Penerimaan Bunga Deposito	1,300,000,000.00	1,906,952,054.65	146.69%
3.	Penerimaan Lain-lain	1,125,000,000.00	1,886,562,140.00	167.69%
	Jumlah	3,814,000,000.00	5,690,888,042.47	149.21%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

d. Perkembangan Kontribusi Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah Kota Malang Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006

Perkembangan pos Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah Kota Malang mulai dari tahun 2004- 2006 ini selalu mengalami kenaikan walaupun pada tahun 2005 ini tidak mencapai target yang ditetapkan, penerimaan lain- lain yang paling tinggi dalam perolehan pendapatannya. Pada tahun 2004 persentase kontribusinya pada pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah sebesar 4.52% (4,137,500,000.00), tahun 2005 persentase kontribusinya sebesar 12.20% (7,189,259,815.86) walaupun target yang telah ditetapkan tidak tercapai tetapi kontribusi yang paling besar terdapat pada tahun 2005, dan tahun 2006 persentase kontribusinya sebesar 9.13% (5,690,888,042.47), dimana pada tahun 2006 ini penerimaan lain- lain turun dikarenakan potensi-potensi yang berada pada kota Malang ini tidak mendukung yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.25
Perkembangan Kontribusi Pos Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Syah Kota Malang Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Malang Tahun 2004- 2006

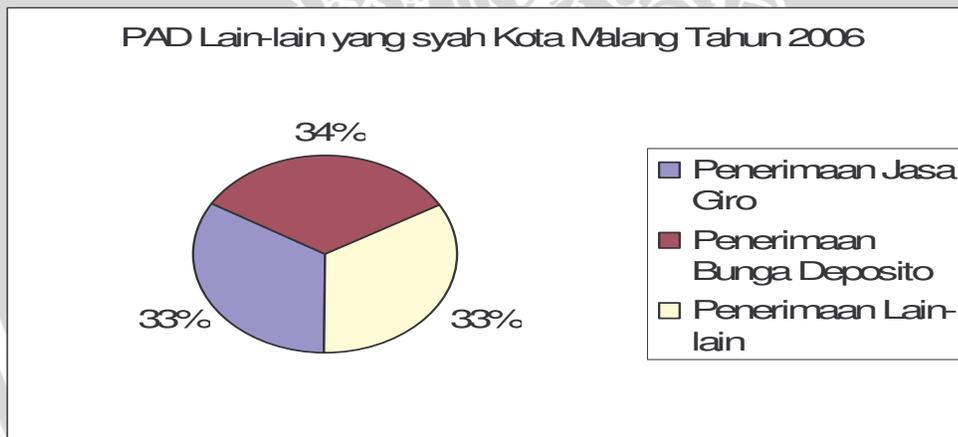
No.	Tahun	Realisasi Pos Penerimaan lain-lain Daerah	Realisasi PAD	% Kontribusi
1.	2004	4,137,500,000.00	91,410,779,615.91	4.52%
2.	2005	7,189,259,815.86	58,740,205,287.71	12.20%
3.	2006	5,690,888,042.47	62,311,313,501.19	9.13%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

Pada Tahun 2006 pada Pos PAD lain-lain yang syah kota Malang dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik Pie 5

Peta PAD Lain-lain yang syah Kota Malang Tahun 2006



Pada Perkembangan Peta PAD lain-lain yang syah kota Malang yang tertinggi memberikan kontribusi pada Penerimaan lain-lain sebesar 34%, kemudian Penerimaan bunga deposito dan Penerimaan Jasa Giro yang masing-masing sebesar 33%.

6. Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Malang dilihat dari tahun 2004-2006

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada

daerah untuk membiayai daerah. Dana Perimbangan dipisahkan menjadi lima jenis, yaitu:

- a. Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
- b. Perkembangan Dana Alokasi Umum
- c. Perkembangan Dana Alokasi Khusus
- d. Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi

Dana Perimbangan disini berfungsi juga untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ada pada kota Malang. Oleh karena itu dana perimbangan juga akan menutupi kekurangan kekurangan pengeluaran yang disebabkan oleh belanja pemerintah.

a). Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak

a. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kota Malang Tahun 2004

Pada tahun 2004 ini Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari tiga jenis yaitu : PBB , BPHTB , Bagi Hasil PPH Pasal 21, yang paling tinggi memberikan kontribusi di dominasi oleh Dana Bagi Hasil Pajak PBB yang pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 17,115,790,595.00 (122.26%) dan untuk target dan realisasi persentasenya yang paling tinggi didominasi oleh BPHTB sebesar 138.88% dan yang paling rendah baik kontribusinya maupun target dan realisasi persentasenya yaitu pada Bagi Hasil PPH Pasal 21 sebesar 11,186,813,983.00 (90.07%) , yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.26

Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kota Malang Tahun 2004

No.	Dana Bagi Hasil Pajak	Target	Realisasi	%
1.	PBB	14,000,000,000.00	17,115,790,595.00	122.26%
2.	BPHTB	8,900,000,000.00	12,360,176,212.00	138.88%
3.	Bagi Hasil PPH Pasal 21	12,420,018,168.00	11,186,813,983.00	90.07%
	Jumlah	35,320,018,168.00	40,662,780,790.00	115.13%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

b. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kota Malang Tahun 2005

Pada tahun 2005 ini Dana Bagi Hasil Pajak yang paling tinggi memberikan kontribusi juga terdapat pada dana bagi hasil pajak PBB yaitu sebesar 17,920,811,313.00 (105.42%). Dan untuk target dan realisasi persentase yang paling besar pada BPHTB sebesar 112.29%, untuk yang paling rendah baik dari kontribusi maupun dari target dan realisasi persentasenya juga pada Bagi Hasil PPH Pasal 21 sebesar 10,455,512,338.00 (77.91%). Dimana pemerintah kota Malang ini juga memperoleh bantuan dari pemerintah pusat. Dana bagi hasil pajak kota Malang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.27

**Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kota Malang
Tahun 2005**

No.	Dana Bagi Hasil Pajak	Target	Realisasi	%
1.	PBB	17,000,000,000.00	17,920,811,313.00	105.42%
2.	BPHTB	12,359,949,756.00	13,878,929,461.00	112.29%
3.	Bagi Hasil PPH Pasal 21	13,420,018,168.00	10,455,512,338.00	77.91%
	Jumlah	42,779,967,924.00	42,225,253,112.00	98.77%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

c. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kota Malang Tahun 2006

Pada tahun 2006 ini Dana Bagi Hasil Pajak yang paling tinggi memberikan kontribusi dan target maupun realisasi persentasenya, juga terdapat pada dana bagi hasil pajak PBB yaitu sebesar 22,007,780,722.00 (123.45%). Untuk yang paling rendah baik kontribusi maupun target dan realisasi persentasenya juga terdapat pada Bagi Hasil PPH Pasal 21 sebesar 9,280,770,195.00 (87.58%) dimana pada tahun 2006 ini pencapaiannya sangat tinggi dari target yang telah ditetapkan. Yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.28
Perkembangan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kota Malang
Tahun 2006

No.	Dana Bagi Hasil Pajak	Target	Realisasi	%
1.	PBB	17,827,702,776.00	22,007,780,722.00	123.45%
2.	BPHTB	12,359,949,750.00	13,184,413,277.00	106.67%
3.	Bagi Hasil PPH Pasal 21	10,599,459,073.00	9,280,770,195.00	87.58%
	Jumlah	40,787,111,599.00	44,474,964,194.00	109.04%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

d. Perkembangan Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006

Perkembangan Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak mulai tahun 2004 sampai 2006 terhadap realisasi pendapatan kota Malang pada tahun 2004 persentase kontribusi mencapai 11.53% (40,662,780,790.00) , untuk tahun 2005 persentase kontribusi mencapai 10.27% (42,255,253,112.00), dan tahun 2006 sebesar 8.14% (44,474,964,194.00) dimana Dana Bagi Hasil Pajak Kota Malang setiap tahunnya selalu meningkat. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.29
Perkembangan Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Kota Malang Terhadap
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Tahun 2004- 2006

No.	Tahun	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak	Realisasi TPD	% Kontribusi
1.	2004	40,662,780,790.00	352,644,052,593.13	11.53%
2.	2005	42,255,253,112.00	411,346,670,316.71	10.27%
3.	2006	44,474,964,194.00	546,181,303,088.43	8.14%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

b). Perkembangan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

a. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang Tahun 2004

Pada Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2004 ini terdiri dari lima jenis dana bagi hasil bukan pajak yaitu : Iuran Hasil Pengusahaan Hutan/ Provinsi SD. Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan, Minyak Bumi, dan Gas Alam, dalam dana bagi hasil bukan pajak disini yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam penerimaannya pada Iuran Hasil Pengusahaan Hutan/ Provinsi SD. Hutan pencapaiannya sebesar 350,898,184.00, (118.92%) melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 295,082,270.00, untuk yang paling rendah terdapat pada Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi sebesar 1,802,658.00 (60.09%), sedangkan untuk target dan realisasi persentase yang paling tinggi pada Pungutan Pengusahaan Perikanan sebesar 247.66%, untuk yang paling rendah pada Gas Alam sebesar 13.57% dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.30

Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang Tahun 2004

No.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Target	Realisasi	%
1.	Iuran Hasil Pengusahaan Hutan/ Provinsi SD. Hutan	295,082,270.00	350,898,184.00	118.92%
2.	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi	3,000,000.00	1,802,658.00	60.09%
3.	Pungutan Pengusahaan Perikanan	106,674,608.00	264,195,391.00	247.66%
4.	Minyak Bumi	194,000,000.00	107,237,575.00	55.28%
5.	Gas Alam	122,000,000.00	16,559,914.00	13.57%
	Jumlah	720,756,878.00	740,693,722.00	102.77%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

b. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang Tahun 2005

Pada Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2005 ini terdiri dari lima jenis dana bagi hasil bukan pajak yaitu : Iuran Hasil Pengusahaan Hutan/ Provinsi SD. Hutan, Pungutan Pengusahaan Perikanan, Minyak Bumi, dan Gas Alam, dan Iuran Eksploitasi, dimana dalam iuran eksploitasi ini terdapat target yang ditetapkan namun pencapaiannya tidak ada, dalam dana bagi hasil bukan pajak disini yang paling tinggi penerimaannya dan target maupun realisasi persentasenya pada Pungutan Pengusahaan Perikanan pencapaiannya sebesar 318,317,098.00 (298.40%), melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 106,674,608.00 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.31

**Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang
Tahun 2005**

No.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Target	Realisasi	%
1.	Iuran Hasil Pengusahaan Hutan/ Provinsi SD. Hutan	295,082,270.00	39,822,280.00	13.50%
2.	Pungutan Pengusahaan Perikanan	106,674,608.00	318,317,098.00	298.40%
3.	Minyak Bumi	194,000,000.00	296,764,643.00	152.97%
4.	Gas Alam	122,000,000.00	36,399,677.00	29.84%
5.	Iuran Eksploitasi	3,000,000.00	-	-
	Jumlah	720,756,878.00	691,303,698.00	95.91%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

c. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang Tahun 2006

Pada Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2006 ini terdiri dari enam jenis dana bagi hasil bukan pajak yaitu : Pungutan Pengusahaan Perikanan, Minyak Bumi, Gas Alam, Iuran Eksploitasi, Iuran Hak Penguasaan Hutan ,dan Provisi Sumber Daya Hutan, dalam dana bagi hasil bukan pajak disini yang paling

tinggi penerimaannya pada Minyak Bumi pencapaiannya sebesar, 1,318,301,402.00 (112.01%) dimana setiap tahun yang paling tinggi tidak selalu didominasi satu dana bagi hasil bukan pajak tetapi dana bagi hasil bukan pajak yang lain juga tinggi, sedangkan untuk target dan realisasi persentase yang paling tinggi pada Provisi Sumber Daya Hutan sebesar 135.99% dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.32
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang Tahun
2006

No.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Target	Realisasi	%
1.	Pungutan Pengusahaan Perikanan	752,992,730.00	300,879,840.00	39.96%
2.	Minyak Bumi	1,177,000,000.00	1,318,301,402.00	112.01%
3.	Gas Alam	-	20,225,269.00	-
4.	Iuran Eksploitasi	2,907,500.00	-	-
5.	Iuran Hak Penguasaan Hutan	-	52,951,707.24	-
6.	Provisi Sumber Daya Hutan	166,388,640.00	226,279,721.00	135.99%
	Jumlah	2,099,228,870.00	1,918,637,939.24	91.39%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

d. Perkembangan Kontribusi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006

Dalam setiap tahun perkembangan Kontribusi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006 Tidak selalu didominasi satu dana bagi hasil bukan pajak tetapi dana bagi hasil bukan pajak yang lain juga tinggi, dimana tergantung oleh potensi yang ada oleh karena itu dana bagi hasil bukan pajak tidak mesti

adanya pencapaian target yang diharapkan. Pada tahun 2004 Kontribusi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan persentasenya sebesar 21.00% (740,693,722.00), pada tahun 2005 sebesar 16.80% (691,303,698.00) dan tahun 2006 sebesar 35.12% (1,918,637,939.24) pada tahun 2005 ini mengalami penurunan dikarenakan potensi Sumber Daya Alam yang berada di Kota Malang ini tidak mendukung dan pengelolanya kurang baik, dimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.33

**Perkembangan Kontribusi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Malang
Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Tahun 2004- 2006**

No.	Tahun	Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Realisasi TPD	% Kontribusi
1.	2004	740,693,722.00	352,644,052,593.13	21.00%
2.	2005	691,303,698.00	411,346,670,316.71	16.80%
3.	2006	1,918,637,939.24	546,181,303,088.43	35.12%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

c). Perkembangan Dana Alokasi Umum

Perkembangan Dana Alokasi Umum pada tahun 2004 sampai 2006 hanya terdiri dari satu saja dimana pada tahun 2004 sebesar 211,628,000.0000.00, pada tahun 2005 sebesar 221,130,000,000.00 dan tahun 2006 sebesar 367,435,000,000.00, dimana dalam setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang target dan realisasi persentasenya sebesar 100.00% dimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

a. Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Malang Tahun 2004

Tabel 4.34

**Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Malang
Tahun 2004**

No.	Dana Alokasi Umum	Target	Realisasi	%
1.	DAU	211,628,000.0000.00	211,628,000.0000.00	100.00%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

b. Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Malang Tahun 2005

Tabel 4.35

**Target dan Realisasi Dana Kota Malang
Tahun 2005**

No.	Dana Alokasi Umum	Target	Realisasi	%
1.	DAU	221,130,000,000.00	221,130,000,000.00	100.00%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

c. Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Malang Tahun 2006

Tabel 4.36

**Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Malang
Tahun 2006**

No.	Dana Alokasi Umum	Target	Realisasi	%
1.	DAU	367,435,000,000.00	367,435,000,000.00	100.00%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

d. Perkembangan Kontribusi Dana Alokasi Umum Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006

Perkembangan Dana Alokasi Umum Pada tahun 2004 memberikan persentase kontribusi sebesar 60.01% (211,628,000,000.00), pada tahun 2005 memberikan persentase kontribusi sebesar 53.75% (221,130,000,000.00) dan tahun 2006 sebesar 67.27% (367,435,000,000.00). Walaupun Persentase kontribusi pada tahun 2005 ini menurun tetapi pencapaiannya naik sehingga mulai dari tahun 2004 sampai 2006 selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun.

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.37
Perkembangan Kontribusi Dana Alokasi Umum Kota Malang Terhadap
Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang
Tahun 2004- 2006

No.	Tahun	Realisasi Dana Alokasi Umum	Realisasi TPD	% Kontribusi
1.	2004	211,628,000,000.00	352,644,052,593.13	60.01%
2.	2005	221,130,000,000.00	411,346,670,316.71	53.75%
3.	2006	367,435,000,000.00	546,181,303,088.43	67.27%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

d). Perkembangan Dana Alokasi Khusus

a. Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Malang Tahun 2004

Pada tahun 2004 ini dana alokasi khusus terdiri dari tiga yaitu : DAK Bidang Infrastruktur, DAK Bidang Kesehatan, dan DAK Bidang Pendidikan. Pencapaian dana alokasi khusus yang paling tinggi memberikan kontribusi pada tahun 2004 ini adalah pada DAK Bidang Kesehatan sebesar 2,650,000,000.00 (100.00%), sedangkan target dan realisasi persentase keseluruhannya mencapai target 100.00% dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.38
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Malang
Tahun 2004

No.	Dana Alokasi Khusus	Target	Realisasi	%
1.	DAK Bidang Infrastruktur	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	100.00%
2.	DAK Bidang Kesehatan	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00	100.00%
3.	DAK Bidang Pendidikan	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	100.00%
	Jumlah	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	100.00%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

b. Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Malang Tahun 2005

Pada tahun 2005 terdiri dari lima Dana Alokasi Khusus yaitu : DAK Bidang Infrastruktur DAK, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Pendidikan, DAK Bidang Irigasi DAK Bidang Irigasi, DAK Bidang Perikanan. Dana Alokasi Khusus disini yang paling tinggi memberikan kontribusinya pada Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sebesar 2,925,000,000.00 (99.83%) dan yang paling rendah pada DAK Bidang Perikanan sebesar 790,000,000.00 tetapi pencapaiannya 100.00% , Sedangkan yang paling tinggi target dan realisasi persentasenya dari DAK keseluruhannya mencapai 100.00% kecuali pada Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sebesar 99.83% yang belum mencapai 100.00%, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.39
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Malang
Tahun 2005

No.	Dana Alokasi Khusus	Target	Realisasi	%
1.	DAK Bidang Infrastruktur	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00	100.00%
2.	DAK Bidang Kesehatan	1,430,000,000.00	1,430,000,000.00	100.00%
3.	DAK Bidang Pendidikan	2,930,000,000.00	2,925,000,000.00	99.83%
4.	DAK Bidang Irigasi	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00	100.00%
5.	DAK Bidang Perikanan	790,000,000.00	790,000,000.00	100.00%
	Jumlah	7,780.000,000.00	7,775,000,000.00	99.94%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

c. Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Malang Tahun 2006

Pada tahun 2006 terdiri dari delapan Dana Alokasi Khusus yaitu : DAK Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, DAK Bidang Irigasi, DAK Bidang Perikanan, DAK Bidang Jalan, DAK Bidang Air Bersih, DAK Bidang

Lingkungan Hidup, DAK Bidang Pertanian . Dana Alokasi Khusus disini yang paling tinggi kontribusinya pada Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan sebesar 6,890,000,000.00 (100.00%) dan yang paling rendah pada DAK Bidang Lingkungan Hidup sebesar 300,000,000.00 (100.00%). Untuk target dan realisasi persentase keseluruhan bidang DAK mencapai 100.00% sehingga tidak terdapat yang paling rendah, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.40
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Malang
Tahun 2006

No.	Dana Alokasi Khusus	Target	Realisasi	%
1.	DAK Bidang Kesehatan	4,270,000,000.00	4,270,000,000.00	100.00%
2.	DAK Bidang Pendidikan	6,790,000,000.00	6,790,000,000.00	100.00%
3.	DAK Bidang Irigasi	1,070,000,000.00	1,070,000,000.00	100.00%
4.	DAK Bidang Perikanan	540,000,000.00	540,000,000.00	100.00%
5.	DAK Bidang Jalan	6,890,000,000.00	6,890,000,000.00	100.00%
6.	DAK Bidang Air Bersih	400,000,000.00	400,000,000.00	100.00%
7.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00%
8.	DAK Bidang Pertanian	600,000,000.00	600,000,000.00	100.00%
	Jumlah	20,860,000,000.00	20,860,000,000.00	100.00%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

d. Perkembangan Kontribusi Dana Alokasi Khusus Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006

Perkembangan Dana Alokasi Khusus pada tahun 2004 dimana persentase target dan realisasi maupun kontribusi sebesar 1.55% (5,500,000.000.00) kemudian pada tahun 2005 sebesar 1.89% (7,775,000,000.00) dan tahun 2006 sebesar 3.81% (20,860,000,000.00), dalam setiap tahunnya DAK selalu mengalami peningkatan dimana DAK digunakan untuk membiayai sesuai bidang masing-masing, yang setiap tahun naik pembiayaannya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.41

Perkembangan Kontribusi Dana Alokasi Khusus Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006

No.	Tahun	Realisasi Dana Alokasi Khusus	Realisasi TPD	% Kontribusi
1.	2004	5,500,000.000.00	352,644,052,593.13	1.55%
2.	2005	7,775,000,000.00	411,346,670,316.71	1.89%
3.	2006	20,860,000,000.00	546,181,303,088.43	3.81%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

e). Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi

a. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Kota Malang Tahun 2004

Pada tahun 2004 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi pada kota Malang ini terdiri dari lima jenis yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Baku, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT dan AP, Sumbangan Pihak ketiga atas pembelian kayu dari Perhutani. Dimana pencapaian kontribusi tertinggi pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 13,369,587,280.25 (136.82%), hal ini dikarenakan banyaknya orang yang memiliki kendaraan bermotor yang berada pada kota Malang ini, untuk yang paling rendah pada Sumbangan Pihak ketiga atas pembelian kayu dari Perhutani sebesar 45,643,690.00 (68.58%), sedangkan target dan realisasi yang paling tinggi persentasenya pada Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT dan AP, sebesar 163.70%, paling rendah juga sama pada

kontribusi diatas pada Sumbangan Pihak ketiga atas pembelian kayu dari Perhutani sebesar 45,643,690.00 (68.58%), dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.42
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Kota Malang Tahun
2004

No.	Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	8,494,062,894.00	11,656,535,353.78	137.35%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9,807,462,735.00	13,369,587,280.25	136.82%
3.	Pajak Bahan Baku Kendaraan Bermotor	5,699,321,448.00	5,042,193,159.00	106.02%
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT dan AP	196,900,160.00	322,330,148.00	163.70%
5.	Sumbangan Pihak ketiga atas pembelian kayu dari Perhutani	7,500,000.00	45,643,690.00	68.58%
	Jumlah	24,205,247,239.00	31,446,269,638.00	129.92%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

b. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Kota Malang Tahun 2005

Pada tahun 2005 ini juga terdapat lima jenis Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Kota Malang yang sama jenisnya dengan tahun 2004. Pada tahun 2005 ini yang paling tinggi penerimaan kontribusi pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 17,480,356,115.00 (97.78%) dan yang paling rendah pada Sumbangan Pihak ketiga atas pembelian kayu dari Perhutani sebesar 8,950,201.00 (45.46%) untuk target dan realisasi persentase yang paling tinggi pada Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT dan AP sebesar 112.24%, juga yang paling rendah sama seperti kontribusi diatas. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Kota Malang yang lain juga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.43

**Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
Kota Malang Tahun 2005**

No.	Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	13,328,279,735.00	14,831,077,553.00	111.28%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17,877,243,185.00	17,480,356,115.00	97.78%
3.	Pajak Bahan Baku Kendaraan Bermotor	6,121,197,619.00	6,741,848,056.00	110.14%
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT dan AP	265,223,711.00	297,676,294.00	112.24%
5.	Sumbangan Pihak ketiga atas pembelian kayu dari Perhutani	19,687,500.00	8,950,201.00	45.46%
	Jumlah	37,611,631,750.00	39,359,908,219.00	104,65%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

c. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Kota Malang Tahun 2006

Pada tahun 2006 ini yang paling tinggi memberikan kontribusi maupun pada target dan realisasi persentasenya yaitu pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 18,684,080,183.00 (127.32%) dan yang paling rendah kontribusinya dan target dan realisasi persentase pada Sumbangan Pihak ketiga atas pembelian kayu dari Perhutani sebesar 15,000,000.00 (100.00%). Dan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.44
Perkembangan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
Kota Malang Tahun 2006

No.	Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	14,675,298,965.00	18,684,080,183.00	127.32%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15,457,324,665.00	16,533,354,234.00	106.96%
3.	Pajak Bahan Baku Kendaraan Bermotor	12,214,538,419.00	13,581,373,912.00	111.19%
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT dan AP	294,358,201.00	367,579,125.00	124.87%
5.	Sumbangan Pihak ketiga atas pembelian kayu dari Perhutani	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
	Jumlah	42,656,520,250.00	49,181,387,454.00	115.30%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

d. Perkembangan Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006.

Pada perkembangan kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Kota Malang Tahun 2004 pemberian persentase kontribusinya sebesar 8.91% (31,446,289.631.00) , Tahun 2005 sebesar 9.57% (39,359,908,219.00) dan tahun 2006 sebesar 9.00% (49,181,387,454.00), disini walaupun persentase pada tahun 2006 turun tetapi dapat diketahui bahwa Realisasi Bagi Hasil Pajak Propinsi selalu naik dari tahun ketahun. Dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.45
Perkembangan Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Kota Malang
Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang
Tahun 2004 - 2006

No.	Tahun	Realisasi Bagi Hasil Pajak Propinsi	Realisasi TPD	% Kontribusi
1.	2004	31,446,289.631.00	352,644,052,593.13	8.91%
2.	2005	39,359,908,219.00	411,346,670,316.71	9.57%
3.	2006	49,181,387,454.00	546,181,303,088.43	9.00%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

f). Bantuan Keuangan dari Propinsi (Lain- lain pendapatan yang syah)

Perkembangan Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Propinsi (Lain- lain pendapatan yang syah). Kota Malang Tahun 2004 sebesar 12,659,000,000.00 (100.00%) pada tahun 2005 sebesar 41,395,000,000.00 (100.00%) dan pada tahun 2006 tidak terdapat Lain- lain pendapatan yang syah (Bantuan Keuangan dari Propinsi) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

- a. Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Propinsi (Lain- lain pendapatan yang syah) Kota Malang Tahun 2004

Tabel 4.46

Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Propinsi (Lain- lain pendapatan yang syah) Kota Malang Tahun 2004

No.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	Target	Realisasi	%
1.	Bantuan Dana Penyesuaian	12,659,000,000.00	12,659,000,000.00	100.00%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

- b. Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Propinsi(Lain- lain pendapatan yang syah) Kota Malang Tahun 2005

Tabel 4.47

Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Propinsi (Lain- lain pendapatan yang syah) Kota Malang Tahun 2005

No.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	Target	Realisasi	%
1.	Bantuan Dana penyeimbang dari pemerintah	41,395,000,000.00	41,395,000,000.00	100.00%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

- c. Perkembangan Kontribusi Lain- lain pendapatan yang syah (Bantuan Keuangan dari Propinsi) Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006

Pada tahun 2004 Perkembangan Kontribusi Lain- lain pendapatan yang syah (Bantuan Keuangan dari Propinsi) Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Persentase kontribusinya sebesar 3.58% (12,659,000,000.00), untuk tahun 2005 persentase kontribusinya sebesar 10.06%

(41,395,000,000.00) dan untuk tahun 2006 tidak terdapat lain-lain pendapatan yang syah dan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.48

Perkembangan Kontribusi Lain- lain pendapatan yang syah (Bantuan Keuangan dari Propinsi) Kota Malang Terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2004- 2006

No.	Tahun	Realisasi Bagi Hasil Pajak Propinsi	Realisasi TPD	% Kontribusi
1.	2004	12,659,000,000.00	352,644,052,593.13	3.58%
2.	2005	41,395,000,000.00	411,346,670,316.71	10.06%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

7. Tingkat Kemandirian fiskal Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan tulang punggung untuk pembiayaan dalam rangka otonomi daerah dan pendapatan asli daerah merupakan aspek terpenting untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Kebijakan-kebijakan pusat dalam pengelolaan dan pemungutan sumber-sumber penerimaan daerah yang berpihak kepada Kabupaten/Kota akan memberikan prospek yang positif bagi daerah mengingat daerah akan dapat menjalankan keuangan daerahnya secara otonom.

Dalam rangka otonomi daerah khususnya otonomi keuangan daerah di satu sisi daerah dituntut untuk mengembangkan PAD sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan atas bantuan Pusat, di sisi lain pemanfaatan sumber-sumber potensi yang ada di daerah tidak diserahkan atau masih dipegang dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kondisi yang semacam ini sulitlah bagi daerah untuk mandiri dan dari mana untuk mewujudkannya adalah merupakan hal yang sulit.

Di Kota Malang dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah masih Kecil, sehingga kota Malang belum memiliki Kemandirian fiskal dan sebaliknya dari

tahun ketahun didominasi oleh Dana Perimbangan. Dimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.49
Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang
Tahun 2004 - 2006

No.	Kelompok Pendapatan	Realisasi Tahun 2004	Relisasi Tahun 2005	Realisasi Tahun 2006
1.	Pajak Daerah	26,409,533,752.02	29,296,191,381.60	32,123,673,031.21
2.	Retribusi	15,408,372,301.30	17,060,726,000.00	18,836,834,980.00
3.	Laba BUMD	3,937,402,000.00	6,161,683,135.70	6,471,750,152.01
4.	Lain- lain PAD	4,137,500,000.00	7,189,259,815.86	5,690,888,042.47
5.	Dana Bagi Hasil Pajak	40,662,780,790.00	42,255,253,112.00	44,474,964,194.00
6.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	740,693,722.00	691,303,698.00	1,918,637,939.24
7.	DAU	211,628,000,000.00	221,130,000,000.00	367,435,000,000.00
8.	DAK	5,500,000,000.00	7,775,000,000.00	20,860,000,000.00
9.	Dana bagi hasil pajak propinsi	31,446,289.631.00	39,359,908,219.00	49,181,387,454.00
10.	Lain- lain pendapatan yang syah	12,659,000,000.00	41,395,000,000.00	-
	Jumlah	352,644,052,593.13	411,346,670,316.71	546,181,303,088.43

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

a. Perkembangan Kontribusi Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Malang sangat kecil, hal ini ditentukan oleh perbandingan pendapatan Asli daerah terhadap total pendapatan daerah yang mana dapat diketahui bahwa persentase pada tahun 2004 mencapai 25.92% yang mana jika dilihat dari rasio ketergantungan persentase tersebut pendapatan tersebut mencapai taraf sedang. Sedangkan pada tahun 2005 persentase pendapatan hanya mencapai 14.27% yang mana tambah turun dari tahun 2004, padahal pada tahun 2005 pendapatan dikatakan tergolong naik tetapi masih besar bantuan yang berasal dari dana perimbangan, persentase pada tahun 2005 ini tergolong Kurang. Dan untuk tahun 2006 persentase pendapatan mencapai 11.41% dimana taraf ini tergolong Kurang. Dapat diketahui disini bahwa dari tahun ketahun persentase pendapatan selalu turun tetapi jumlah dari segi pendapatan terus naik. Hal ini disebabkan oleh pemerintah kota Malang masih ketergantungan terhadap Dana perimbangan yang selalu mendominasi untuk menutupi pengeluaran- pengeluaran rutin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.50

Perkembangan Kontribusi Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun 2004-2006

No.	Tahun	Realisasi PAD	Realisasi TPD	Tingkat kontribusi
1.	2004	91,410,779,615.91	352,644,052,593.13	25.92%
2.	2005	58,740,205,287.71	411,346,670,316.71	14.27%
3.	2006	62,311,313,501.19	546,181,303,088.43	11.41%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

b. Perkembangan Kontribusi Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Total Dana Perimbangan.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Pada Kota Malang dana perimbangana digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berada di kota Malang ini. Dana Perimbangan ini hal yang

penting untuk membantu pengeluaran- pengeluaran yang ada di kota Malang ini. Hal ini dapat diketahui bahwa persentase pada tahun 2004 dana perimbangan sangat besar sekali sampai mencapai 35.00%. Untuk tahun 2005 persentase dana perimbangan mencapai 16.66% yang mana dana tersebut sudah menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mana diketahui disini daerah sudah dapat mengelolah potensi yang ada di kota Malang ini. Tetapi disini tetap saja didominasi oleh dana perimbangan. Pada tahun 2006 dana perimbangan mencapai 12.88%, yang mana setiap tahun menunjukkan bahwa pemerintah kota Malang dapat mengelola potensi yang ada dengan baik. Tetapi faktanya tetap menunjukkan bahwa dana perimbangan selalu mendominasi terhadap total pendapatan kota Malang ini, yang mana dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.51

Perkembangan Kontribusi Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Total Dana Perimbangan Tahun 2004-2006

No.	Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Total Dana Perimbangan	Tingkat kontribusi
1.	2004	91,410,779,615.91	261,233,272,977.22	35.00%
2.	2005	58,740,205,287.71	352,606,465,029.00	16.66%
3.	2006	62,311,313,501.19	483,869,989,587.24	12.88%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

c. Perkembangan Kontribusi Realisasi Total Dana Perimbangan terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah.

Seperti diketahui diatas bahwa dana perimbangan disini jumlahnya masih sangat besar sekali hal ini terbukti dengan banyaknya subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah di kota Malang ini. Diharapkan dengan berlakunya Otonomi daerah dapat membuat kota Malang untuk maju tetapi walaupun pendapatan yang diterima di kota Malang ini sudah mulai mengalami peningkatan tetapi masih saja didominasi penerimaan yang berasal dari Dana perimbangan. Pada tahun 2004 Dana perimbangan mencapai persentase yang besar yaitu mencapai 74.08% persentase tersebut merupakan persentase yang sangat baik karena diatas 50.00%, untuk tahun 2005 bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meningkat persentasenya sebesar 85.72% berarti

sangat baik dan untuk tahun 2006 persentasenya mencapai 88.60%, berarti juga sangat baik. Sehingga disini dapat diambil kesimpulan bahwa Bantuan yang berasal dari pemerintah pusat setiap tahun selalu mengalami peningkatan dan disini menunjukkan bahwa kota Malang masih cenderung bergantung dengan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat tersebut, yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.52

Perkembangan Kontribusi Realisasi Total Dana Perimbangan terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun 2004-2006

No.	Tahun	Realisasi Total Dana Perimbangan	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Tingkat kontribusi
1.	2004	261,233,272,977.22	352,644,052,593.13	74.08%
2.	2005	352,606,465,029.00	411,346,670,316.71	85.72%
3.	2006	483,869,989,587.24	546,181,303,088.43	88.60%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Malang

8. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah.

a. Faktor Pendukung

1. Potensi Daerah

Berdasarkan wawancara dengan Kepala TU dinas pendapatan pada tanggal 11 September 2007 pada pukul 10.00 "Bapak Bowo Soeprasetyo" mengatakan bahwa potensi daerah juga berperan didalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota malang ini. Di mana menurut beliau bahwa potensi yang dimiliki kota malang ini sudah baik tergantung oleh pengelolaannya, dimana potensi ini terdiri dari empat yaitu: Potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Buatan, Sumber Daya Kelembagaan.

Potensi-Potensi yang berada di daerah juga sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah seperti :

a. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumberdaya alam adalah kekayaan alam yang memiliki atau ditemukan di daerah yang pengelolaannya dikuasai oleh daerah. Yang mana dalam potensi Sumber Daya Alam ini akan membantu pemasukan pendapatan

asli daerah jika pengelolaanya baik dan tidak adanya eksploitasi terhadap sumber daya yang ada.

b. Potensi Sumber Daya manusia

Berdasarkan wawancara dengan Kepala TU dinas pendapatan pada tanggal 11 September 2007 pada pukul 10.00 "Bapak Bowo Soeprasetyo" mengatakan bahwa salah satu faktor pendukung yang sangat berperan adalah sumberdaya manusia itu sendiri, baik di dalam dinas pendapatan maupun masyarakat itu sendiri. Sumber Daya Manusia yang terdapat pada dinas pendapatan itu sendiri akan berusaha melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan pada masyarakat itu sendiri akan sadar bahwa pentingnya pajak untuk membantu pendapatan asli daerah kota Malang.

Sumber Daya Manusia di dalam Dinas Pendapatan harus mengutamakan kerjanya dengan baik yang mana dengan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat itu sendiri sebaliknya harus taat kepada pajak, karena salah satu potensi daerah yang dapat membantu pendapatan seseorang juga bersumber dari pajak.

Potensi sumberdaya manusia dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Kualitas sumberdaya manusia tercermin dari jumlah pegawai yang mengelola potensi yang ada dan masyarakat itu sendiri.

c. Potensi Sumber Daya Buatan

Potensi sumberdaya buatan adalah seluruh hasil karya manusia dalam wujud fisik, seperti prasarana dan sarana produksi, perhubungan (transportasi dan komunikasi) bangunan atau gedung dan lain-lain. Yang mana dalam potensi sumber daya buatan ini setiap prasarana, produksi, dan perhubungan ditetapkan tarif pajak yang ada di kota Malang ini berdasarkan peraturan daerah dari masing-masing setiap pajak yang ada.

d. Potensi sumberdaya kelembagaan

Yang dimaksud sumberdaya kelembagaan adalah hasil karya manusia non fisik berupa organisasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam berperilaku.

Organisasi Pemerintahan yang berada pada dinas pendapatan terdapat struktur organisasi yang bertujuan untuk mengelola atau menggali potensi-potensi yang ada di kota Malang ini, di mana didalam setiap tahapan-tahapan atau

bagian-bagian yang berada pada dinas pendapatan kota malang ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam mewujudkan tujuan yang ada, yaitu peningkatan pendapatan asli daerah.

b. Faktor Penghambat

1. Potensi Daerah

Seperti yang dijelaskan pada faktor pendukung tadi potensi daerah juga terdapat faktor penghambat yaitu :

a. Potensi Sumber Daya Alam

Di dalam Potensi Sumber Daya yang ada di kota Malang misalnya, faktor bencana alam juga mempengaruhi pendapatan asli daerah.

b. Potensi Sumber Daya manusia

Berdasarkan wawancara dengan Kepala TU dinas pendapatan pada tanggal 12 September 2007 pada pukul 10.00 "Bapak Bowo Soeprasetyo" mengatakan bahwa sumber daya manusia yang berada di dinas pendapatan, dalam melaksanakan pekerjaannya masih terdapat ada yang kurang fokus, sehingga disini menimbulkan penghambat untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu faktor penghambat yang lain yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, disini masyarakat sebagai wajib pajak kurang sadar akan pajak atau menghindar dari pajak.

Bahwa sumber daya manusia di dinas pendapatan birokrasinya masih berbelit-belit dalam melaksanakan pekerjaannya disini dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya masih kurang memuaskan, contohnya saja terdapat kekeliruan dalam perhitungan pendapatan asli daerah. Selain itu terdapat wajib pajak yang kurang sadar akan pentingnya pajak hal ini disebabkan karena masyarakat kurang mengetahui pentingnya akan pajak, selain itu kurangnya tanggung jawab masyarakat akan pajak itu sendiri

Potensi Sumber Daya Manusia baik dalam organisasi dinas pendapatan dan masyarakat itu dapat dilihat dari kinerja dari pegawai yang ada pada dinas pendapatan itu sendiri, dimana birokrasinya masih kurang efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaannya. Masyarakat yang berada diluar organisasi itupun juga menjadi penghambat jika kurang mendukung pendapatan asli daerah, contohnya kurang tepatnya pembayara pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

c. Potensi Sumber Daya Buatan

Prasarana dan sarana produksi, perhubungan (transportasi dan komunikasi) bangunan atau gedung dan lain-lain jika kurang tepat dalam membayar pajak maka pendapatan dari pajaknya juga akan mempengaruhi dalam potensi yang ada dalam penerimaan daerah. Jika jalan rusak maka akan memperlambat transportasi yang ada baik kendaraan pribadi maupun umum. Dalam hal ini jika kendaraan umum terhambat oleh jalan yang rusak maka akan mengurangi penerimaan dari segi Retribusi daerah.

d. Potensi Sumber Daya Kelembagaan

Setiap organisasi selain terdapat kebaikan juga terdapat faktor yang menghambat untuk kemajuan organisasinya. Struktur organisasi yang kurang berfokus pada dinas pendapatan kota Malang dimana dalam kinerjanya masih kurang efektif yang mana disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Dan juga kurang terkaitnya antara pengelola yang satu dengan pengelola yang lain.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah dilihat dari Tahun 2004- 2006.

a. Perkembangan pendapatan asli daerah kota Malang tahun 2004- 2006

Seperti yang telah dijelaskan pada penyajian data bahwa pendapatan kota Malang mulai tahun 2004- 2006 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2004 jumlah pendapatan sebesar Rp. 91,410,779,615.91 (106.83%). Sedangkan untuk Tahun 2005 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 58,740,205,287.71 (97.79%), dan tahun 2006 sebesar 62,311,313,501.19 (103.87%). Disini jumlahnya selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Dapat kita lihat disini bahwa pada tahun 2004 jumlah penerimaan pendapatan asli daerah sangat besar dimana disini kota Malang dapat menunjukkan bahwa dapat mengelola potensi yang ada, tetapi dalam tahun 2005 jumlah pendapatan turun tetapi disini tetap mencapai target yang diinginkan dan pada tahun 2006 ini penerimaan pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan

lagi disini diharapkan agar daerah dapat mengelola dan selalu meningkatkan potensi yang ada di kota Malang ini yang mana dengan adanya Otonomi daerah, kota Malang akan dapat mampu menunjukkan kemampuannya dalam potensi yang ada dan tidak akan dapat menunjukkan kemampuannya salah satunya dengan kemandirian fiskal yang berada pada Kota Malang ini. Tetapi disini pada persentasenya besar, pada tahun 2005 turun dan tahun 2006 naik tetapi disini pendapatan selalu naik dari tahun ketahun. Dalam rangka otonomi daerah khususnya otonomi keuangan daerah di satu sisi daerah dituntut untuk mengembangkan PAD sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan atas bantuan Pusat, di sisi lain pemanfaatan sumber-sumber potensi yang ada di daerah tidak diserahkan atau masih dipegang dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kondisi yang semacam ini sulitlah bagi daerah untuk mandiri dan dari mana untuk mewujudkannya adalah merupakan hal yang sulit. Disini Pemerintah kota Malang harus berusaha dalam meningkatkan penerimaan baik yang bersumber dari pajak, retribusi, BUMD dan lain- lain pendapatan yang syah yang ada di kota Malang ini.

b. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah tahun 2004- 2006

Pajak daerah oleh banyak pihak dipandang sebagai jenis penghasilan utama yang diperoleh daerah. Umumnya Pemerintah Pusat menentukan pajak mana yang dipungut oleh daerah. Pada banyak negara, legislasi juga menentukan batasan bagi pungutan tersebut serta memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Pusat untuk memeriksa dan mengesahkannya (Muluk, 2003, h.57). Pajak disini pada tahun 2004 terdapat lima jenis pajak yaitu : Pajak hotel dan restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Umum dan Pajak Parkir dimana pajak pada tahun 2004 ini jumlahnya sebesar 26,409,553,752,02 (102.97%) yang mana pajak tertinggi berdasarkan pada kontribusinya di pada pajak penerangan jalan yaitu sebesar 16,563,436,679.00100 (100.29%) pajak penerangan ini memberikan kontribusi yang besar terhadap jumlah penerimaan pajak yang berada di kota Malang ini dan

berdasarkan target dan realisasi yang mencapai persentase yang tinggi pada pajak Reklame yang sebesar 112.37%, pajak Reklame ini mencapai persentase yang paling tinggi pada tahun 2004 . Pada tahun 2005 jumlah penerimaan pajak sebesar 29,296,191,381.60 (99.27%) yang mana dalam tahun 2005 ini terdapat enam jenis pajak yaitu : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Umum dan Pajak Parkir. Pada tahun 2005 ini pajak hotel dan restoran dipisahkan sendiri-sendiri hal ini agar dapat mempermudah penghitungan pajaknya, karena dikota Malang ini terdapat banyak sekali hotel dan restoran. Tahun 2005 ini pajak yang mendominasi pemberian kontribusinya adalah pajak penerangan jalan sebesar 17,207,678,928.00 (100.95%) dan untuk yang paling rendah dalam pemberian kontribusi pada pajak parkir sebesar 396,787,175.00 (100.45%). Persentase yang paling tinggi di dominasi oleh Pajak Reklame sebesar 122,12% dimana pajak reklame ini meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan yang paling rendah persentasenya pada pajak restoran sebesar 89.71% yang mana target tidak tercapai 100% pada tahun 2005 ini. Tahun 2006 jenis pajaknya tetap menjadi enam yang memiliki jumlah pajaknya sebesar 32,123,673,031.21 (104.06%) yang mana kontribusinya didominasi oleh pajak penerangan jalan sebesar 18,589,169,105.36(104.32%). Sedangkan yang memberikan kontribusi terendah pada pajak Parkir sebesar 517,904,376.50 (100.45%). Sedangkan yang target dan realisasi yang paling tinggi persentasenya pada pajak Reklame sebesar 130.66%, untuk yang paling rendah pada pajak Hiburan. Dapat kita ketahui bahwa perkembangan pajak dari tahun ketahun semakin meningkat hal ini dikarenakan kemampuan daerah kota Malang dalam mengelola potensi sudah baik, disini dapat kita lihat bahwa pajak setiap tahun didominasi oleh pajak penerangan jalan yang mana digunakan untuk memfasilitasi penerangan jalan yang berada pada kota Malang ini. Dan dalam persentasenya perkembangan pajak reklame juga meningkat hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa tersebut untuk mempromosikan produknya.

c. Perkembangan Retribusi Daerah tahun 2004- 2006

Retribusi disini juga merupakan jenis penerimaan yang berada di daerah. Pada tahun 2004 Retribusi terdiri dari delapan belas jenis yaitu : Sewa tanah dan bangunan/ kekayaan daerah, Uang Sampedan dan ijin bangunan, Uang penguburan, Retribusi stasiun/ bus terminal, Rumah sakit dan balai pengobatan, Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Penerimaan dari catatan sipil/ biaya cetak KTP, Retribusi penyelenggaraan kebersihan, Pemeriksaan alat pemadam, Retribusi tempat parkir/ parkir tepi jalan umum, Retribusi tempat olahraga/ Rekreasi, Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Ijin gangguan, Retribusi perindustrian dan perdagangan, Retribusi Ketenagaan Kerja, Retribusi Pariwisata, dan SIUJK. Jumlah penerimaan pada pos Retribusi pada tahun 2004 sebesar 15,408,372,301.30 (97.45%) pada pos Retribusi tahun 2004 ini tertinggi pada Retribusi IMB sebesar 3,328,543,525.00 (101.72%). Retribusi ini juga berguna untuk mendukung kemandirian fiskal yang mana dapat mengetahui kemampuan daerah sebesar mana dalam mengupayakan daerahnya dapat mandiri setelah adanya Otonomi daerah. Sedangkan Retribusi yang target dan realisasinya yang paling tinggi pada tahun 2004 didominasi oleh retribusi pelayanan pemakaman persentasenya sebesar 197.02%, untuk tahun 2005 jumlah Retribusinya sebesar 16,093,070,954.55 (94.33%). Tahun 2005 ini jenis retribusi yang terbesar adalah pada Retribusi IMB, sebesar 3,604,154,420.00 (97.41%). Retribusi IMB tidak selalu mengalami pencapaian target yang sempurna hal ini disebabkan baik dari faktor internal maupun eksternal yang ada. Sehingga disini dapat diketahui bahwa retribusi tidak selalu mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Retribusi yang meberikan kontribusi yang paling rendah pada kontribusi Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar 10,097,000.00 (100.97). Pencapaian target dan realisasi persentase yang paling tinggi pada Retribusi perindustrian dan perdagangan dan koperasi sebesar 139.30%, pencapaian melebihi target yang telah ditetapkan. Dan yang paling rendah persentasenya pada Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 74.59%. Disini dapat diketahui

bahwa retribusi tidak selalu mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk Tahun 2006 Jumlah Retribusinya sebesar 18,025,002,257.50 (95.69%) dan Retribusi tertinggi juga pada Retribusi IMB sebesar 5,191,789,368.00 (101.72%). Dimana disini dapat diketahui pada tahun 2005 walaupun Retribusi IMB yang paling tinggi tetapi tidak mengalami pencapaian targetnya, pada tahun 2006 ini pencapaian target pada retribusi IMB ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi, walaupun penetapan target ini tinggi pencapaian targetnya dapat juga terlaksana. Sehingga Pada tahun 2006 ini penetapan target naik dan pencapaian targetnya juga sudah memenuhi. Sedangkan yang paling rendah dalam pemberian kontribusinya pada Retribusi ketenagakerjaan sebesar 31,565,000.00 (101.82%) dan target dan realisasi yang mencapai persentase yang paling tinggi pada Retribusi Pelayanan Pemakaman sebesar 197.02%, yang paling rendah persentasenya pada Retribusi jasa usaha tempat terminal sebesar 77.05% . Dapat diketahui disini bahwa setiap tahun dari sektor Retribusi selalu mengalami kenaikan baik dari targetnya maupun dari pencapaiannya. Disini setiap tahun meningkat pada sektor pendapatannya diharapkan dapat menunjukkan kemampuan kota Malang dari segi potensi yang ada.

d. Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah tahun 2004 -2006

Bagian Laba Usaha Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil Perusahaan milik daerah dari hasil daerah yang dipisahkan. BUMD ini pada tahun 2004 memiliki jumlah sebesar 3,937,402,000.00 (100.15%) yang terdiri dari tiga BUMD yaitu : Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Rumah Potong Hewan. Perolehan pendapatan pada tahun 2004 ini didominasi oleh Perusahaan Daerah Air Minum memiliki target sebesar 3,815,000,000.00 dan pencapaiannya juga memenuhi target sama dan persentasenya sebesar 100.00%. PDAM ini salah satu yang memberikan kontribusi terbesar untuk peningkatan pendapatan yang ada pada kota Malang ini dan untuk target dan realisasi yang mencapai persentase tertinggi pada Bank Perkreditan Rakyat sebesar 115.61 % dan untuk persentase terendah pada BUMD Rumah Potong

Hewan yakni sebesar 99.50%. Tahun 2005 BUMD terdiri dari empat yaitu : Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Air Minum, Rumah Potong Hewan, dan Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Rumah Potong Hewan yang memiliki jumlah pendapatannya sebesar 6,161,683,135.70 (100,12%) jumlah ini meningkat dari tahun 2004 dan pendapatan BUMD yang paling tinggi juga pada PDAM hal ini diketahui bahwa masyarakat atau penduduk Malang ini banyak yang menggunakan pelayanan PDAM. Pendapatan pada PDAM Pada tahun 2005 ini sebesar 5,733,758,467.00 (100.00%) Sedangkan untuk target dan realisasi pencapaian persentase yang paling tinggi pada Bank Perkreditan Rakyat sebesar 115.73% dan untuk tahun 2006 BUMD terdiri dari lima yang mana BUMDnya sama dengan tahun 2005. Dalam BUMD ini jumlah pendapatannya sebesar 6,471,750,152.01 (100.05%) yang mana paling tinggi pada Bank Perkreditan Rakyat. Disini dapat diketahui bahwa setiap tahun terjadi peningkatan mulai dari tahun 2004 sampai 2006 dimana BUMD selalu yang mendominasi pada PDAM dan target dan realisasinya paling tinggi persentasenya pada Bank Perkreditan Rakyat berarti disini dapat diketahui bahwa potensi yang dimiliki oleh PDAM dan Bank Perkreditan Rakyat kota Malang sudah baik dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat selain memberikan manfaat pada masyarakat kota Malang ini juga dapat memberikan masukan dana bagi pemerintah daerah kota Malang sehingga pendapatan juga akan bertambah.

e. Perkembangan Lain- lain Pendapatan yang sah tahun 2004 - 2006

Lain-lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Dalam lain- lain pendapatan yang sah ini pada tahun 2004 pemerintah kota Malang juga memiliki tiga pendapatan lain- lain yaitu : Penerimaan Deviden dari BPD Jatim, Jasa Penggunaan Dana Pemda dari BPD/ Jasa, dan Penerimaan lain-lain. Dalam tahun 2004 jumlah pendapatan sebesar 4,251,997,050.59 (102.77%), yang tertinggi pada penerimaan lain- lain sebesar 2,456,370,980.00 (165.13%), untuk yang paling rendah dalam pemberian kontribusi dan target dan realisasi

dalam persentasenya juga pada Penerimaan Deviden dari BPD Jatim sebesar 211,513,570.20 (52.88%), yang mana tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 400,000,000.00. Tahun 2005 juga terdiri dari tiga penerimaan lain-lain yang sama dengan tahun 2004 dan 2006 dimana tahun 2005 ini memiliki jumlah pendapatan lain-lain yang syah sebesar 7,189,259,815.86 (97.98%) yang paling tinggi juga pada penerimaan lain-lain sebesar 4,649,843,947.00 (93.23%) sedangkan dalam target dan realisasi persentase yang besar pada Penerimaan Jasa Giro sebesar 122.46% dan paling rendah Penerimaan Bunga Deposito sebesar 1,192,397,260.11 (95.39%) dan targetnya tidak tercapai sebesar 1,250,000,000.00 dan untuk tahun 2006 jumlah pendapatan lain-lain yang syah sebesar 5,690,888,042.47 (149.21%) dan yang paling tinggi pada Penerimaan Bunga Deposito sebesar 1,906,952,054.65(146.69%) penerimaan Bunga Deposito ini melebihi target yang ditetapkan dan untuk target dan realisasi yang persentasenya yang paling besar dicapai pada Penerimaan Lain-lain 167.69% . Sehingga disini dapat diketahui bahwa pada tahun 2004 dan tahun 2005 yang paling tinggi pada penerimaan lain-lain yang mana jumlah pendapatannya mengalami peningkatan dan untuk tahun 2006 ini penerimaan pendapatan lain-lain yang syah ini meningkat dan untuk kontribusi terbesar pada penerimaan bunga deposito.

2. Analisis Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Malang dilihat dari tahun 2004-2006

a. Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2004-2006

Dalam pasal 1 UU No. 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam pos Dana bagi hasil pajak ini Pada tahun 2004 jumlahnya sebesar 40,662,780,790.00 (115.13%) yang mana terdiri dari : PBB, BPHTB, dan Bagi Hasil PPH Pasal 21, yang teringgi pada PBB sebesar 17,115,790,595.00 (122.26%) dan untuk target dan realisasi persentasenya yang paling tinggi didominasi oleh BPHTB sebesar 138.88% dan yang paling rendah baik kontribusinya

maupun target dan realisasi persentasenya yaitu pada Bagi Hasil PPH Pasal 21 sebesar 11,186,813,983.00 (90.07%). Untuk tahun 2005 jumlah Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 42,225,253,112.00 (98.77%) dan yang paling tinggi pada PBB sebesar 17,920,811,313.00(105.42%). Dan untuk target dan realisasi persentase yang paling besar pada BPHTB sebesar 112.29%, untuk yang paling rendah baik dari kontribusi maupun dari target dan realisasi persentasenya juga pada Bagi Hasil PPH Pasal 21 sebesar 10,455,512,338.00 (77.91%). Untuk tahun 2006 Jumlahnya sebesar 44,474,964,194.00 (109.04%) dan paling besar juga pada PBB sebesar 22,007,780,722.00 (123.45%). Untuk yang paling rendah baik kontribusi maupun target dan realisasi persentasenya juga terdapat pada Bagi Hasil PPH Pasal 21 sebesar 9,280,770,195.00 (87.58%). Dapat diketahui dana bagi hasil pajak setiap tahunnya selalu meningkat yang mana setiap tahunnya selalu PBB, hal ini dikarenakan banyaknya rumah yang ditempati oleh warga Malang ini yang dapat menambah kas daerah. Dan untuk target dan realisasi yang paling tinggi juga pada Bagi Hasil PPH Pasal 21, hal ini dikarenakan adanya pajak penghasilan ketika bekerja di semua bidangnya. Dana Bagi Hasil Pajak selalu membantu penerimaan yang berada di kota Malang ini. Karena pemerintah pusat membagi hasil dengan pemerintah kota Malang.

b. Perkembangan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2004-2006

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2004 terdiri dari lima jenis dana bagi hasil bukan pajak yaitu : Iuran Hasil Pengusahaan Hutan/ Provinsi SD. Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan, Minyak Bumi, dan Gas Alam, dalam dana bagi hasil bukan pajak disini yang paling tinggi penerimaannya pada Iuran Hasil Pengusahaan Hutan/ Provinsi SD. Hutan pencapaiannya sebesar 350,898,184.00 (118.92%), melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 295,082,270.00 untuk yang paling rendah terdapat pada Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi sebesar 1,802,658.00 (60.09%), sedangkan untuk target dan realisasi persentase yang paling tinggi pada Pungutan Pengusahaan Perikanan sebesar 247.66%, untuk yang paling rendah pada

Gas Alam sebesar 13.57% yang memiliki jumlah sebesar 740,693,722.00 (102.77%). Untuk tahun 2005 jumlahnya sebesar 691,303,698.00 (95.91%) paling tinggi pada Pungutan Pengusahaan Perikanan pencapaiannya sebesar 318,317,098.00 (105.42%). Dan untuk target dan realisasi persentase yang paling besar pada BPHTB sebesar 112.29%, untuk yang paling rendah baik dari kontribusi maupun dari target dan realisasi persentasenya juga pada Bagi Hasil PPH Pasal 21 sebesar 10,455,512,338.00 (77.91%) dan tahun 2006 jumlahnya sebesar 1,918,637,939.24 (91.39%) dan yang paling tinggi pada Minyak Bumi pencapaiannya sebesar, 1,318,301,402.00 (112.01%) sedangkan untuk target dan realisasi persentase yang paling tinggi pada Provisi Sumber Daya Hutan sebesar 135.99% dapat disimpulkan bahwa setiap tahun perolehan tertinggi tidak selalu di dominasi oleh satu hasil sumber daya alam tetapi juga oleh sumber daya alam lainnya karena setiap potensi sumber daya alam memiliki potensi yang berbeda-beda tetapi pada tahun 2005 ini jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penurunan karena setiap potensi yang dimiliki tidak selalu baik.

c. Perkembangan Dana Alokasi Umum tahun 2004- 2006

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut pasal 1 UU No. 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain itu DAU bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Khusaini, 2007, h.36). DAU pada tahun 2004 sebesar 211,628,000.0000.00 (100.00%), dimana persentase pada tahun ini mencapai targetnya, pada tahun 2005 sebesar 221,130,000,000.00 (100.00%) dan tahun 2006 sebesar 367,435,000,000.00 (100.00%), setiap

tahun mulai dari tahun 2004- 2006 DAU selalu mengalami peningkatan dan persentasenya selalu mencapai target, DAU di kota Malang ini juga digunakan untuk membiayai- biayai pengeluaran rutin yang ada di kota Malang ini. Selain itu DAU juga untuk membiayai pembangunan yang ada di kota Malang ini dan juga menutupi pengeluaran yang kurang. DAU juga berfungsi untuk pengeluaran belanja- belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Malang ini.

d. Perkembangan Dana Alokasi Khusus tahun 2004-2006

DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Pada tahun 2004 DAK terdiri dari tiga yaitu : DAK Bidang Infrastruktur, DAK Bidang Kesehatan, dan DAK Bidang Pendidikan. Pencapaian dana alokasi khusus yang paling tinggi pada tahun 2004 ini adalah pada DAK Bidang Kesehatan sebesar 2,650,000,000.00 (100.00%), sedangkan target dan realisasi persentase keseluruhannya mencapai target 100.00%. Jumlah DAK pada tahun 2004 ini sebesar 5,500,000,000.00 (100.00%). Tahun 2005 DAK terdiri dari lima yaitu : DAK Bidang Infrastruktur DAK, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Pendidikan, DAK Bidang Irigasi DAK Bidang Irigasi, DAK Bidang Perikanan. Dana Alokasi Khusus disini yang paling tinggi pencapaiannya pada Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sebesar 2,925,000,000.00(99.83%) dan yang paling rendah pada DAK Bidang Perikanan sebesar 790,000,000.00 tetapi pencapaiannya 100.00% , Sedangkan yang paling tinggi target dan realisasi persentasenya dari DAK keseluruhannya mencapai 100.00% kecuali pada Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sebesar 99.83% yang belum mencapai 100.00%, dan jumlahnya sebesar 7,775,000,000.00 (99.94%). Untuk Tahun 2006 DAK juga terdiri dari delapan yaitu : yaitu : DAK Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, DAK Bidang Irigasi, DAK Bidang Perikanan, DAK Bidang Jalan, DAK Bidang Air Bersih, DAK Bidang Lingkungan Hidup, DAK Bidang Pertanian . Dana Alokasi Khusus disini yang paling tinggi pencapaiannya pada Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan sebesar 6,890,000,000.00 (100.00%) dan yang paling rendah pada DAK

Bidang Lingkungan Hidup sebesar 300,000,000.00 (100.00%). Untuk target dan realisasi persentase keseluruhan bidang DAK mencapai 100.00% sehingga tidak terdapat yang paling rendah, dan jumlahnya sebesar 20,860,000,000.00 (100.00%). Dapat disimpulkan disini bahwa setiap tahun DAK selalu bertambah dalam setiap bidang- bidangnya mulai tahun 2004 sampai tahun 2006. Selain banyaknya bidang- bidang yang harus didanai oleh DAK disini juga terdapat peningkatan jumlah DAK setiap tahunnya. DAK disini dikota Malang digunakan sebagai pembiayaan pada setiap bidang- bidang yang telah ditentukan di kota Malang ini. Setiap bidang memiliki fungsi sendiri- sendiri.

e. Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun 2004-2006

Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi pada kota Malang ini terdiri dari lima jenis yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Baku, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT dan AP, Sumbangan Pihak ketiga atas pembelian kayu dari Perhutani. Dimana pencapaian tertinggi pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 13,369,587,280.25 (136.82%), hal ini dikarenakan banyaknya orang yang memiliki kendaraan bermotor yang berada pada kota Malang ini, untuk yang paling rendah pada Sumbangan Pihak ketiga atas pembelian kayu dari Perhutani sebesar 45,643,690.00 (68.58%), sedangkan target dan realisasi yang paling tinggi persentasenya pada Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT dan AP, sebesar 163.70%, paling rendah juga sama pada kontribusi diatas pada Sumbangan Pihak ketiga atas pembelian kayu dari Perhutani sebesar 45,643,690.00 (68.58%), dan jumlahnya sebesar 31,446,269,638.00 (129.92%), tahun 2005 jumlah dana bagi hasil pajak propinsi sebesar 39,359,908,219.00 (104,65%) paling tinggi pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 17,480,356,115.00 (97.78%) dan yang paling rendah pada Sumbangan Pihak ketiga atas pembelian kayu dari Perhutani sebesar 8,950,201.00 (45.46%) untuk target dan realisasi persentase yang paling tinggi pada Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT dan AP sebesar 112.24%, juga yang paling rendah sama seperti kontribusi diatas ,dan

untuk tahun 2006 jumlahnya sebesar 49,181,387,454.00 (115.30%) paling tinggi pada Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 18,684,080,183.00 (127.32%) dan yang paling rendah kontribusinya dan target dan realisasi persentase pada Sumbangan Pihak ketiga atas pembelian kayu dari Perhutani sebesar 15,000,000.00 (100.00%). Mulai tahun 2004 sampai 2006 Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi selalu meningkat. Pada tahun 2004 dan 2005 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang memberikan kontribusi paling tinggi walaupun target tidak tercapai tetapi penerimaan dari tahun ketahun selalu meningkat, hal ini memberi pemasukan ke negara dan dapat menambah pendapatan daerah kota Malang. Salah satu fakta inilah yang mempengaruhi Ketergantungan daerah kepada negara, dimana daerah selalu memperoleh dana dari negara dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dan untuk tahun 2006 tertinggi pada Pajak Kendaraan Bermotor yang mana masyarakat seluruh kota Malang ini banyak yang sudah memiliki transportasi pribadi khususnya sepeda motor yang mana pada setiap tahunnya masyarakat selalu membayar pajak kendaraan bermotornya yang mana masuk ke kas negara dan kas daerah akan memperolehnya juga dari pajak kendaraan bermotor tersebut.

f. Bantuan Keuangan dari Propinsi (Lain- lain pendapatan yang syah) tahun 2004-2006

Pada tahun 2004 Bantuan Dana Penyesuaian sebesar 12,659,000,000.00, (100.00%) pada tahun 2005 Bantuan Dana penyeimbang dari pemerintah sebesar 41,395,000,000.00 (100.00%) dan untuk tahun 2006 tidak terdapat Bantuan Dana penyeimbang dari pemerintah. Pada tahun 2004 dan 2005 terdapat dana penyesuaian dan penyeimbang dari pemerintah pusat yang selalu meningkat, tetapi pada tahun 2006 tidak terdapat bantuan tersebut.

3. Analisis Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang di Era Otonomi Daerah Tahun 2004- 2006.

Menurut Reksodiprojo dalam (Munir Dasril, 2004,h.105) tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya desentralisasi fiskal kepada suatu daerah dan pengukurannya dapat dilakukan menggunakan derajat otonomi fiskal. Masih menurut

Reksodiprojo dalam (Munir Dasril , 2004,h.106) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah. Adapun rumus dari derajat otonomi fiskal ini adalah:

$$\text{Derajat Otonomi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

a. Perkembangan Kontribusi Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah tahun 2004- 2006

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun 2004

$$\begin{aligned} \text{Derajat Otonomi Fiskal} &= \frac{91,410,779,615.91}{352,644,052,593.13} \\ &= 25.92\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2004 perbandingan realisasi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah menghasilkan tolok ukur kemandirian atau rasio kemandirian sebesar 25.91% dimana disini menunjukkan Sedang dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah, dalam tahun 2004 ini yang memperoleh pendapatan tertinggi pada pajak penerangan jalan, Retribusi IMB, PDAM, dan pada penerimaan lain- lain yang ada di kota Malang ini.

2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun 2005

$$\begin{aligned} \text{Derajat Otonomi Fiskal} &= \frac{58,740,205,287.71}{411,346,670,316.71} \\ &= 14.27\% \end{aligned}$$

Pada Tahun 2005 Perbandingan realisasi pendapatan terhadap realisasi total pendapatan menghasilkan tolok ukur kemandirian sebesar 14.27% dimana ditunjukkan dengan tingkat kurang, kota Malang pada tahun 2005 ini mengalami penurunan yang mana banyak didukung oleh dana perimbangan, sehingga diharapkan dapat mampu mengolah potensi yang ada di kota Malang ini dengan baik. Pada tahun 2005 Pendapatan yang tinggi didominasi oleh pajak penerangan jalan, retribusi IMB, PDAM dan penerimaan lain- lain disini walaupun realisasi pendapatan menurun tetapi dana perimbangan yang

menutupi kekurangannya yang digunakan untuk pembiayaan yang ada di kota Malang ini.

3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun 2006

$$\begin{aligned}\text{Derajat Otonomi Fiskal} &= \frac{62,311,313,501.19}{546,181,303,088.43} \\ &= 11.41\%\end{aligned}$$

Pada Tahun 2006 ini Pernandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan daerah menghasilkan tolok ukur kemandirian sebesar 11.41% disini realisasi pendapatan naik dari tahun sebelumnya, disini menunjukkan bahwa pemerintah kota Malang telah berusaha dalam meningkatkan potensi yang ada di kota Malang ini. Pada tahun 2006 ini pendapatan tertinggi didominasi oleh pajak penerangan jalan, retribusi IMB, PDAM dan Penerimaan Bunga Deposito. Tahun 2006 tolok ukur kemandirian sebesar 11.41% yang mana merupakan tingkat yang kurang, walaupun jumlah pendapatan naik tetapi persentase tolok ukur kemandirian turun.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah Pemerintah kota Malang terhadap Total Pendapatan Daerah mulai Tahun 2004- 2006, disini ditunjukkan pada tahun 2004 ini jumlah realisasi pendapatan asli daerah tinggi yang mana tingkat kemandiriannya menghasilkan sedang dimana kota Malang ini dapat menunjukkan kemampuannya agar tidak selalu tergantung terhadap pemerintah pusat, tahun 2005 ini Realisasi pendapatan asli daerah menurun dikarenakan sumber daya yang mengelola pendapatan asli daerah ini terdapat masalah selain itu potensi yang ada di kota Malnag ini juga mempengaruhi perolehan jumlah pendapatan yang ada di Malang ini. Tahun 2006 walaupun realisasi pendapatan asli daerah naik tetapi disini tingkat kemandirian menunjukkan penurunan, oleh sebab itu pendapatan asli daerah kota Malang ini tidak selalu mengalami kenaikan atau penurunan. Sehingga kemampuan daerah dalam mengelolah keuangannya perlu memiliki kinerja yang baik.

- b. Perkembangan Kontribusi Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Dana perimbangan kota Malang Tahun 2004- 2006

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Pendapatan asli daerah

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Bantuan pemerintah pusat atau propinsi dan pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana extern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingka ketergantungan daerah terhadap bantuan extern (terutama pemerintah pusat dan propinsi (semakin rendah, dan demikian sebaliknya).

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Total Dana Perimbangan Tahun 2004

$$\begin{aligned} \text{Rasio kemandirian} &= \frac{91,410,779,615.91}{261,233,272,977.22} \\ &= 35.00\% \end{aligned}$$

Pada Tahun 2004 ini perbandingan antara PAD dengan total dana perimbangan menunjukkan tolok ukur kemandirian atau rasio ketergantungan menunjukkan cukup yang mana pada tahun 2004 ini tingkat persentase dana perimbangan lebih besar daripada Pendapatan yang ada pada kota Malang ini pada tahun 2004. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah khususnya di kota Malang ini masih sangat besar sehingga ketergantungan pemerintah kota Malang terhadap pemerintah pusat masih terjadi. Dimana dana perimbangan pada tahun 2004 ini didominasi oleh

: PBB, Iuran Hasil Pengusahaan Hutan/ Provinsi SD. Hutan, DAU, DAK Bidang Kesehatan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Bantuan Dana Penyesuaian. Disini setiap bidang- bidang yang ada pada dana perimbangan digunakan untuk membiayai sesuai pada bidang tersebut.

2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Total Dana Perimbangan Tahun 2005

$$\begin{aligned} \text{Rasio kemandirian} &= \frac{58,740,205,287.71}{352,606,465,029.00} \\ &= 16.66\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2005 ini dana perimbangan menurun dan pendapatan asli daerah menurun persentase antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Dana Perimbangan sebesar 16.66% yang mana menunjukkan bahwa persentase tingkat tersebut merupakan Kurang. Berarti disini selain Jumlah pendapatan menurun pemberian dana perimbangan kepada daerah juga menurun. Dana perimbangan yang paling tinggi pada PBB, Pungutan Pengusahaan Perikanan, DAU, Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Bantuan Dana Penyesuaian. Dapat diketahui bahwa dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak selalu tinggi, tetapi disini tetap terdapat bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kota Malang.

3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Total Dana Perimbangan Tahun 2006

$$\begin{aligned} \text{Rasio kemandirian} &= \frac{62,311,313,501.19}{483,869,989,587.24} \\ &= 12.88\% \end{aligned}$$

Tahun 2006 ini Perbandingan antara PAD dengan Total Dana perimbangan mencapai 12.88% yang mana persentase menunjukkan tingkat yang kurang, disini walaupun persentase turun tetapi perolehan pendapatan tinggi dan dana perimbangan juga tinggi dan tidak selalu dipengaruhi oleh persentase dalam kemampuan daerah tetapi jumlah perolehannya juga menetapkan. Dana perimbangan untuk tahun ini didominasi oleh : PBB, Minyak bumi, DAU, Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan tidak

terdapat Bantuan penyusaian atau bantuan penyeimbang dari pemerintah pusat.

Perbandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Dana Perimbangan Tahun 2004-2006 tidak selalu mengalami kenaikan tetapi juga mengalami penurunan, pada tahun 2004 pemberian dana perimbangan terhadap pemerintah kota Malang besar dibandingkan dengan pendapatannya, walaupun pendapatan juga mengalami kenaikan tetapi tidak menutupi kemungkinan bahwa dana perimbangan jauh lebih besar dan disini dapat menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Seharusnya disini pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengelolah potensi yang ada. Tahun 2005 pendapatan dari tahun 2004 ke 2005 mengalami penurunan tetapi target yang ditetapkan masih dapat tercapai, walaupun pendapatan turun dari tahun sebelumnya dana perimbangan juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya disini pemerintah kota Malang tetap menerima bantuan tersebut. Dan untuk tahun 2006 perolehan pendapatan naik dan dana perimbanganpun juga naik, sehingga disini dapat diketahui bahwa walaupun telah adanya otonomi daerah, pemerintah daerah masih belum mampu untuk tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat. Dan disini pemerintah kota Malang belum dapat dikatakan Mandiri.

c. Perkembangan Kontribusi Realisasi Total Dana Perimbangan terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah kota Malang Tahun 2004- 2006

1. Realisasi Total Dana Perimbangan terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun 2004

Perbandingan antara Realisasi Total Dana Perimbangan dengan Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun 2004 menunjukkan bahwa :

$$\frac{261,233,272,977.22}{352,644,052,593.13}$$
$$= 74.08\%$$

Dalam Perbandingan tersebut menghasilkan persentase sebesar 74.08%, berdasarkan Rasio Ketergantungan hal ini menunjukkan bahwa persentase tersebut berarti sangat baik. Hal ini berarti walaupun terdapat pendapatan yang

meningkat pada kota Malang, tetapi pemerintah pusat masih terus memberikan subsidi kepada pemerintah daerah, dengan demikian kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang ada harus ditingkatkan, dimana untuk mengurangi bantuan dari pemerintah pusat.

2. Realisasi Total Dana Perimbangan terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun 2005

Perbandingan antara Realisasi Total Dana Perimbangan dengan Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun 2005 menunjukkan bahwa :

$$\frac{352,606,465,029.00}{411,346,670,316.71}$$
$$= 85.72\%$$

Dalam Perbandingan tersebut menghasilkan persentase sebesar 85.72% berdasarkan Rasio Ketergantungan hal ini menunjukkan bahwa persentase tersebut berarti sangat baik. Dapat diketahui bahwa dari tahun 2004 ke 2005 Dana Perimbangan yang diterima oleh pemerintah kota Malang tidak mengalami penurunan tetapi mengalami peningkatan, disini dapat diketahui bahwa masih terdapat ketergantungan yang besar terhadap bantuan yang berasal dari pusat.

3. Realisasi Total Dana Perimbangan terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun 2006

Perbandingan antara Realisasi Total Dana Perimbangan dengan Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun 2006 menunjukkan bahwa :

$$\frac{483,869,989,587.24}{546,181,303,088.43}$$
$$= 88.60\%$$

Dalam Perbandingan tersebut menghasilkan persentase sebesar 88.60% berdasarkan Rasio Ketergantungan hal ini menunjukkan bahwa persentase tersebut berarti sangat baik. Bantuan Dana Perimbangan yang berasal dari pusat selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimana disini dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 ini menunjukkan peningkatan yang mana persentase tersebut lebih besar hal ini yang menyebabkan ketergantungan

pemerintah daerah bila setiap tahun terus diberi bantuan oleh pemerintah pusat.

Perbandingan antara Realisasi Total Dana Perimbangan dengan Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun 2004 sampai Tahun 2006, menunjukkan setiap tahun selalu mengalami peningkatan dalam memberikan bantuan yang berasal dari pusat. Walaupun pendapatan daerah setiap tahunnya selalu meningkat tetapi kontribusi pemerintah pusat jauh lebih besar daripada penerimaan asli daerah sendiri, disini menunjukkan bahwa pemerintah kota Malang dalam mengelola potensi- potensi yang ada harus dapat memanfaatkannya dengan baik. Oleh karena itu pemerintah kota Malang masih bergantung dengan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, seharusnya dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah harus sudah dapat membiayai kebutuhannya sendiri tanpa harus menerima bantuan dari pusat. Tetapi fakta menyebutkan bahwa masih terdapat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

4. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

a. Faktor Pendukung yang dihadapi dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

1. Potensi Daerah

a. Potensi Sumber Daya Alam

Perlu diketahui bahwa setiap daerah- daerah selalu memiliki potensi- potensi sendiri salah satunya adalah sumber daya alam. Di kota Malang ini pengelola PAD dapat mengelelolah sumber daya alamnya, dimana dapat diketahui bahwa penerimaan dari jenis sumber daya alam ini terdapat peningkatan.

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Seperti diketahui bahwa sumber daya manusia yang berada di dinas pendapatan bekerja dengan baik, tetapi setiap pekerjaan tidak selalu baik juga

terdapat kesalahannya. Oleh karena itu Sumber daya Manusia Pengelola PAD di dinas pendapatan mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang baik, yang mana selalu efisien dan efektif.

Seperti dijelaskan diatas bahwa setiap manusia selalu memiliki potensinya sendiri-sendiri dalam bekerja yang mana dilihat dari kemampuannya dalam pengelolaan PAD yang ada di kota Malang ini. Dan setiap tahun sumber daya manusia yang ada di dinas pendapatan harus meningkatkan kemampuannya dalam segala bidang, selain dari dalam organisasi dari luar organisasi pun juga mempengaruhi yaitu turut serta masyarakat dengan taatnya masyarakat terhadap wajib pajak.

c. Potensi Sumber Daya Buatan

Dalam potensi ini banyak sekali ditemukan di kota Malang misalnya pembangunan terminal, stasiun, dll yang merupakan fasilitas umum. Dapat diketahui bahwa pembangunan tersebut selalu membutuhkan dana yang bersumber dari APBD. Setelah pembangunan tersebut selesai maka fasilitas yang telah tersedia tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, yang mana dalam memanfaatkan fasilitas tersebut selalu terkena retribusi, salah satu wujud inilah yang dapat menambah penerimaan yang ada di kota Malang ini.

d. Potensi Sumber Daya Kelembagaan

Potensi sumber daya kelembagaan ini merupakan suatu potensi yang ada didalam organisasi di dinas pendapatan yaitu struktur organisasi yang mana dalam struktur tersebut terdapat pembagian masing-masing pekerjaannya sesuai dengan bidangnya yang terdapat kepala yang selalu mengawasi kerja bawahannya.

b. Faktor Penghambat yang dihadapi dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

1. Potensi Daerah

a. Potensi Sumber Daya Alam

Dalam potensi ini walaupun di Malang terdapat potensi yang perlu digali tetapi jika pengelolaannya hanya terus dimanfaatkan tetapi tidak dijaga maka

sumber daya alam tidak akan berfungsi lagi. Bencana alam dapat menghambat penerimaan PAD dimana bencana alam terjadi sewaktu- waktu.

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam organisasi di dinas pendapatan dapat ditemui pegawai atau sumber daya manusia yang masih kurang serius dalam bekerja. Pegawai yang berada di dinas pendapatan dalam memberikan pelayanan masihterdapat yang kurang baik, dimana terdapat pelanggan yang ada tetapi pegawai tersebut tidak menghiraukannya. Sehingga tidak memberikan kinerja yang baik kepada masyarakat tersebut. Selain dari sektor dalam organisasi tersebut, di luar organisasi pun juga mempengaruhi misalnya saja terdapat wajib paat yang tidak tepat dalam membayar pajak tersebut sehingga penerimaan akan mengalami penurunan. Terdapat juga masyarakat yang tidak mengerti akan pajak.

c. Potensi Sumber Daya Buatan

Pemerintah kota Malang ini memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi masih terdapat pelayanan yang kurang baik yang mana terdapat jalan-jalan yang masih rusak, kondisi pasar yang kotor, faktor tadi yang membuat penerimaan daerah dapat terganggu karena fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah retribusi yang diminta.

d. Potensi Sumber Daya Kelembagaan

Walaupun sudah terdapat struktur organisasi yang telah dibuat untuk melaksanakan tugasnya setiap pegawai- pegawai yang ada di dinas pendapatan tetapi tetap saja terdapat pegawai yang tidak bekerja dengan bidangnya tersebut. Pegawai tersebut tidak serius dalam pekerjaannya pada waktu masih jam kerja pegawai tersebut masih terdapat pegawai yang berbicara masalah yang diluar pekerjaannya tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis yaitu:
 - a) Pajak Daerah
 - b) Retribusi Daerah
 - c) Bagian Laba Usaha Daerah / BUMD
 - d) Lain-lain (PAD)
2. Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan tetapi masih terdapat dana perimbangan yang berasal dari pemerintah yang masih memberikan bantuannya tersebut kepada daerah. Walaupun pendapatan asli daerah terdapat peningkatan tetapi terdapat juga yang belum mencapai targetnya.
3. Pendapatan Asli Daerah terbesar dari sektor pajaknya yang mana yang paling mendominasi dalam memberikan kontribusinya adalah pajak penerangan jalan, sedangkan target dan realisasi persentasenya yang paling tinggi pada pajak Reklame, dimana pemerintah masih dapat mengelolah pendapatan asli daerah dengan baik.
4. Pajak Daerah merupakan pajak yang terdiri dari enam macam yaitu : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Umum dan Pajak Parkir. Yang mana dalam setiap pajaknya memberikan potensi sendiri-sendiri. Dalam tahun 2004 sampai 2006 pajak yang paling memberikan kontribusi tinggi adalah pajak penerangan jalan sedangkan target dan realisasi persentasenya yang paling tinggi pada pajak Reklame.
5. Retribusi di kota Malang ini terdapat beberapa macam yang terdiri dari : Sewa tanah dan bangunan/ kekayaan daerah, Uang Sampedan dan ijin bangunan, Uang penguburan, Retribusi stasiun/ bus terminal, Rumah sakit dan balai pengobatan, Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Penerimaan dari catatan sipil/ biaya cetak KTP, Retribusi penyelenggaraan kebersihan, Pemeriksaan alat pemadam, Retribusi tempat parkir/ parkir tepi jalan umum, Retribusi tempat olahraga/ Rekreasi, Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Ijin gangguan, Retribusi

perindustrian dan perdagangan, Retribusi Ketenagaan Kerja, Retribusi Pariwisata, dan SIUJK. Dalam Retribusi ini yang paling tinggi memberikan kontribusinya terdapat pada retribusi IMB yang mana masyarakat kota Malang ini banyak yang merubah lahan persawahannya menjadi rumah sehingga menghasilkan penambahan terhadap penerimaan yang berada di kota Malang ini dan target dan realisasi yang mencapai persentase yang paling tinggi pada Retribusi Pelayanan Pemakaman.

6. Bagian Laba Usaha Daerah atau BUMD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil Perusahaan milik daerah dari hasil daerah yang dipisahkan. Di dalam kota Malang ini terdiri dari lima jenis BUMD yaitu : Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Air Minum, Rumah Potong Hewan, dan Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Rumah Potong Hewan. Dalam pos BUMD ini yang paling memberikan kontribusi terbesar pada PDAM disini BUMD tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat memperbanyak pelanggan- pelanggan PDAM di kota Malang ini. Dan untuk target dan realisasi yang mencapai persentase tertinggi pada Bank Perkreditan Rakyat sebesar sedangkan untuk persentase terendah pada BUMD Rumah Potong Hewan.

7. Lain- Lain pendapatan yang syah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari: pendapatan lain- lain yaitu : Penerimaan Deviden dari BPD Jatim, Jasa Penggunaan Dana Pemda dari BPD/ Jasa, Penerimaan Bunga Deposito dan Penerimaan lain-lain. Dalam setiap thun yang memberikan kontribusi terbesar selalu berbeda- beda untuk tahun 2004 didominasi oleh : Penerimaan Deviden dari BPD sedangkan yang paling rendah dalam pemberian kontribusi dan target dan realisasi dalam persentasenya juga pada Penerimaan Deviden dari BPD Jatim , untuk tahun 2005 oleh Penerimaan lain-lain sedangkan dalam target dan realisasi persentase yang besar pada Penerimaan Jasa Giro , dan untuk tahun 2006 kontribusi terbesar pada Penerimaan Bunga Deposito sedangkan target dan realisasi yang persentasenya yang paling besar dicapai pada Penerimaan Lain-lain. Sehingga setiap tahun tidak selalu didominasi dari satu jenis penerimaan saja. Tetapi penerimaan yang lain

juga memiliki kualitas sendiri-sendiri dalam menambah penerimaan yang berada di kota Malang ini.

8. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai daerah. Dana Perimbangan dipisahkan menjadi lima jenis, yaitu:

a. Dalam pasal 1 UU No. 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bagi Hasil Pajak, yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan pasal 21. Yang paling tinggi kontribusinya pada tahun 2004 dan 2005 didominasi oleh PBB dan untuk target dan realisasi persentasenya yang paling tinggi didominasi oleh BPHTB. Sedangkan tahun 2006 yang paling tinggi kontribusinya juga pada PBB tetapi target dan realisasi persentasenya paling tinggi pada Pajak Penghasilan pasal 21.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak, yang terdiri dari : 2004 terdiri dari lima jenis dana bagi hasil bukan pajak yaitu : Iuran Hasil Pengusahaan Hutan/ Provinsi SD. Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan, Minyak Bumi, dan Gas Alam, Dimana yang paling tinggi setiap tahunnya selalu berubah-ubah. Untuk tahun 2004 Iuran Hasil Pengusahaan Hutan/ Provinsi SD. Hutan pencapaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar untuk yang paling rendah terdapat pada Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, sedangkan untuk target dan realisasi persentase yang paling tinggi pada Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk yang paling rendah pada Gas Alam. Untuk tahun 2005 paling tinggi pada Pungutan Pengusahaan. Dan untuk target dan realisasi persentase yang paling besar pada BPHTB rendah baik dari kontribusi maupun dari target dan realisasi persentasenya juga pada Bagi Hasil PPH Pasal 21 dan tahun 2006 yang paling tinggi pada Minyak Bumi sedangkan untuk target dan realisasi persentase yang paling tinggi pada Provisi Sumber Daya Hutan.

c. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut pasal 1 UU No. 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain itu DAU bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Khusaini, 2007, h.36). Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, kondisi geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Dalam setiap tahun DAU ini selalu mengalami peningkatan. DAU umum setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang mana selalu mencapai targetnya 100.00%.

d. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 PP No. 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan, disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Dalam setiap tahun DAK yang berada di kota Malang ini selalu mengalami peningkatan yang mana setiap tahun yang memberikan kontribusi terbesar dalam bidangnya selalu berbeda- berbeda. Pada tahun 2004 DAK yang paling tinggi pada DAK Bidang Kesehatan. Tahun 2005 Dana Alokasi Khusus disini yang paling tinggi pencapaiannya pada Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan yang paling rendah pada DAK Bidang Perikanan, Sedangkan yang paling tinggi target dan realisasi persentasenya dari DAK keseluruhannya mencapai 100.00% kecuali pada Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sebesar 99.83% yang belum mencapai 100.00%. Untuk Tahun 2006 Dana Alokasi Khusus disini yang paling tinggi pencapaiannya pada Bidang Jalan dan yang paling rendah pada DAK Bidang Lingkungan Hidup.

e. Dana Darurat, terdiri atas Dana Kontingensi atau dana penyesuaian, di kota Malang ini terdapat dana penyesuaian atau dana penyeimbang hanya pada tahun 2004 dan 2005 saja dan tidak terdapat pada tahun 2006.

9. Tingkat kemandirian fiskal pemerintah kota Malang dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 ini Perbandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Realisasi Total Pendapatan daerah menghasilkan tolok ukur kemandirian sebesar 11.41% disini realisasi pendapatan naik dari tahun sebelumnya, Pada tahun 2006 ini pendapatan tertinggi kontribusinya didominasi oleh pajak penerangan jalan, retribusi IMB, PDAM dan Penerimaan Bunga Deposito. Tahun 2006 tolok ukur kemandirian sebesar 11.41% yang mana merupakan tingkat yang kurang, walaupun jumlah pendapatan naik tetapi persentase tolok ukur kemandirian turun. Sehingga disini kota Malang ini belum bisa disebut mandiri, walaupun telah terdapat otonomi daerah. Dan untuk Dana Perimbangan mencapai 12.88% yang mana persentase menunjukkan tingkat yang kurang, disini walaupun persentase turun tetapi perolehan pendapatan tinggi dan dana perimbangan juga tinggi dan tidak selalu dipengaruhi oleh persentase dalam kemampuan daerah tetapi jumlah perolehannya juga menetapkan. Oleh karena itu pada tahun 2006 ini penerimaan yang berada di daerah masih besar yang berasal dari dana perimbangan dari pada yang berasal dari pendapatannya.

10. Tingkat kemandirian fiskal pemerintah kota Malang dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 ini melalui Perbandingan antara Realisasi Total Dana Perimbangan dengan Realisasi Total Pendapatan daerah menghasilkan tolok ukur kemandirian sebesar 88.60% berdasarkan Rasio Ketergantungan hal ini menunjukkan bahwa persentase tersebut berarti sangat baik. Sedangkan Perbandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Realisasi Total Pendapatan daerah menghasilkan tolok ukur kemandirian sebesar 11.41% dimana pendapatan daerah ini berarti Kurang. Dapat dibandingkan disini bahwa penerimaan dana perimbangan disini jauh lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh oleh daerah hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah kota Malang dalam mengelola keuangan daerah kurang baik.

11. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Malang dilihat dari Potesi SDA, SDM, Sumber Daya Buatan dan Sumber daya Kelembagaan.

B. Saran

1. Dengan adanya Otonomi daerah seharusnya daerah sudah tidak bergantung lagi dengan dana banuan yang berasal dari pusat atau dana perimbangan. Tetapi disini pemerintah kota Malang masih bergantung terhadap dana perimbangan tersebut, seharusnya pemerintah kota Malang harus menunjukkan kemampuannya dalam mengelolah potensi yang telah ada. Sehingga dapat mewujudkan kemandirian fiskalnya. Melihat tingkat ketergantungan yang relatif besar pemerintah Daerah kota Malang terhadap pemerintah pusat, maka perlu upaya meningkatkan penerimaan asli daerah dan meminimkan belanja daerah.
2. Dalam mengelola potensi-potensi yang ada disini diharapkan sumber daya manusia khususnya dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan disini diharapkan masyarakat juga tertib akan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basri, H.Faisal. 2003. *Otonomi Daerah evaluasi dan proyeksi*. Jakarta : Trio Rimba Persada.
- Dasril, Munir. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Haris,Syamsuddin. 2005.*Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta
- Kaho, Josef Riwu.1995. *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kansil, S.T.Christine. 2001. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Khusaini, Mohammad. 2007. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang : BPFU Unibraw.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategis dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta: Andi
- Miles, B Mathew dan Michael Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru diterjemahkan oleh Tjejep Rohadi*. Jakarta : UI Press
- Moleong, J Lexy.2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muluk, Khairul.2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Nasir, Mohammad.1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud. 2000. *Kebijakan Fiskal Nasional untuk Mendukung Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan pada Seminar Otonomi Daerah dalam rangka Lustrom I MEP.UGM Yogyakarta.
- Singarimbun dan Efendi.1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta :LP3ES
- Subrata, Adi, Surya Winarno. 1999. *Otonomi daerah di Era reformasi*. Yogyakarta : UPP AMPYKPN,
- Sugiyono.2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : ANDI

Jurnal

Muluk, Khairul.2003. *Desentralisasi Fiskal: Cakupan Finansial Pemerintah Daerah*. Jurnal Desentralisasi Vol. 2 No. 2 Pusat Kajian Kinerja Otda. Malang : Lembaga Administrasi Negara.

Undang-Undang dan Peraturan Pendukung

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok- pokok Pemerintahan Daerah

INTERNET

www.kotamalang.go.id

